



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, meliputi pergeseran kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok kerja sasaran kegiatan, dipandang perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 31), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 26 Juli 2021


BUPATI GROBOGAN,
SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 27 Juli 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,
MUHAMMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 31



DAFTAR ISI

Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Pendahuluan	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-10
1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Tahun 2021	I-10
1.5. Sistematika Perubahan RKPD	I-11
 BAB II EVALUASI RKPD TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II...	 II-1
2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Makro	II-1
2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Urusan.....	II-25
 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	 III-1
3.1. Perubahan Kondisi dan Asumsi Perekonomian	III-1
3.2. Perubahan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	III-7
 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021.....	 IV-1
4.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021	IV-1
4.2. Arah Kebijakan Pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2021	IV-29
 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	 V-1
 BAB VI PENUTUP	 VI-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020	II-1
Tabel 2.2	Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010.....	II-2
Tabel 2.3	Perkembangan Sektoral PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010.....	II-3
Tabel 2.4	Perkembangan Sektoral PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020	II-3
Tabel 2.5	PDRB Per Kapita Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020.....	II-4
Tabel 2.6	Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Pendidikan	II-26
Tabel 2.7	Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Kesehatan	II-30
Tabel 2.8	Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-36
Tabel 2.9	Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Perumahan dan Permukiman	II-40
Tabel 2.10	Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-41
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Sosial.....	II-44
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Ketenagakerjaan	II-46
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-49
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Ketahanan Pangan	II-52
Tabel 2.15	Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Lingkungan Hidup	II-53
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	II-55
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Pemberdayaan Masyarakat	II-57
Tabel 2.18	Capaian Indikator Program Daerah Kabupaten Grobogan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-59
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Perhubungan	II-62
Tabel 2.20	Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Komunikasi dan Informatika	II-64



Tabel 2.21	Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-66
Tabel 2.22	Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	II-67
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Kepemudaan dan Olahraga	II-69
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Statistik.....	II-70
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Persandian ..	II-71
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Kebudayaan	II-72
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Perpustakaan.....	II-74
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Kearsipan...	II-75
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Kelautan dan Perikanan II-76.....	II-76
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Pariwisata ...	II-77
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Pertanian	II-79
Tabel 2.32	Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Perdagangan	II-83
Tabel 2.33	Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Perindustrian	II-85
Tabel 2.34	Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Transmigrasi.....	II-87
Tabel 2.35	Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Perencanaan Pembangunan	II-88
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Keuangan Daerah	II-91
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Kepegawaian	II-92
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Sekretariat Daerah	II-94
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Sekretariat Dewan	II-96
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Pengawasan	II-97
Tabel 3.1	Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2021	III-2
Tabel 3.2	Perubahan Asumsi Ekonomi Makro Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	III-5
Tabel 3.3	Perubahan Asumsi Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2021	III-6
Tabel 3.4	Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2021	III-10
Tabel 4.1	Penjabaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Kedalam Program Pembangunan	IV-6



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2021	I-2
Gambar 2.1	Grafik Perkembangan inflasi Kabupaten Groboan, Jawa tengah Dan Nasional Tahun 2016-2020	II-6
Gambar 2.2	Inflasi Kabupaten Grobogan dan Daerah Sekitar Tahun 2020.....	II-6
Gambar 2.3	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (Rupiah/Kapita/Bulan)	II-7
Gambar 2.4	Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (Rupiah/Kapita/Bulan)	II-8
Gambar 2.5	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%).....	II-9
Gambar 2.6	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (%) II-9	
Gambar 2.7	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020.....	II-10
Gambar 2.8	Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (Ribu Jiwa)	II-11
Gambar 2.9	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2020.....	II-12
Gambar 2.10	Posisi Relatif Indeks Ke dalam Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan Tahun 2020	II-12
Gambar 2.11	Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2021	II-13
Gambar 2.12	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	II-14
Gambar 2.14	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017-2020 (%)....	II-15
Gambar 2.15	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020.....	II-16
Gambar 2.16	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Grobogan dan Daerah Sekitar Tahun 2020	II-16
Gambar 2.17	Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)	II-17
Gambar 2.18	Posisi Relatif Umur Harapan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (tahun).....	II-18
Gambar 2.19	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)	II-19



Gambar 2.20 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (tahun).....	II-19
Gambar 2.21 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)	II-20
Gambar 2.23 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (ribu rupiah).....	II-21
Gambar 2.24 Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (ribu rupiah)	II-22
Gambar 2.25 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	II-23
Gambar 2.26 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan Tahun 2020	II-23
Gambar 2.27 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019.....	II-24
Gambar 2.28 Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Grobogan tahun 2019	II-25



BAB I PENDAHULUAN

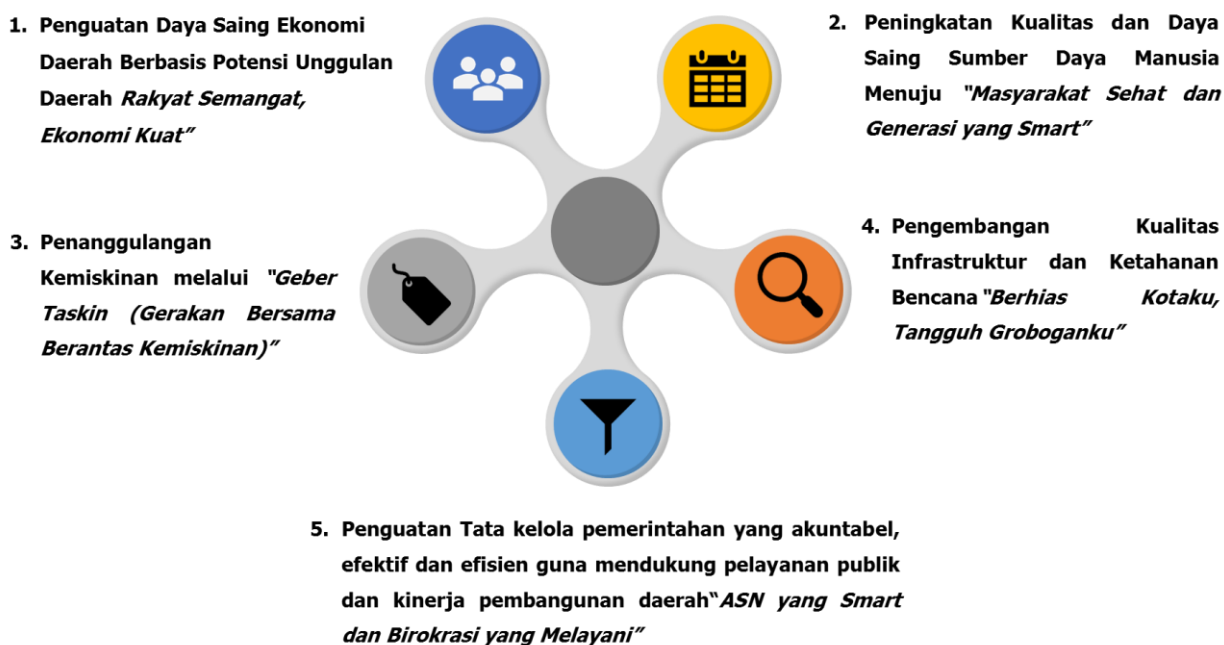
1.1 Pendahuluan

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD yang disusun setiap tahun menjadi jembatan untuk mewujudkan Visi jangka menengah Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021 yaitu: **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh"**.

RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2021 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021. Tema pembangunan daerah tahun 2021 dalam RPJMD adalah: ***"Penguatan ketahanan pangan dan peningkatan produksi pertanian dalam arti luas berbasis lingkungan hidup menuju masyarakat sejahtera"***. Pada tahap ini pembangunan daerah difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada ketahanan pangan yang disertai dengan upaya menuju pada kemandirian pangan. Ketersediaan pangan secara terjangkau dan aman menjadi fokus utama agar masyarakat dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Seiring dengan hal tersebut perlu diupayakan juga peningkatan produksi pertanian dalam arti luas termasuk perikanan budidaya. Pengembangan produksi pertanian dalam arti luas dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Mendasarkan pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Grobogan pada tahun 2021, prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024, dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2018-2023, serta memperhatikan Tema, Prioritas dan Fokus RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah setelah mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19, maka Tema Pembangunan Kabupaten Grobogan tahun 2021 disesuaikan menjadi "Percepatan pemulihan perekonomian didukung penguatan ketahanan pangan berbasis lingkungan hidup menuju masyarakat sejahtera", yang dijabarkan kedalam lima prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Gambar 1.1 Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2021

APBD Kabupaten Grobogan tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021. Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2021 terdapat beberapa kebijakan dan kebutuhan mendesak yang perlu diakomodir dalam perubahan APBD Tahun 2021. Dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2021, maka perlu dilakukan perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2021.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.



Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan disusun dengan tahapan meliputi: (1) Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD; (2) Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan (3) Penetapan Perubahan RKPD. Secara rinci tahapan proses penyusunan perubahan RKPD dijelaskan sebagai berikut.

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan perubahan RKPD tahun 2021 disusun berpedoman pada: Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Grobogan; dan Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Grobogan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021. Perumusan rancangan perubahan RKPD mencakup:

- a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
- c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
- e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Setelah Rancangan Perubahan RKPD disajikan sesuai dengan sistematika dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, selanjutnya Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah yang dilampiri dengan rancangan perubahan RKPD, dan disampaikan kepada seluruh perangkat daerah untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah.

2. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Dalam Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan verifikasi terhadap Rancangan Perubahan Renja PD. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD. Berdasarkan rancangan perubahan Renja PD yang telah di verifikasi, Bappeda menyempurnakan rancangan Perubahan RKPD menjadi rancangan akhir Perubahan RKPD.

3. Penetapan Perubahan RKPD

Dalam rangka penetapan perubahan RKPD, Rancangan akhir perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD. Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD kepada



gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi. Berdasarkan hasil fasilitasi tersebut, dilakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD. Selanjutnya dokumen Perubahan RKPD tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Perubahan RKPD memiliki kedudukan yang sangat penting. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Perubahan RKPD Tahun 2021 ditetapkan dengan peraturan Bupati. Perubahan RKPD Tahun 2021 tersebut menjadi Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun anggaran 2021 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD Tahun anggaran 2021 yang akan disepakati bersama DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun anggaran 2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
 31. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
 32. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang



- Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
33. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
34. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
35. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17);
36. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
37. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
38. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130)
39. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
40. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);



43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/Pmk.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20.21 Nomor 83);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14).
49. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 10), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 12);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan



- Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 1);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 8).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA), serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-P) Tahun Anggaran 2021.
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 adalah untuk menyesuaikan perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan menciptakan keselarasan program perubahan RKPD dengan RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021 sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Tahun 2021



Beberapa dasar pertimbangan yang menjadi dasar Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan yang Tidak Sesuai Dengan Asumsi Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah

Pandemi Covid-19 hingga tahun 2021 masih berlangsung. Pengaruh Pandemi Covid-19 ini berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan daerah maupun penerimaan yang bersumber dari dana transfer. Pendapatan daerah Kabupaten Grobogan yang memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap pemerintah pusat tentunya akan terpengaruh oleh kebijakan pemerintah pusat. Pada tahun 2021 terjadi Penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana alokasi Khusus (DAK) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya.

2. Adanya Kebijakan Pengalokasian Anggaran Belanja

Pengalokasian anggaran belanja daerah perlu disesuaikan untuk penanganan Covid-19 dan mengurangi belanja yang tidak terlalu menunjang kinerja daerah. Pengalokasian belanja pada Perubahan APBD perlu dilakukan dalam rangka mengakomodir penyesuaian alokasi belanja transfer mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, meliputi untuk:

- 1) Mendukung program pemulihan ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah, termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan, perlindungan sosial; dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- 2) Dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi COVID-19 dan belanja prioritas lainnya; meliputi: dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19; insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19; dan belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

1.5 Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2021

Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2021 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :



- Bab I Pendahuluan**, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dasar pertimbangan perubahan RKPD, dan sistematika Perubahan RKPD.
- Bab II Evaluasi Hasil RKPD s/d Triwulan II Tahun 2021**, berisi tentang kompilasi hasil pengolahan dan analisis evaluasi terhadap capaian target kinerja dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II.
- Bab III Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah**, berisi tentang gambaran kondisi perekonomian dan proyeksi keuangan daerah tahun 2021.
- Bab IV Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah**, berisi tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada perubahan tahun 2021.
- Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**, berisi tentang program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat.
- Bab VI Penutup**, berisi tentang kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2021.



BAB II

EVALUASI RKPD TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Makro

Pencapaian kinerja makro ekonomi dan sosial pembangunan dapat digambarkan dari beberapa indikator sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Pertumbuhan PDRB

PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Perkembangan PDRB Kabupaten Grobogan Atas Harga Berlaku pada tahun 2016 hingga 2019 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan, tercatat PDRB Kabupaten Grobogan berdasarkan harga berlaku sebesar 27.264.642,82 juta rupiah. Perkembangan ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.1
PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020

No.	Lapangan Usaha	Tahun (Juta Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.924.435,70	7.197.969,74	7.492.270,50	7.518.944,81	7.807.904,94
2	Pertambangan dan Penggalian	272.319,52	292.558,63	320.270,65	358.185,54	369.166,13
3	Industri Pengolahan	2.592.911,62	2.868.784,18	3.270.867,21	3.632.925,31	3.734.211,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	18.425,63	20.901,66	22.744,91	24.298,54	25.266,56
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.788,56	10.434,91	11.044,71	11.973,13	12.534,75
6	Konstruksi	1.211.650,02	1.314.658,71	1.436.640,45	1.570.385,00	1.444.478,73
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	4.186.952,09	4.562.213,97	5.000.917,30	5.481.403,92	5.428.016,13

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



No.	Lapangan Usaha	Tahun (Juta Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
	dan Sepeda Motor					
8	Transportasi dan Pergudangan	992.492,96	1.078.185,31	1.165.022,32	1.312.081,20	966.544,15
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	984.266,58	1.071.413,07	1.181.351,78	1.327.740,76	1.319.413,49
10	Informasi dan Komunikasi	450.255,95	543.471,56	629.542,51	708.722,88	834.197,52
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	908.281,21	1.015.734,38	1.094.052,95	1.156.280,44	1.215.736,00
12	Real Estate	459.717,05	496.373,34	532.275,61	576.910,89	579.572,84
13	Jasa Perusahaan	55.698,74	61.402,18	68.455,76	77.562,70	74.338,62
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	784.646,45	827.877,05	856.591,26	903.533,33	904.892,49
15	Jasa Pendidikan	1.107.669,68	1.211.128,52	1.329.896,27	1.465.454,96	1.456.775,78
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	214.133,61	236.832,21	265.598,24	290.244,58	309.404,19
17	Jasa lainnya	591.271,91	653.603,83	720.374,24	794.204,84	782.189,38
	Jumlah	21.764.917,28	23.463.543,25	25.407.053,22	27.278.521,82	27.264.642,82

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2021

PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Grobogan juga terus mengalami peningkatan pada tahun 2016-2019. Tahun 2020 sedikit mengalami penurunan. PDRB Kabupaten Grobogan berdasarkan harga konstan tahun 2010 pada tahun 2020 sebesar 19.379.683,67 juta rupiah. Perkembangan PDRB ADHK di Kabupaten Grobogan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020
(Juta Rp)

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.945.935,34	5.092.068,97	5.153.663,82	5.075.560,67	5.191.418,52
2	Pertambangan dan Penggalan	181.847,14	189.656,52	201.622,38	220.236,50	223.576,41
3	Industri Pengolahan	1.893.484,71	2.052.872,11	2.290.245,39	2.494.834,78	2.504.481,53
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17.111,62	17.919,28	18.870,21	19.965,72	21.093,65
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.700,87	8.139,35	8.521,84	9.059,32	9.233,59
6	Konstruksi	934.380,36	986.361,63	1.034.496,48	1.092.990,96	1.003.028,18
7	Perdagangan Besar dan	3.533.658,09	3.767.444,62	4.015.289,06	4.292.117,11	4.205.503,15

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
	Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
8	Transportasi dan Pergudangan	874.144,68	935.331,03	1.003.059,08	1.101.544,34	786.284,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	742.451,16	798.783,54	867.601,69	956.007,73	940.730,51
10	Informasi dan Komunikasi	481.149,03	552.421,98	640.224,89	713.196,71	832.856,53
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	665.973,46	715.919,54	744.740,83	773.097,11	808.592,04
12	Real Estate	402.061,56	423.395,13	445.455,19	474.781,54	474.227,15
13	Jasa Perusahaan	42.444,56	45.486,68	49.657,39	54.716,60	51.284,25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	570.846,43	585.332,49	598.876,61	621.795,77	616.278,75
15	Jasa Pendidikan	753.687,48	795.963,89	853.470,60	915.566,12	903.281,59
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	160.404,70	174.701,11	191.232,91	204.689,96	213.517,52
17	Jasa lainnya	475.348,51	517.456,42	563.940,55	617.357,28	594.295,76
	Jumlah	16.682.629,70	17.659.254,29	18.688.571,17	19.692.631,32	19.379.683,67

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2021

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2010 selama kurun waktu tahun 2016 - 2019 kondisinya fluktuatif tetapi masih menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2020 mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan minus 1,59 dikarenakan terjadinya pandemi Covid-9 yang terjadi mulai awal tahun 2020. Hal ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Grobogan saja, tetapi juga dialami oleh seluruh Kabupaten di Jawa Tengah bahkan Nasional.

Secara keseluruhan pertumbuhan sektoral PDRB pada tahun 2016 sampai dengan 2020 atas dasar harga konstan tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pertumbuhan Sektoral PDRB Tahun 2016-2020
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

No.	Lapangan Usaha	Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	2,57	2,95	1,21	-1,52	2,28
2	Pertambangan dan penggalan	2,35	4,29	6,31	9,23	1,52
3	Industri pengolahan	5,37	8,42	11,56	8,93	0,39

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



4	Pengadaan listrik gas	5,16	4,72	5,31	5,81	5,65
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	2,78	5,69	4,70	6,31	1,92
6	Konstruksi	5,59	5,56	4,88	5,65	-8,23
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4,45	6,62	6,78	8,06	-3,26
8	Transportasi dan pergudangan	7,51	7,00	7,24	9,82	-28,62
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	4,52	7,59	8,62	10,19	-1,60
10	Informasi dan komunikasi	6,93	14,81	15,89	11,40	16,78
11	Jasa Keuangan dan asuransi	7,78	7,50	4,03	3,81	4,59
12	Real estate	6,04	5,31	5,21	6,58	-0,12
13	Jasa perusahaan	6,80	7,17	9,17	10,19	-6,27
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan	2,91	2,54	2,31	3,83	-0,89
15	Jasa pendidikan	5,83	5,61	7,22	7,28	-1,34
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	5,97	8,91	9,46	7,04	4,31
17	Jasa lainnya	6,60	8,86	8,98	9,47	-3,74
	PDRB	4,51	5,85	5,83	5,37	-1,59

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2021

2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Inflasi yaitu indikator ekonomi yang sering dicermati karena terkait langsung dengan kemampuan daya beli dari uang yang dimiliki oleh masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Perubahan harga secara umum (inflasi/deflasi) untuk barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuatif tetapi masih dalam kategori rendah dimana pada tahun 2019 nilai inflasi Kabupaten Grobogan sebesar 2,82% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 2,89%. Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan tahun 2020 berdasarkan kepada kabupaten Kudus sebagai *sister city* karena BPS Kabupaten Grobogan tidak diberi otoritas untuk menghitung nilai inflasi sendiri, adapun inflasi Kabupaten Kudus tahun 2020 adalah 1,24. Berikut perbandingan inflasi Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional dari tahun 2015 hingga 2020.

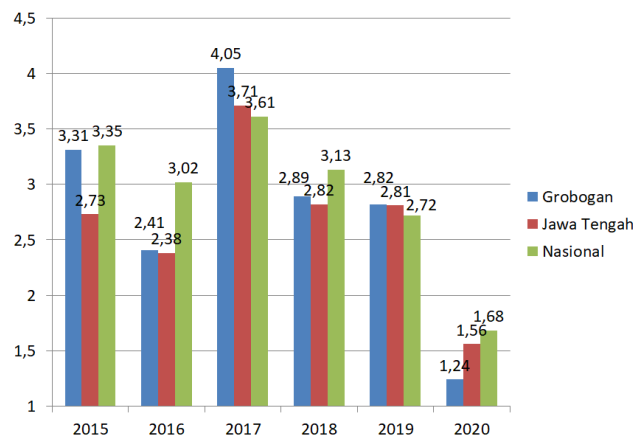
Tabel 2.3
Angka Inflasi Kabupaten Grobogan Tahun 2015-2020

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Inflasi	Tahun (%)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Grobogan	3,31	2,41	4,05	2,89	2,82	1,24
Jawa Tengah	2,73	2,38	3,71	2,82	2,81	1,56
Nasional	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

Sumber : dari berbagai sumber, diolah, 2021



Gambar 2.4 Perkembangan inflasi Kabupaten Grobogan tahun 2015-2020

3. Kondisi Kemiskinan

Kondisi umum kemiskinan di Kabupaten Grobogan dapat digambarkan dengan beberapa indikator sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Garis Kemiskinan

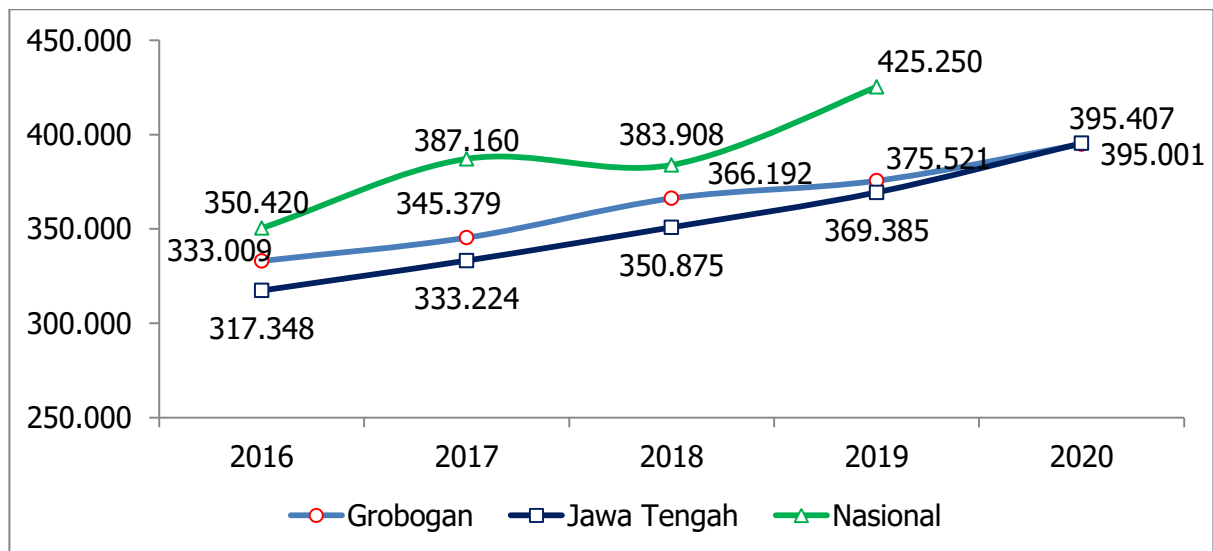
Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Grobogan sampai

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



dengan tahun 2020 yang mencapai sebesar Rp395.001,-/kapita/bulan, yang terus meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp303.455-/kapita/bulan. Dilihat dari kondisi Provinsi dan Nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun termasuk kondisi Kabupaten Grobogan tahun-tahun sebelumnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

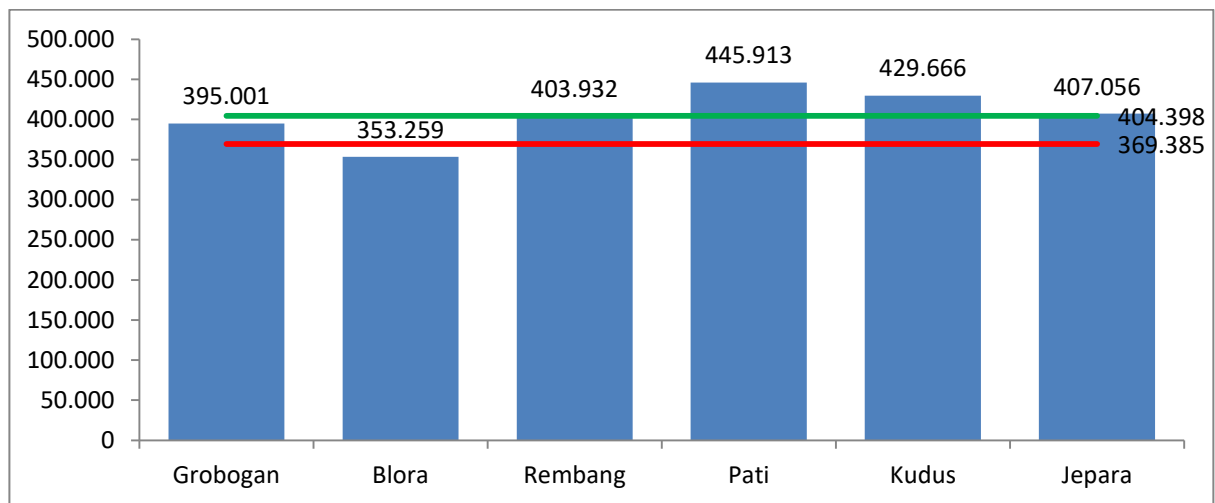


Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 2.1 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Provinsi sebesar Rp369.385,-/kapita/bulan dan Nasional sebesar Rp404.398,-/kapita/bulan pada tahun 2020, Kabupaten Grobogan dengan capaian sebesar Rp395.001,-/kapita/bulan berada di atas Provinsi dan di bawah Nasional serta menempati posisi kedua terendah setelah Kabupaten Blora sebesar 353.259,-/kapita/bulan) dibandingkan Kabupaten Kabupaten sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021

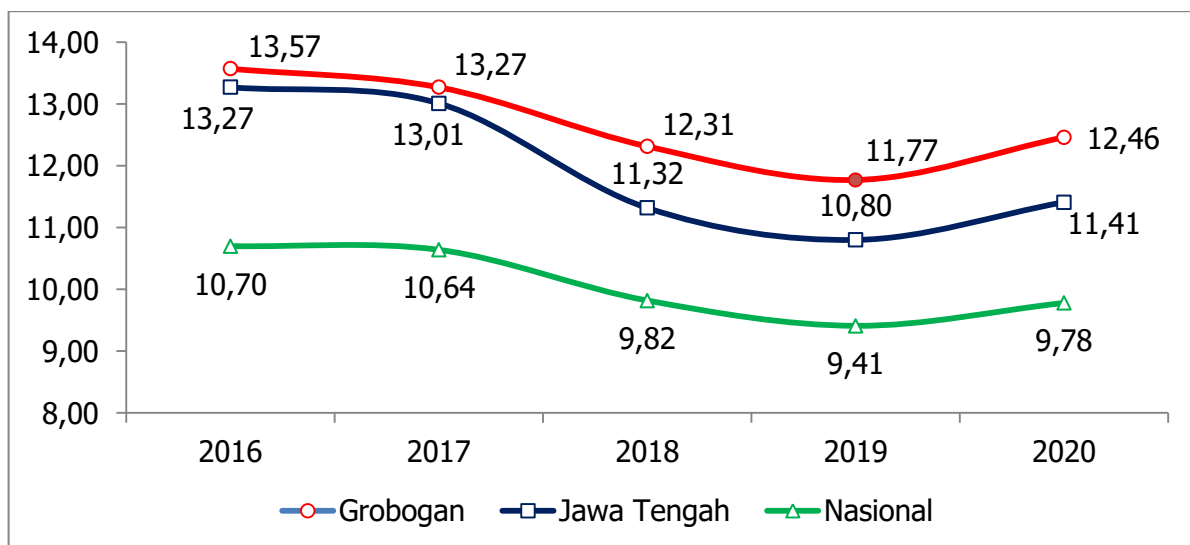


Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 2.2 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (Rupiah/Kapita/Bulan)

b. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan penurunan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 13,57% menurun menjadi sebesar 12,46% pada tahun 2020. Kondisi relevan terhadap perkembangan persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



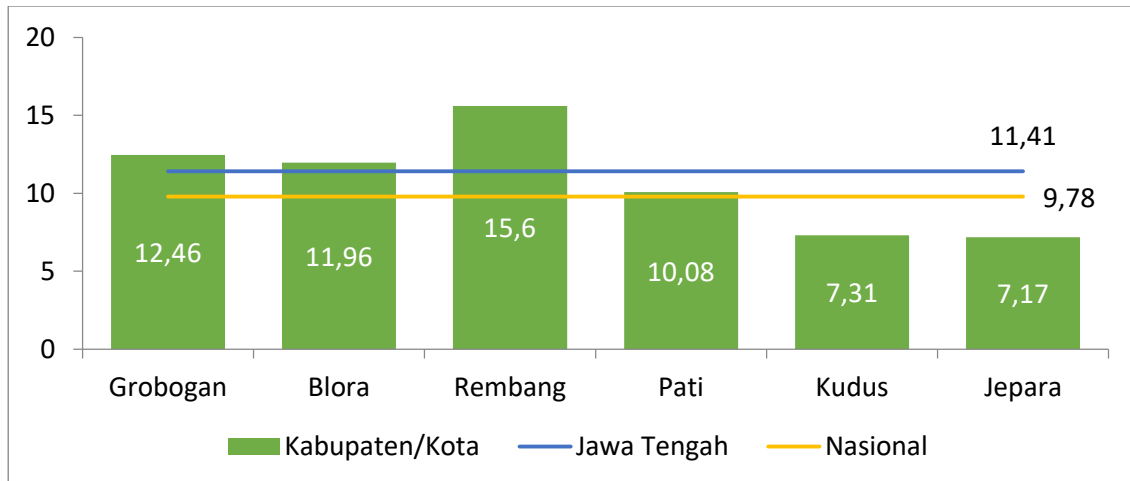
Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 2.3 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 12,46% berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,41% dan Nasional sebesar 9,78% serta menempati posisi tertinggi kedua setelah Kabupaten Rembang sebesar 15,6% dibandingkan Kabupaten sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



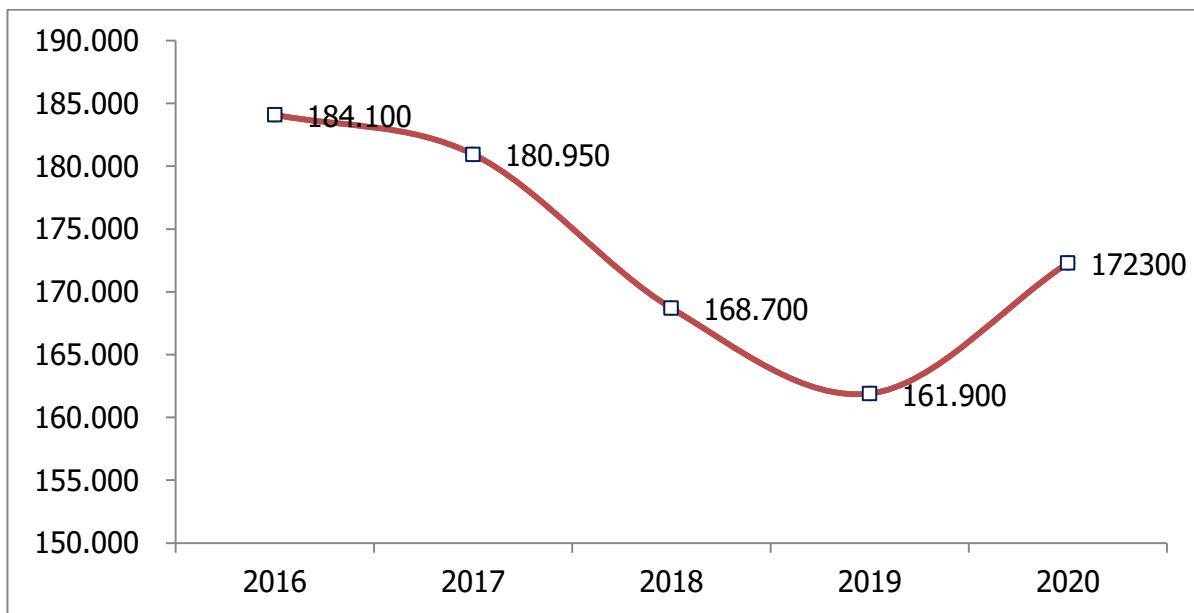
Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 2.4 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (%)

c. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Grobogan tahun 2016 hingga 2020 terus menurun, yaitu pada tahun 2016 sebesar 184.100 jiwa menurun menjadi sebesar 172.300 jiwa pada tahun 2020. Penurunan jumlah penduduk miskin relevan dengan penurunan persentase penduduk miskin pada tahun yang sama. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

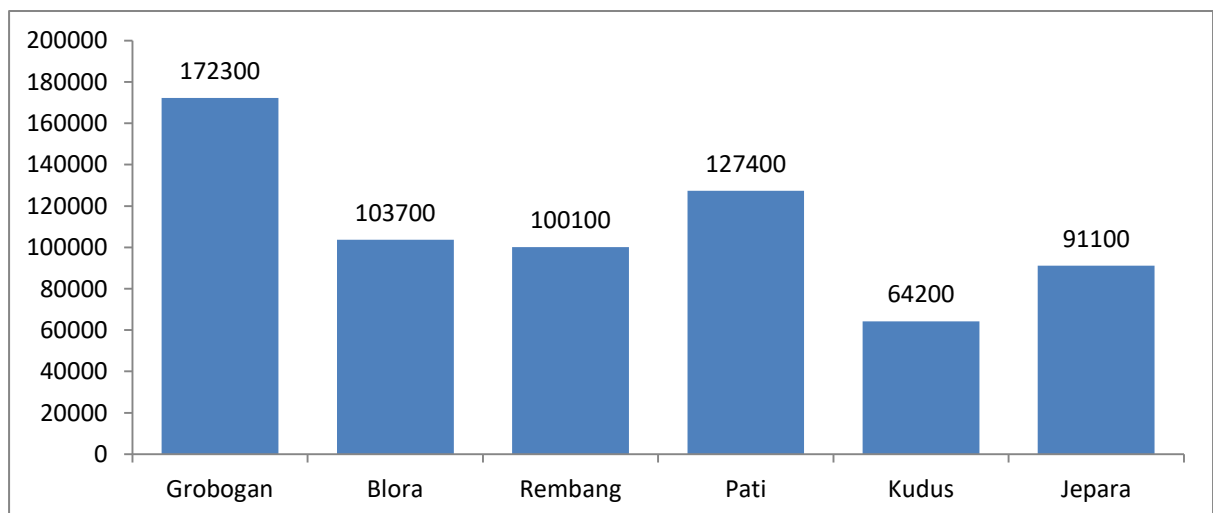
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 2.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020

Dibandingkan dengan Kabupaten lain dalam wilayah Kedungsepur, jumlah penduduk Kabupaten Grobogan tahun 2020 mencapai sebesar 172.300 jiwa menempati urutan tertinggi, berbeda dengan peringkat persentase penduduk miskin yang menempati posisi kedua setelah Kabupaten Demak. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



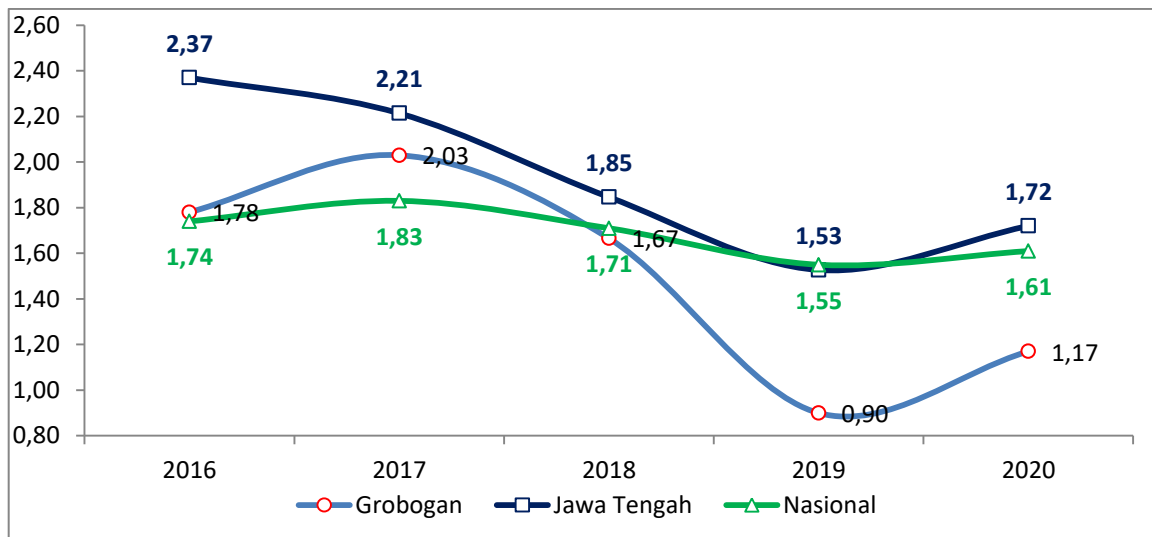
Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 2.6 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (Ribu Jiwa)



d. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan P1 Kabupaten Grobogan selama tahun 2016 hingga tahun 2020 terjadi fluktuatif, namun kecenderungan menurun, yaitu pada tahun 2016 sebesar 1,78 dan tahun 2020 menjadi sebesar 1,17. Kondisi tersebut juga terjadi pada perkembangan P1 Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci pada gambar grafik berikut.

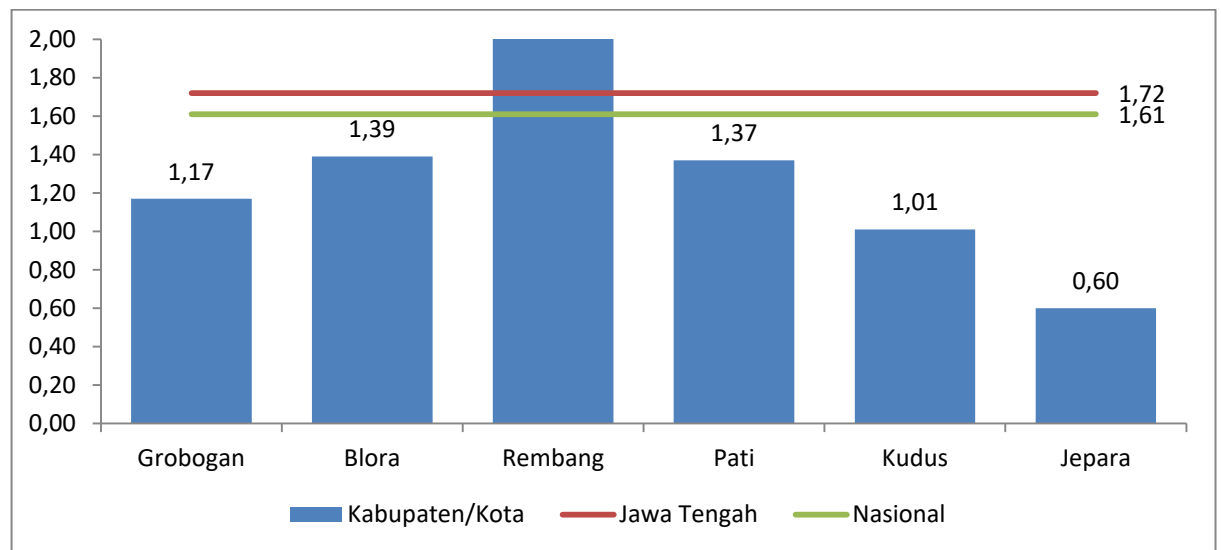


Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 2.7 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2020

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 1,17 berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,72 dan Nasional sebesar 1,61. Dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, P1 Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



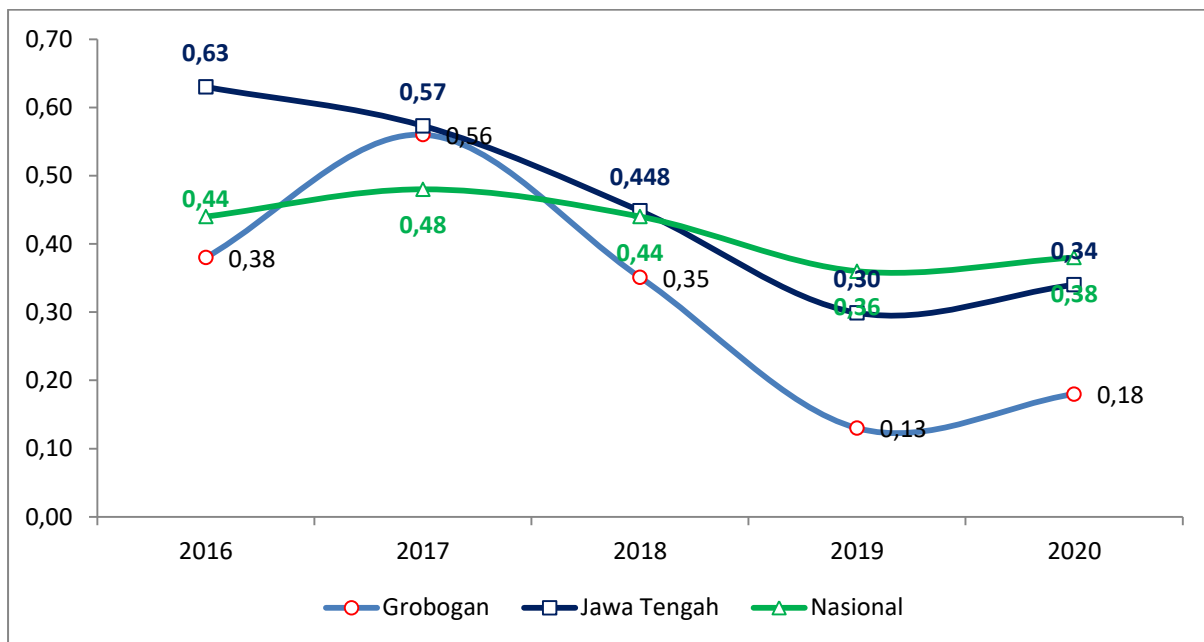
Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 2.8 Posisi Relatif Indeks Ke dalam Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan Tahun 2020

e. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan P2 Kabupaten Grobogan tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan fluktuatif, namun kecenderungan menurun, yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,38. Kemudian menurun menjadi sebesar 0,18 pada tahun 2020. Kondisi tersebut juga terjadi pada perkembangan P2 Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci pada gambar grafik berikut.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Sumber : BPS Nasional, 2021

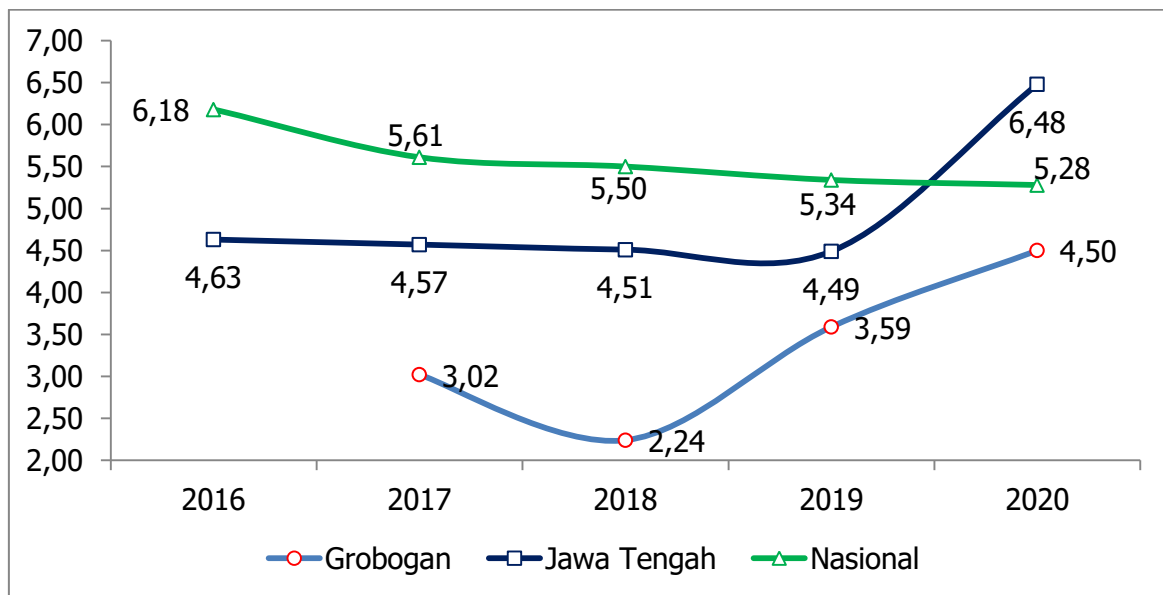
Gambar 2.9 Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2021

4. Kondisi Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan penurunan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 3,02% dan menjadi sebesar 4,5% pada tahun 2020. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga sama-sama mengalami penurunan.

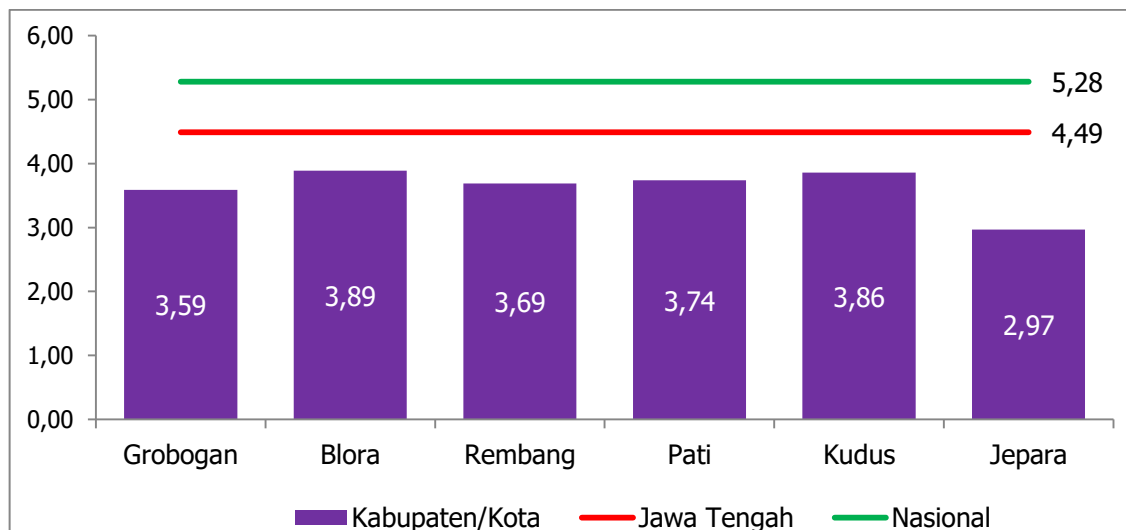
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Dibandingkan kabupaten sekitar, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan bisa dilihat pada gambar berikut ini.

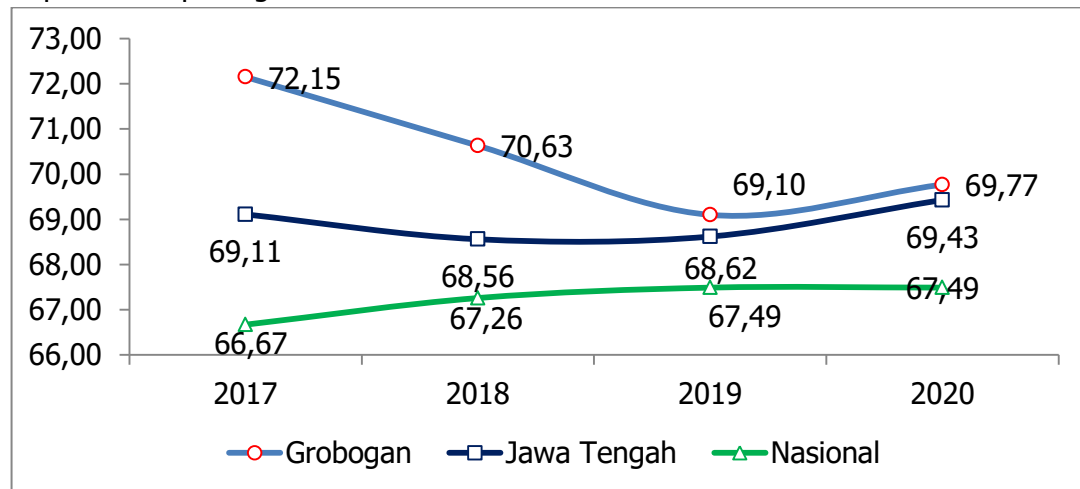


Gambar 2.11 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan dan Daerah Sekitar Tahun 2020

Perkembangan TPAK Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2020 menunjukkan penurunan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 72,15% menurun menjadi sebesar 69,77%. Kondisi tersebut berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Selengkapnya



dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

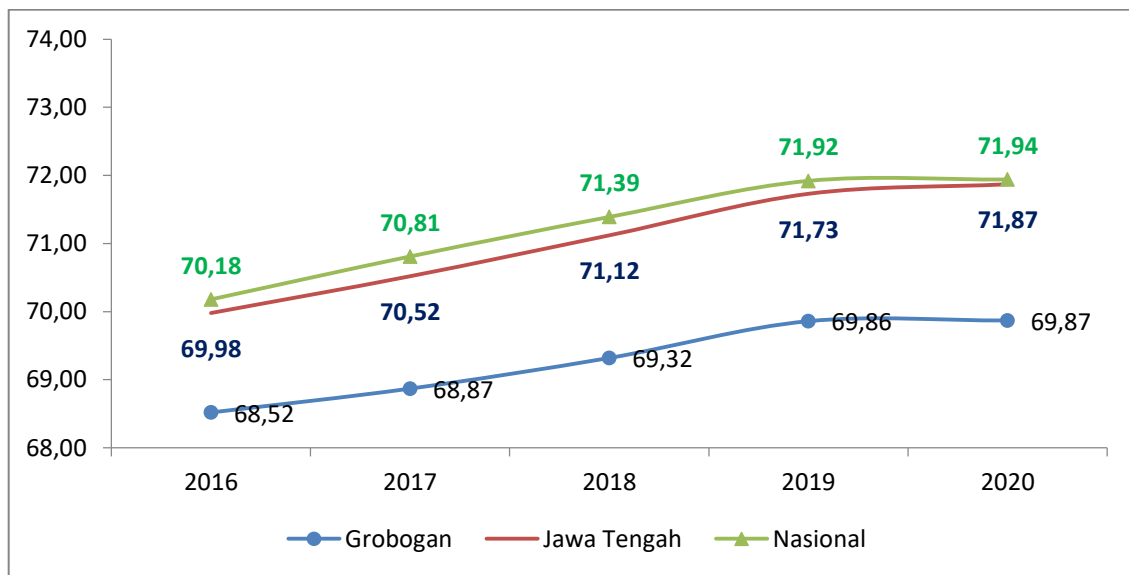
Gambar 2.12 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017-2020 (%)

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.

Perkembangan IPM Kabupaten Grobogan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 68,52 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 69,87. Kondisi IPM Kabupaten Grobogan selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 relevan terhadap perkembangan IPM Provinsi Jawa Tengah dan IPM Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

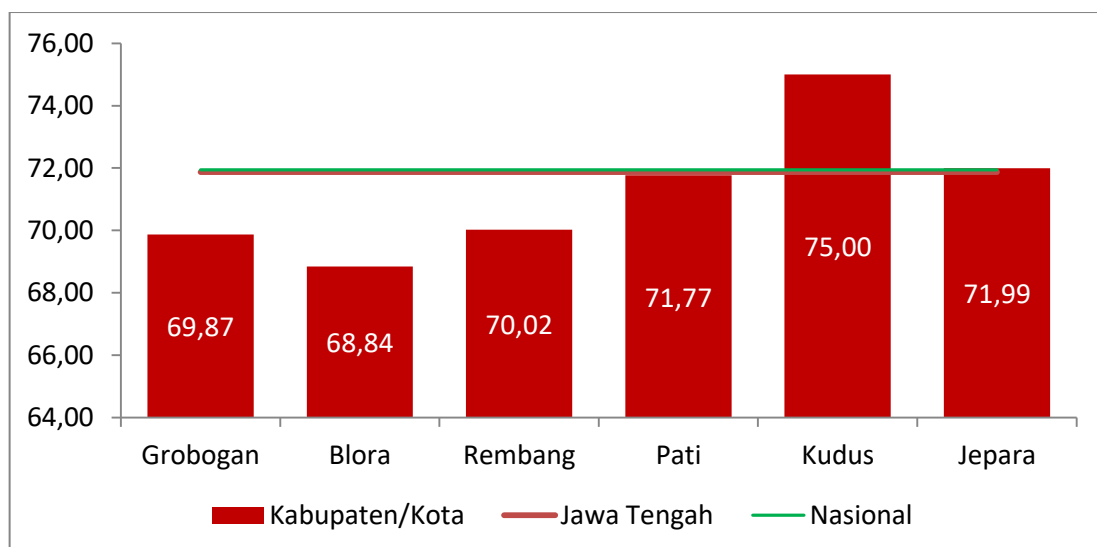
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Sumber: BPSJawa Tengah, 2021

Gambar 2.13 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

IPM Kabupaten Grobogan Tahun 2020 terendah kedua setelah Kabupaten Blora di bandingkan dengan Kabupaten lain se-Eks Karesidenan Pati. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia baik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih tertinggal dari kabupaten/kota lainnya. Perbandingan IPM kabupaten Grobogan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.14 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Grobogan dan Daerah Sekitar Tahun 2020

Sementara itu, kondisi komponen pembentuk IPM Kabupaten Grobogan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021

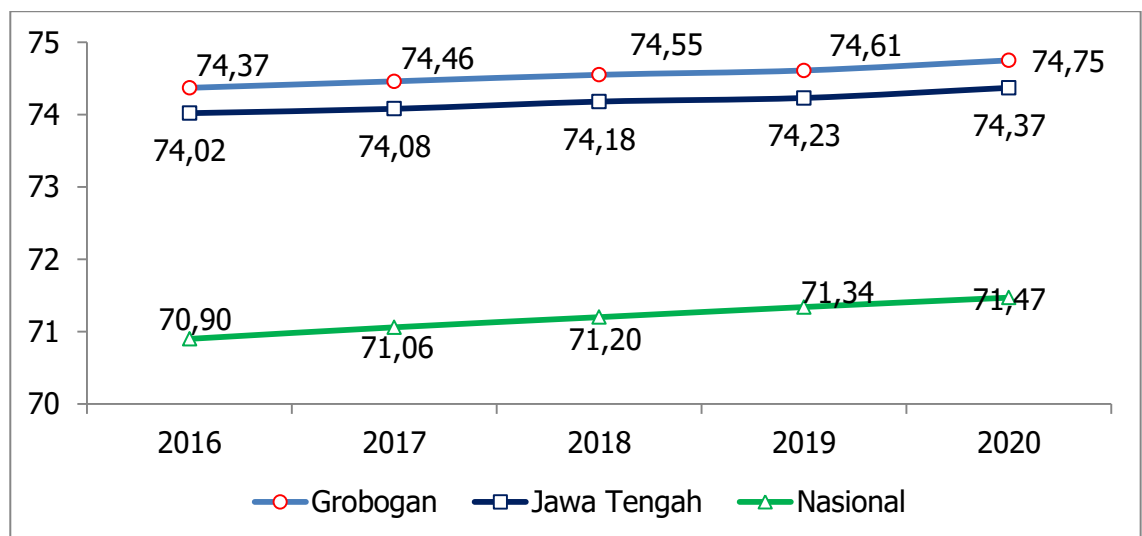


terdiri dari Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita sebagai berikut:

1) Umur Harapan Hidup (UHH)

Indikator umur harapan hidup merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan umur harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan.

Perkembangan UHH Kabupaten Grobogan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 74,37 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 74,75 tahun. Kondisi AHH Kabupaten Grobogan sejalan dengan perkembangan UHH Provinsi Jawa Tengah dan UHH Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



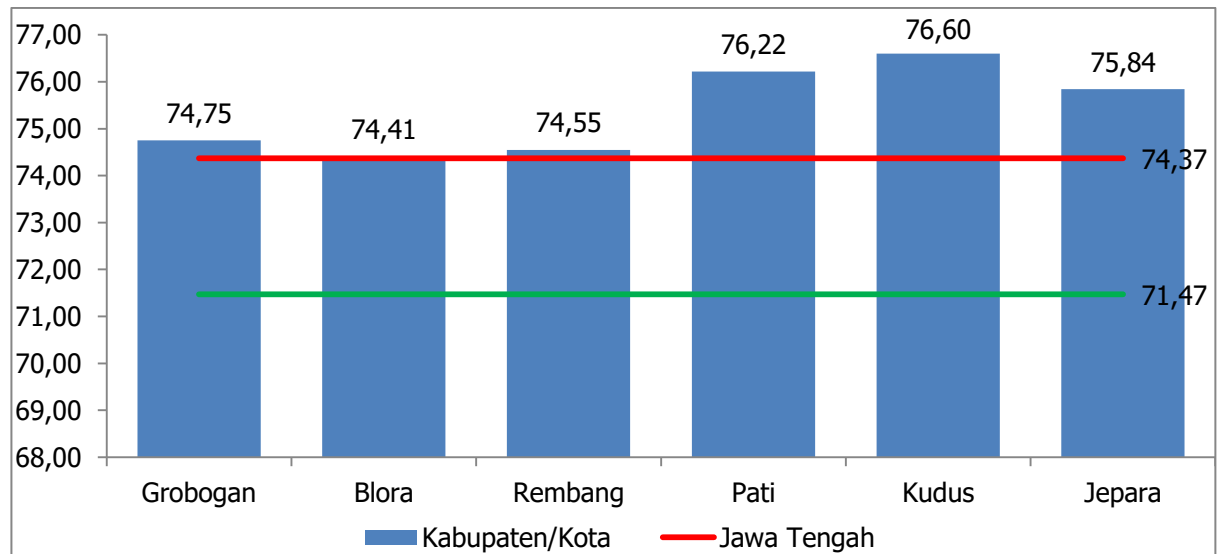
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.15 Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)

Posisi relatif UHH Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 74,75 tahun berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (74,37 tahun) dan Nasional (71,47 tahun), serta menempati posisi ketiga terendah dibandingkan



dengan Kabupaten sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

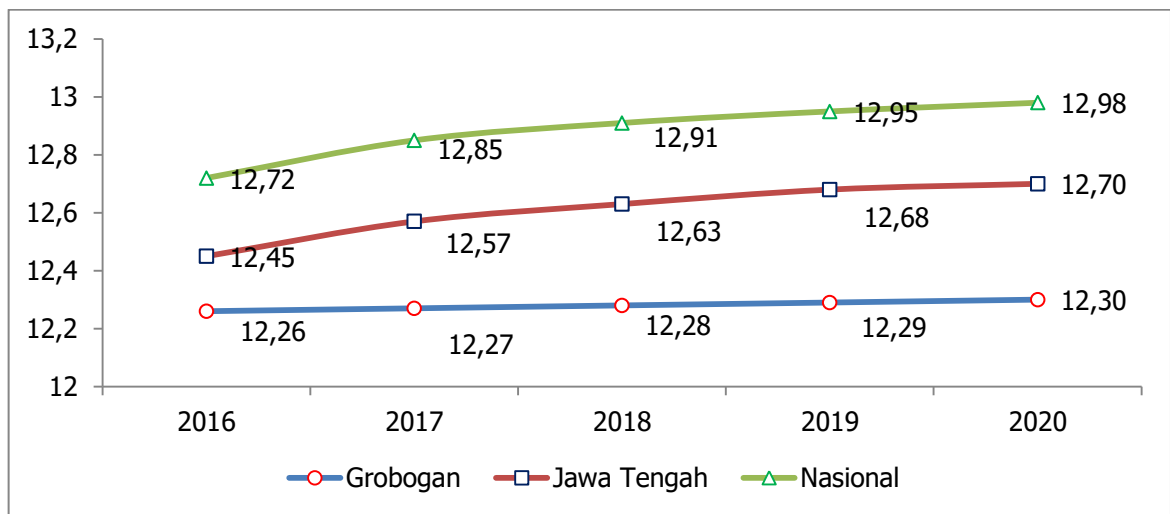
Gambar 2.16 Posisi Relatif Umur Harapan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (tahun)

2) Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Dalam penghitungan IPM, dimensi pengetahuan dibentuk dari dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Cakupan dalam menghitung harapan lama sekolah adalah pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas, sementara cakupan penduduk untuk menghitung rata-rata lama sekolah yaitu dari usia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas. Perlu diketahui, indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

Perkembangan HLS Kabupaten Grobogan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat Gambar berikut.

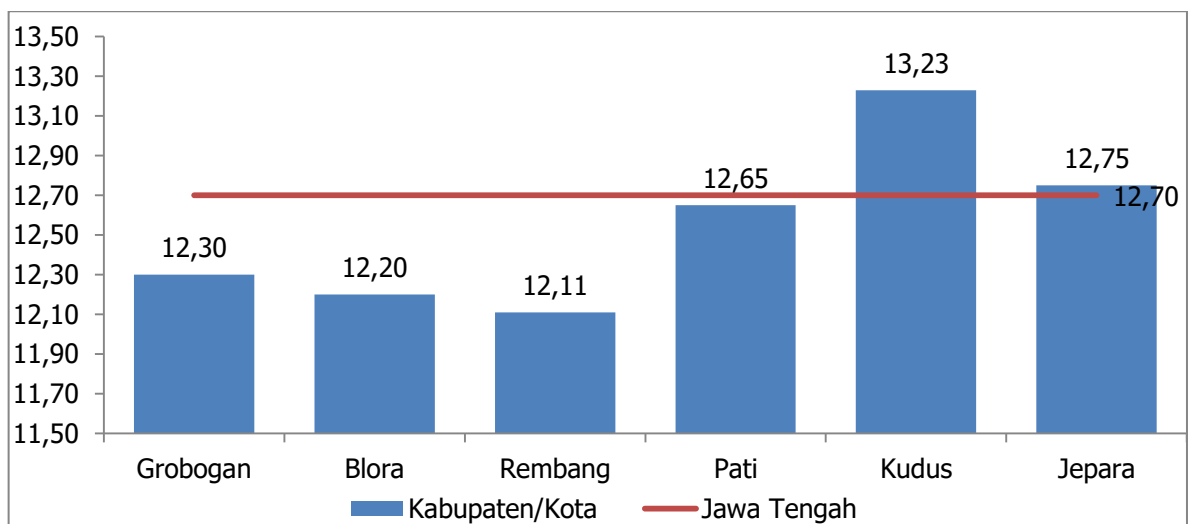
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.17 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)

Posisi relatif HLS Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 12,30 tahun berada di bawah Provinsi Jawa Tengah (12,70 tahun) serta menempati posisi ke empat dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS, 2021

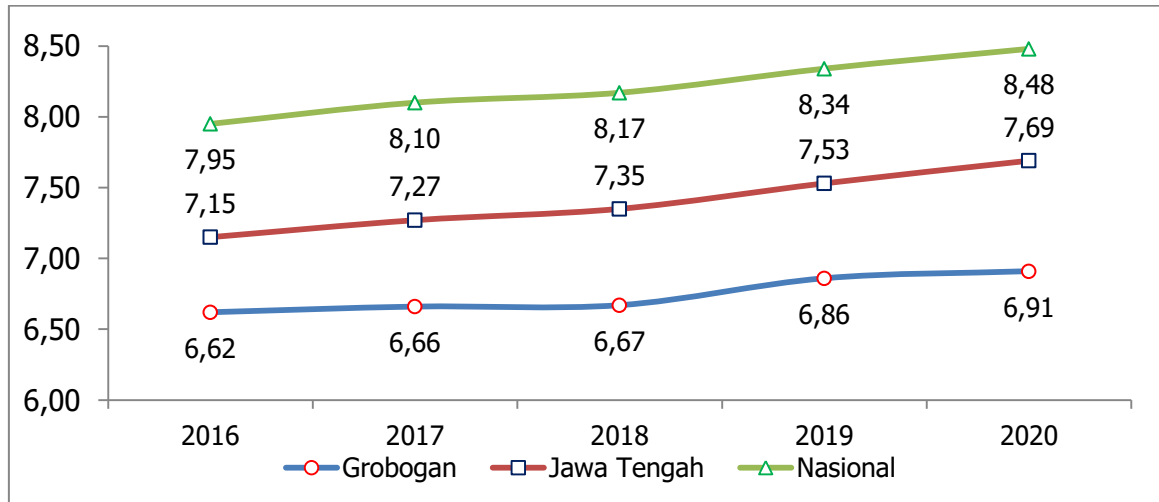
Gambar 2.18 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (tahun)

Perkembangan RLS Kabupaten Grobogan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, yaitu tahun 2016 sebesar 6,62 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 6,91 tahun. Kondisi RLS Kabupaten

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



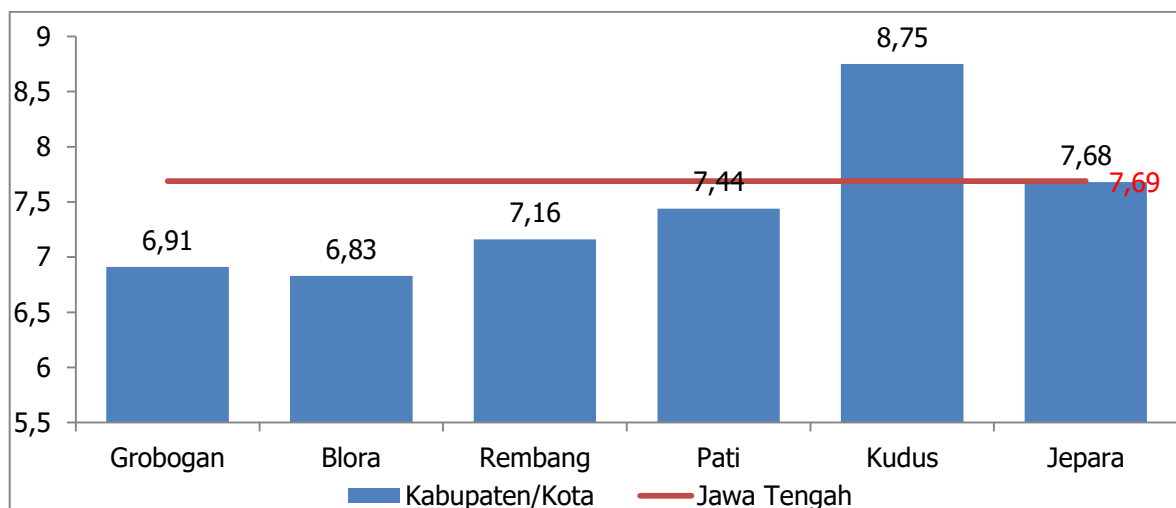
Grobogan relevan dengan perkembangan RLS Provinsi Jawa Tengah dan RLS Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.19 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)

Posisi relatif RLS Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 6,91 tahun berada di bawah Provinsi Jawa Tengah (7,69 tahun) serta berada menempati posisi terendah kedua setelah kabupaten Blora Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2021

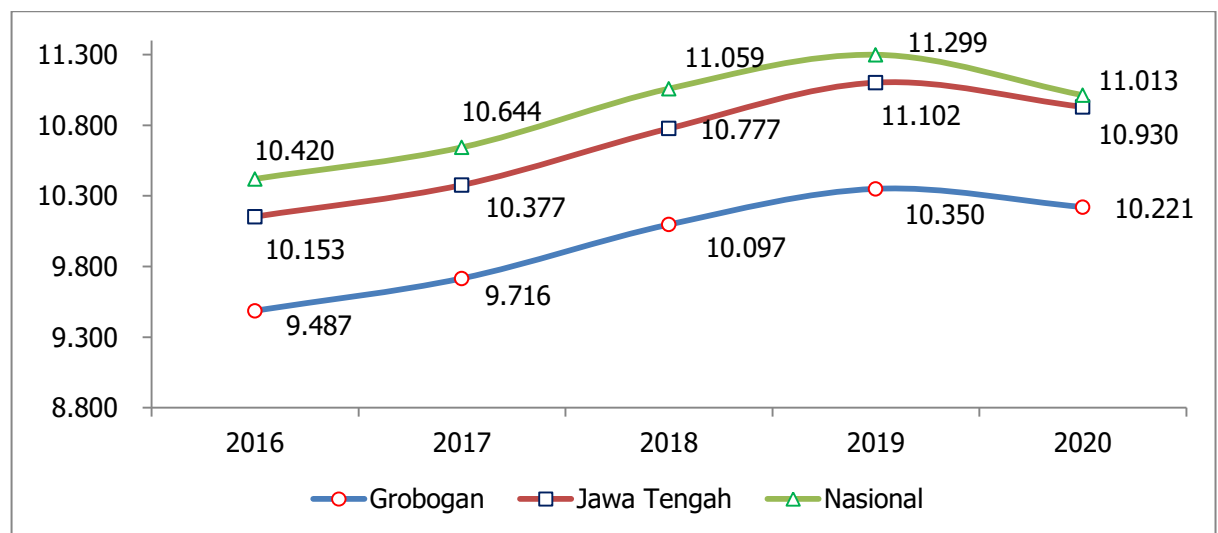
Gambar 2.20 Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (tahun)

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



3) Pengeluaran per Kapita

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Grobogan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 juga terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp 9.487 ribu dan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp10.350 ribu, namun menurun di tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19 yaitu hanya sebesar Rp10.221 ribu. Secara rinci pengeluaran perkapita Kabupaten Grobogan bisa dilihat pada gambar di bawah ini :

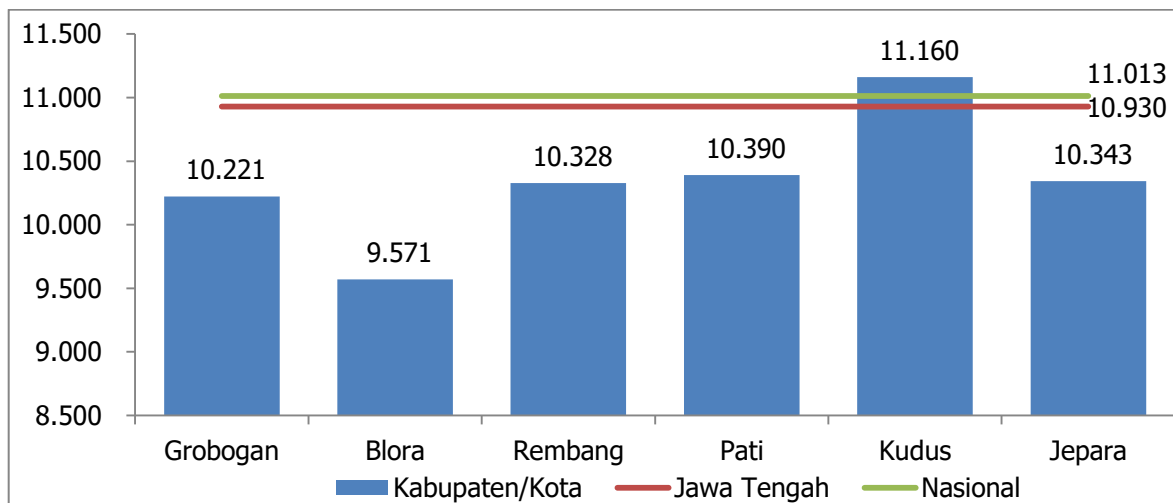


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.21 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (ribu rupiah)

Posisi relatif pendapatan per kapita Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar Rp10.221 ribu berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (Rp10.930 ribu) dan Nasional (Rp11.013 ribu). Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.22 Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (ribu rupiah)

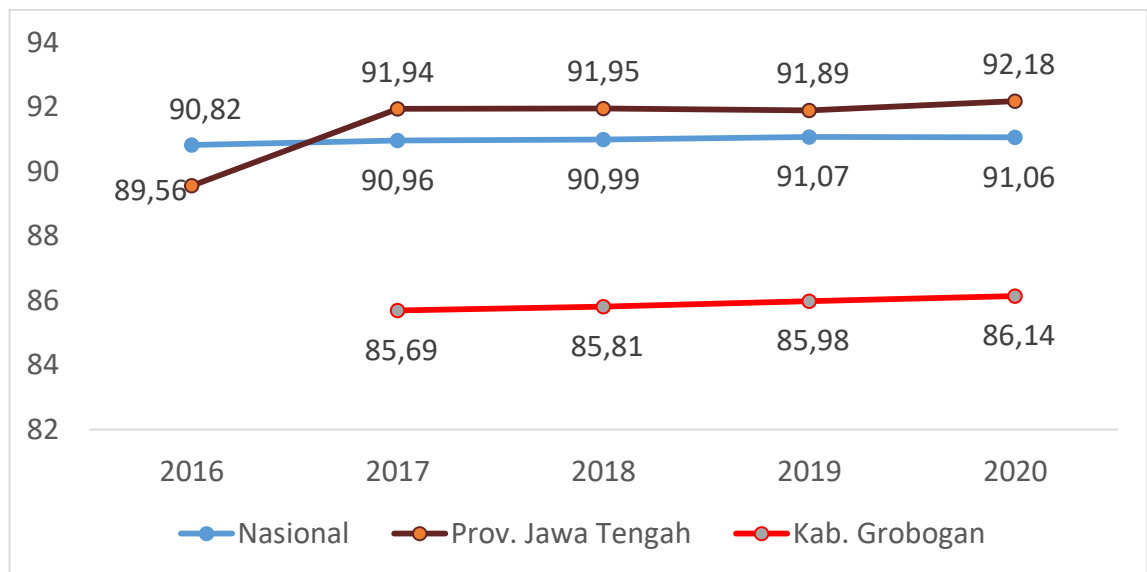
6. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiakan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan.

IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.

Perkembangan IPG Kabupaten Grobogan dari tahun 2017 hingga tahun 2020 cenderung meningkat yaitu dari 85,69 pada tahun 2017 menjadi 86,14 pada tahun 2020. Kondisi ini juga terjadi pada perkembangan IPG Provinsi Jawa Tengah dan IPG Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

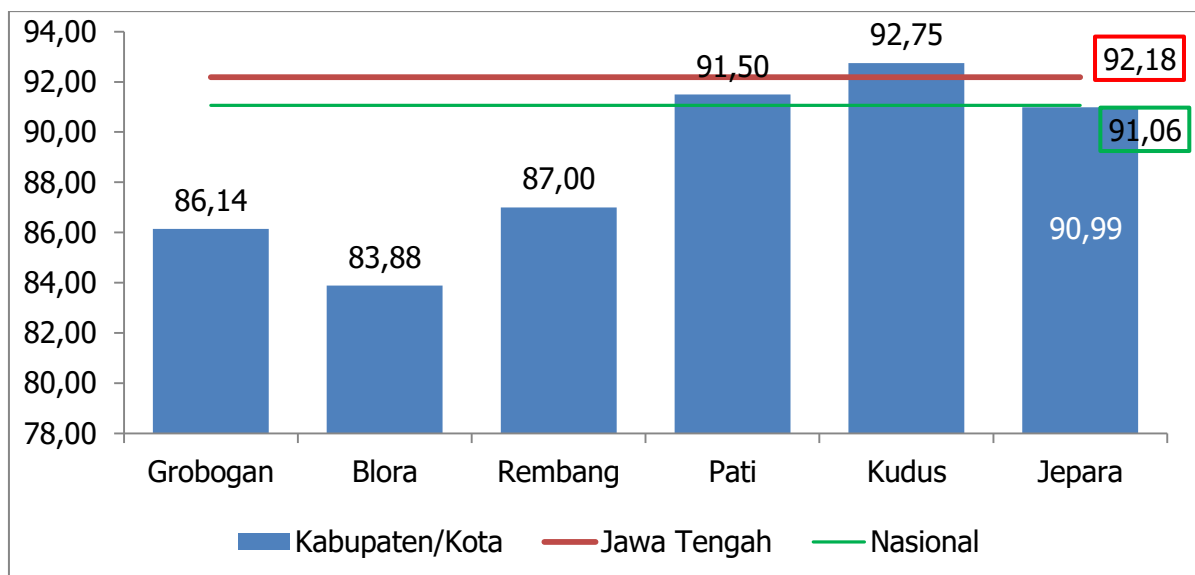
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.23 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Posisi relatif IPG Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 86,14 berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (92,18) dan Nasional (91,07) dan menempati posisi terendah dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.24 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan Tahun 2020

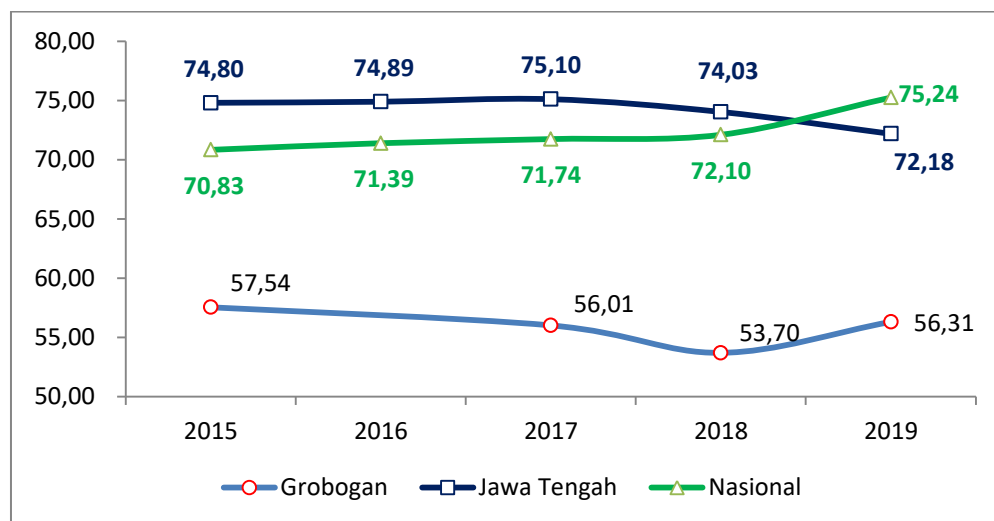


7. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan GEM sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut.

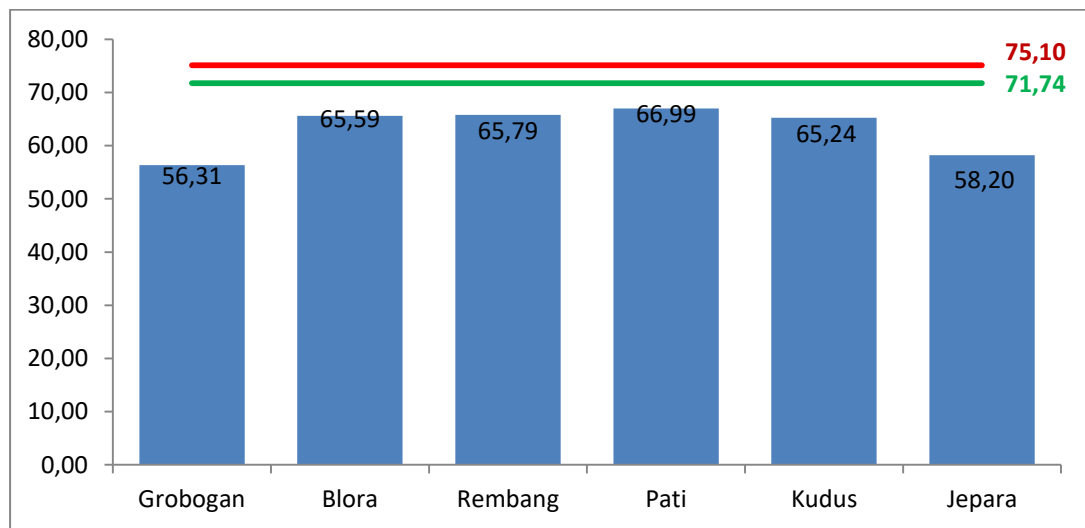
Perkembangan IDG pada tahun 2015 hingga tahun 2019 terus mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 57,54 turun menjadi sebesar 56,31 pada tahun 2019. Kondisi ini tidak relevan terhadap perkembangan IDG Provinsi Jawa Tengah dan IDG Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.25 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Capaian IDG Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 sebesar 56,31 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 75,10 dan Nasional sebesar 71,74 serta menempati posisi terendah dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.26 Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Grobogan tahun 2019

2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Urusan

Pencapaian kinerja masing-masing urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan diuraikan sebagai berikut.

1. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan berada dibawah koordinasi Dinas Pendidikan, memiliki tujuan membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Sasaran urusan pendidikan yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan dan meningkatnya kualitas pendidikan dan manajemen pelayanan pendidikan. Terdapat 6 indikator sasaran urusan pendidikan yaitu Rata-Rata lama Sekolah; Angka Harapan lama sekolah; Angka kelulusan SD/MI; Angka kelulusan SMP/MTS; Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV; dan Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV.

Urusan pendidikan semula terdiri dari 6 program dan 31 indikator, namun dalam perkembangannya program pendidikan menengah berubah menjadi kewenangan pemerintah provinsi sehingga program dan seluruh indikatornya tidak dilakukan penghitungan lagi. Untuk indikator lainnya yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Grobogan, dibandingkan dengan target tahun

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021





2020 terdapat 10 indikator telah mencapai target yaitu realisasi capaian hingga tahun 2020 mencapai 100% atau lebih; 12 indikator yang tidak mencapai target tahun 2020 yaitu realisasi capaian hingga tahun 2020 belum mencapai 100% dan 3 indikator yang tidak tersedia datanya sehingga tidak bisa diukur.

Indikator yang tidak tersedia datanya yaitu Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI, Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMP/MTs. Hal ini dikarenakan pada masa pandemi Covid-19 ujian nasional di tiadakan, dan indikator Persentase penduduk tidak sekolah/tidak lulus mengikuti pendidikan Paket A/B/C belum ada realisasi data hingga tahun 2020 sehingga belum bisa di hitung persentase capaiannya.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, terdapat 10 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD yaitu realisasi capaian hingga tahun 2020 telah mencapai 100% atau lebih ; 7 indikator yang akan mencapai target akhir RPJM, 5 indikator masih berstatus memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD, dan 3 indikator belum diketahui hasilnya karena tidak tersedia data. Indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD yaitu Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs, Ruang kelas SD/MI kondisi baik, Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik, dan Rasio guru/murid SMP. Sedangkan indikator yang belum bisa di hitung capaian akhirnya karena belum tersedia data yaitu Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI, Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMP/MTs dan Persentase penduduk tidak sekolah/tidak lulus mengikuti pendidikan Paket A/B/C. Secara lebih rinci capaian indikator program urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Pendidikan

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Pendidikan											
Program PAUD											
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	61,51	61,71	61,75	61,79	64,88	85,74	138,85		138,76	
Program pendidikan Dasar 9 Tahun											

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB	%	106,65	106,79	106,83	106,85	107,79	93,79	87,80	↓	87,78	▶
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B/SMPLB	%	100,03	100,17	100,21	100,24	102,27	94,11	93,91	↓	93,88	▶
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	%	97,69	97,79	97,81	97,83	91,29	87,41	89,37	↓	89,35	▶
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B/SMPLB	%	87,06	87,18	87,21	87,23	72,26	69,85	80,09	↓	80,08	▶
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,03	0,02	0,01	0	0,13	0,41	-39,00	↓		▼
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,01	0,01	0,01	0	0,15	1,30	-129,0	↓		▼
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	■	100	●
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	99,23	100	100	■	100	●
Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI	%	70,05	70,18	70,21	7,23	Tdk ada UN	Tdk ada UN				
Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMP/MTs	%	50,39	50,89	60,01	6,05	Tdk ada UN	Tdk ada UN				
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	97,83	97,95	97,98	98,01	92,42	76,47	78,05	↓	78,02	▶
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	72,78	72,99	73,05	73,08	93,03	94,49	129,35	■	129,30	●
Ruang kelas SD/MI kondisi baik	%	55,69	56,54	56,65	56,74	50,93	28,48	50,27	↓	50,19	▼
Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	%	91,42	91,53	91,55	91,57	34,93	29,69	32,43	↓	32,42	▼
Rasio guru/murid	%										
SD		22,74	22,86	22,89	22,91	20,94	20,52	89,65	↓	89,57	▶
SMP		29,74	29,84	29,87	29,89	18,18	18,09	60,56	↓	60,52	▼
Program Pendidikan Non Formal											
Penduduk usia >15 tahun melek huruf	%	91,87	91,95	91,98	91,99	97,24	97,32	105,81	■	105,79	●
Persentase penduduk tidak sekolah/tidak lulus mengikuti pendidikan Paket A/B/C	%	5,22	5,38	5,43	5,49						

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan											
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	94,34	94,43	94,45	94,48	95,63	94,26	99,80		99,76	
Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	52,58	52,61	52,65	52,69	65,38	60,30	114,53		114,44	
Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	87,5	87,66	87,69	87,72	95,32	93,49	106,61		106,58	
Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	92,95	93,05	93,09	93,13	96,61	96,13	103,27		103,22	
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan											
Prosentase Sekolah melaksanakan MBS dengan baik	%	98,51	99,49	99,75	100	100	100	100,25		100	
Persentase PAUD terakreditasi	%	5,08	5,22	5,25	5,31	0	29,78	567,24		560,83	

Keterangan:



Target 2020 Terpenuhi



Target 2020 Tidak Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Telah Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Akan Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras

2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan memiliki 13 program dengan 63 indikator program dan 5 indikator makro. Dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 26 indikator yang telah mencapai target tahun 2020, 38 indikator tidak mampu mencapai target, dan 3 indikator tidak diketahui capaiannya. Indikator yang tidak diketahui target capaiannya sampai tahun 2020 yaitu Persentase penduduk yang memiliki Jaminan pemeliharaan Kesehatan; Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; dan Pelayanan kesehatan balita.

Indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup; Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran Hidup; Persentase balita gizi buruk; Angka Kematian Ibu; Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan; Rasio posyandu per



satuan balita; Prevalensi balita gizi kurang; Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S); Cakupan pelayanan anak balita; Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif; Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin; Cakupan RT mengkonsumsi garam beryodium; Persentase Balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A; Persentase Ibu hamil mendapat 90 tablet besi; Persentase BBLR; Cakupan Rumah Sehat; Cakupan penggunaan air bersih; Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA; Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate); Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus; Rasio dokter per satuan penduduk; Persentase tenaga kesehatan mempunyai izin; Jumlah RS tipe C yang dibangun; Cakupan puskesmas; Cakupan pembantu puskesmas; Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai; Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk; Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; Cakupan kunjungan Ibu hamil K4; Cakupan pelayanan nifas; Pelayanan kesehatan pada usia produktif; Persentase penduduk yang mengetahui program JKN; TOI (turn Over Interval); BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur); NDR (NetDeath Rate); GDR (Gross Death Rate); Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD; BOR (Bed Occupancy Ration); dan AVLOS (Average Leght of Stay = Rata- rata lamanya pasien dirawat).

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 22 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD; 25 indikator yang akan mencapai target akhir RPJMD, 17 indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD dan 3 indikator yang belum diketahui data realisasi hingga tahun 2020. Indikator yang hingga tahun 2002 masih memerlukan upaya keras yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup; Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran Hidup; Persentase balita gizi buruk; Rasio posyandu per satuan balita; Prevalensi balita gizi kurang; Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus; Jumlah RS tipe C yang dibangun; Cakupan pembantu puskesmas; Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk; Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; Pelayanan kesehatan pada usia produktif; TOI (turn





















Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Over Interval); NDR (NetDeath Rate); GDR (Gross Death Rate); dan Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD.

Secara lebih rinci capaian indikator program urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Kesehatan

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Kesehatan											
Indikator Makro											
Angka usia harapan hidup	Tahun	-	74,36	73	73,1	74,44	74,75	102,40		100,42	
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1.000 KH	17,44	10,5	10	9,5	13,17	13,76	62,4		55,16	
Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran Hidup	per 1.000 KH	18,99	10,5	10	9,5	14,88	15,69	43,1		34,84	
Persentase balita gizi buruk	%	0,05	0,02	0,01	0,01	0,01	0,03	-100		(100,00)	
Angka Kematian Ibu	kasus	33	27	26	25	36	31	80,77		76,00	
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan											
Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	100	100	100	100	100	97,46	97,46		97,46	
Program Upaya Kesehatan Masyarakat											
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	100		100,00	
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin yang sakit	%	100	100	100	100	100	100	100		100,00	
Program Pengawasan Obat Dan Makanan											
Jumlah kasus keracunan makanan	Kasus	28	< 18	< 15	< 12	2	0	100			
Persentase Penggunaan obat rasional di Puskesmas	%	60	75	80	85	87,72	81,34	101,68		95,69	
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat											

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	88,03	95	95	95	81,19	95,14	100,15		100,15	
Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100,00		100,00	
Rasio posyandu per satuan balita	per 100 Balita	1,87	3,5	4	4,5	18,79	1,48	37,00		32,89	
Persentase Posyandu purnama dan mandiri	%	49,17	56	58	60	44,67	58,74	101,28		97,90	
Program Perbaikan Gizi Masyarakat											
Prevalensi balita gizi kurang	%	7,6	5,3	5,2	5,1	0,8	0,83	15,96		16,27	
Persentase Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100,00		100,00	
Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	%	82,81	100	100	100	85,88	77,72	77,72		77,72	
Cakupan pelayanan anak balita	%	80,07	95	95	95	94,46	83	87,37		87,37	
Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	72,89	76	77	78	10,38	67,66	87,87		86,74	
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	100	100	100,00		100,00	
Cakupan RT mengkonsumsi garam beryodium	%	67,7	90	90	90	74	77,92	86,58		86,58	
Persentase Balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	%	90,35	98	99	100	87,03	98,5	99,49		98,50	
Persentase Ibu hamil mendapat 90 tablet besi	%	95,5	98	99	100	88,9	89,03	89,93		89,03	
Persentase Balita dengan Kekurangan Energi dan Protein (KEP)	%	0,76	0,4	0,3	0,3	0,62	0,86	286,67		286,67	
Persentase BBLR	%	3,78	< 4	< 4	4	5,47	5,39				
Program pengembangan Lingkungan Sehat											
Cakupan Rumah Sehat	%	79,59	80	85	90	62,97	84,14	98,99		93,49	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Cakupan penggunaan air bersih		65	78	80	80	76,38	76,38	95,48		95,48	
Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM	%	100	100	100	100	100	100	100,00		100,00	
Program Pencegahan Dan penanggulangan penyakit Menular											
Persentase anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap	%	100	100	100	100	100	100	100,00		100,00	
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	29,3	76	78	80		32	41,03		40,00	
Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (<i>success rate</i>)	%	95,74	98	99	100	92	94,69	95,65		94,69	
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun	%	0,005	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,31	100		100	
Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral	%	53	85	90	95	100	100	111,11		105,26	
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	80	100	100	100	100	7,76	7,76		7,76	
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	%	80	100	100	100	100	61,8	61,80		61,80	
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan											
Cakupan Puskesmas Terakreditasi	%	3	30	30	30	30	100	333,33		333,33	
Persentase Puskesmas yang telah memiliki Standar Pelayanan Publik (SPP)	%	80	100	100	100	100	100	100,00		100,00	
Rasio dokter per satuan penduduk	per 100.000 pddk	15,76	19	20	21	16,11	16,03	80,15		76,33	
Persentase tenaga kesehatan mempunyai izin	%	92,5	100	100	100	66,31	99,91	99,91		99,91	
Persentase Puskesmas non rawat inap dan rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar	%	80	95	100	100	100	100	100,00		100,00	
Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	100,00		100,00	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Jumlah RS tipe C yang dibangun	Unit	0	0	1	2	0	2 Type D	0			
Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.											
Cakupan puskesmas		1,6	1,9	2	2	1,58	1,58	79		79,00	
Cakupan pembantu puskesmas		0.25	0,5	0,6	0,7	0,28	0,28	46,67		40,00	
Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	%	70	95	100,00	100	91,47	91,47	91,47		91,47	
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per 1.000 pddk	0.23	0,28	0,29	0,3	0,01	0,02	6,90		6,67	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia											
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	50,78	75	80	85	100	35,35	44,19		41,59	
Program peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak											
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	99,95	100	100	100	100	100	100,00		100,00	
Cakupan kunjungan bayi	%	97,82	95	95	95	98,76	96,42	101,49		101,49	
Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	%	97	98	99	100	99,7	99,81	100,82		99,81	
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	93,78	100	100	100	87	92,92	92,92		92,92	
Cakupan pelayanan nifas	%	99,4	100	100	100	99,31	99,25	99,25		99,25	
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	93,44	100	100	100	100	100	100,00		100,00	
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	79,28	100	100	100	100	100	100,00		100,00	
Persentase BBLR yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan	%	90	100	100	100	100	100	100,00		100,00	
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	60	90	100	100	100	5,78	5,78		5,78	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Program Jaminan Kesehatan Nasional											
Persentase penduduk yang mengetahui program JKN	%	54,29	100	100	100	100	72,41	72,41		72,41	
Program Bantuan Operasional Puskesmas											
Persentase Puskesmas yang mempublikasikan laporan pemanfaatan BOK di Papan Pengumuman Puskesmas atau Kantor Kecamatan	%	80	100	100	100	100	100	100,00		100,00	
Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.											
TOI (turn Over Interval)	Hari	1	1	1	1	3	4	25		41,67	
BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)	Kali	72	75	75	75	56	47	62,67		85,07	
NDR (NetDeath Rate)	‰	22	10	10	10	31	39	25,64		32,68	
GDR (Gross Death Rate)	Kematian	41	25	25	25	53	71	35,21		53,4	
Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	-	80	80	80	80	77,48	79,64	99,55		46,82	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD RSUD)											
BOR (Bed Occupancy Ration)	%	0,713	0,85	0,85	0,85	0,5532	51,07	60,08		72	
AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	Hari	5	4	4	4	4	5	80		95,24	
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan											
Persentase penduduk yang memiliki Jaminan pemeliharaan Kesehatan	%	49,77	65	70	75	68,34					
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita											
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	-	100	100	100	100					

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Pelayanan kesehatan balita	%	80,07	95	100	100	94,4					

Keterangan:



Target 2020 Terpenuhi



Target 2020 Tidak Terpenuhi



Target Akhir RPJMD
Telah Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Akan
Terpenuhi



Target Akhir
RPJMD Perlu
Upaya Keras

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang terdiri dari 18 program dan 29 indikator. Terdapat beberapa program terkait dengan Pekerjaan umum dan penataan ruang yang tidak menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yakni Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah, Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh merupakan tugas dari Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat. Program Pengaturan Jasa Konstruksi merupakan tugas dari Seketariat Daerah, dan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan tugas dari BPBD. Selain itu terdapat pula indikator program yang menjadi tugas dari dinas lain yakni indikator Persentase jumlah IMB yang diterbitkan merupakan tugas dari DPMPTSP dan indikator Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB merupakan tugas dari DLH

Terdapat 14 indikator yang telah mampu mencapai target tahun 2020 yaitu persentase capaian pada tahun 2020 mencapai 100% atau lebih, 8 indikator yang tidak mencapai target tahun 2020, dan 9 indikator yang belum bisa di hitung persentase capaiannya karena belum tersedia data hingga tahun 2020. Delapan indikator yang tidak tercapai hingga tahun 2020 yaitu Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik; Persentase penduduk yang telayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun; Cakupan pelayanan Sistem Drainase; Persentase turap/talud/bronjong di wilayah jalan penghubung kewenangan kabupaten terbangun; Durasi banjir untuk lokasi Lokasi banjir per hari; Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang; Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan; Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan. Dan indikator yang belum di ketahui realisasi capaian hingga tahun 2020 yaitu Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik; Persentase penduduk yang telayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun; Cakupan pelayanan Sistem Drainase; Persentase turap/talud/bronjong di wilayah jalan penghubung kewenangan kabupaten terbangun; Durasi banjir untuk lokasi Lokasi banjir desa/kel; Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang; Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan; Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 13 indikator yang telah berhasil mencapai target akhir RPJMD, 7 indikator yang akan mencapai target akhir RPJMD; 2 indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD, dan 9 indikator yang belum di ketahui presentase capaian hingga akhir RPJM karena belum tersedia data tahun 2020. Indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD meliputi indikator Panjang Saluran Drainase/Gorong- gorong terbangun dan Durasi banjir untuk lokasi Lokasi banjir per hari. Secara lebih rinci capaian indikator program untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
Program pembangunan Jalan Dan Jembatan											
Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	40,69	67,88	76,08	84,51	76,27	78,91	102,32		84,01	
Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah	%	100	100	100	100	100	100	100		100	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
kabupaten/ kota											
Tingkat kualitas jalan lingkungan (jalan tanah menjadi perkerasan paving blok)	%	40	60	65	70	70		0		-	
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong											
Persentase penduduk yang telayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun.	% penduduk	34	50	54	58	53	60	111,11		103,45	
	% genangan	19,10	13,1	11,6	10,10	12	10	86,21		99,01	
Cakupan drainase lingkungan dalam kondisi baik	%	58	62	63	64	65,117	65,4	103,81		102,19	
Cakupan pelayanan Sistem Drainase	%	40	50	52,5	55	48	50	95,24		90,91	
Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong terbangun	KM	1,20	3,06	3,06	17,85	9,544	10,744	351,11		60,19	
Program Pembangunan turap/talud/ bronjong											
Persentase turap/talud/bronjong di wilayah jalan penghubung kewenangan kabupaten terbangun	%	42,79	58,95	54,59	50,22	54,3	54,35	99,56		108,22	
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan											
Persentase jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	%	14,68	19,3	20,68	20,15	24,4					
Program Pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan											
Tingkat ketersediaan data jalan dan jembatan yang up to date	%	100	100	100	100	100	100	100		100	
Program peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaan											

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan per tahun	%	100	100	100	100	100	100	100		100	
Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya.											
Rasio Jaringan Irigasi	Km/Ha	0,017	0,017	0,017	0,017	0,018	0,018	105,88		105,88	
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	82	84,1	84,5	85	84,45	84,56	100,07		99,48	
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	%	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4	100		100	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah											
Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	64			85						
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku											
Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman	%	75			85,17						
Program pengendalian Banjir											
Persentase wilayah bebas banjir	%	65	76	78,00	80	85	85	108,97		106,25	
Durasi banjir untuk lokasi Lokasi banjir	hr	15	9	8	7	4	4	50,00		57,14	
	Desa/Kel	10	8	7	7						
Program Pengaturan Jasa Konstruksi											



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	%	80	100	100,00	100	100	100	100		100	
Program Perencanaan Tata Ruang											
Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	5	100	100	100	75	100	100		100	
Program Pemanfaatan Ruang											
Persentase jumlah IMB yang diterbitkan	%	50	60	62,50	65						
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	25	45	50	55						
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	90,12	94,92	96,12		91,5	91,5	95,19			
Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	14	18	19	20	17	17	89,47		85,00	
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang											
Persentase Kawasan memiliki RTBL	%	0	100	100	100	50	100	100		100	
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya.											
Tersedianya air embung untuk irigasi - pertanian	m3	110.676	130.676	135.676	140.676	252.000	252.000	185,74		179,14	
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh											
Persentase Luas Bangunan / Gedung yang dibangun pada Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	%	30	40	42,50	45						
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau											

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	14	18	19,00	20	17	17	89,47		85,00	
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi											
Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	20			70						

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan Tercapai



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras

4. Urusan Perumahan dan Permukiman

Urusan Perumahan dan Permukiman memiliki 3 program dengan 6 indikator program. Dibandingkan dengan target tahun 2020, terdapat 1 indikator yang telah tercapai dan 5 indikator yang tidak tercapai. Indikator yang tidak mencapai target tahun 2020 yaitu Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum; Persentase Berkurangnya Permukiman Kumuh di Perkotaan; Cakupan Rumah Layak Huni Yang terjangkau; dan Persentase ketersediaan PJU.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, terdapat 3 indikator yang akan tercapai dan 3 indikator yang memerlukan upaya keras. Indikator yang masih perlu upaya keras yaitu Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum; Cakupan Rumah Layak Huni Yang terjangkau; dan Persentase ketersediaan PJU. Secara lebih rinci capaian indikator program urusan perumahan dan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Perumahan dan Permukiman

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	% Capaian Tahun 2020	% Capaian Target Akhir RPJMD
-----------	--------	---------------------	----------------	---------------------	-------------------	----------------------	------------------------------

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman											
Program pengembangan Perumahan											
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum	%	58	60	60,5	70	12,5	16,67	27,55		23,81	
Program Lingkungan Sehat perumahan											
Persentase Berkurangnya Permukiman Kumuh di Perkotaan	%	0,054	0,018	0,009	0	0,009	0,003	99,98		99,997	
	Ha	77,32	17,32	7,32		22,69	19,04	95,4		95,40	
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	58	60	60,5	70	62,20	62,54	103,372		89,34	
Cakupan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	%	25	40	45	50	16,57	16,66	37,02		33,32	
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan											
Persentase ketersediaan PJU	%	60	88	94	100	12,64	13,26	14,10		13,26	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan
Tercapai



Target Akhir
RPJMD Perlu
Upaya Keras

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat memiliki 4 program dengan 11 indikator pendukung program. Sampai dengan tahun 2020, terdapat 9 indikator yang telah tercapai yaitu persentase capaian hingga tahun 2020 telah mencapai 100% atau lebih dan 2 indikator yang tidak mencapai target tahun 2020, karena persentasenya masih di bawah 100%. Indikator yang tidak tercapai hingga tahun 2020 yaitu Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten dan Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk.

Jika dilihat dari capaian akhir RPJMD, maka terdapat 8 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD dan 3 indikator yang akan mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang masih on the track yaitu Tingkat penyelesaian pelanggaran

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021













K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten; Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk, dan Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi. Untuk lebih jelasnya capaian indikator kinerja program urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat											
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan											
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	%	61	80	83,00	85	79,17	91,67	110,45		107,85	
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	50	70	75,00	80	66,67	68,33	91,11		85,41	
Program pemeliharaan Ketrantibnas Dan pencegahan tindak Kriminal											
Persentase cakupan patroli petugas Satpol PP	%	67	80	83	85	72,22	88,89	107,10		104,58	
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan											
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	%	1,16	1,31	1,34	1,4	16,67	17	1.268,66		1.214,29	
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	%	62,40	62,4	62,4	62,40	0	60,2	96,47		96,47	
Petugas Perlindungan	%	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,31	3.100,00		3.100,00	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Masyarakat (Linmas) di Kabupaten											
Prosentase rasio petugas Linmas tiap RT di desa/kelurahan	%	0,98	1	1,0	1	100	1,04	104,00		104,00	
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran											
Cakupan pelayanan bencana kebakaran dikabupaten/Kota	%	21,38	39,9	47,02	53,79	57,14	79,11	168,25		147,07	
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK	%	45,5	65	70	75	66,1	83,05	118,64		110,73	
Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	0	70	90	100	70	90,00	100,00		90,00	
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK	%	21,05	42,1	47,36	52,63	66,66	83,31	175,91		158,30	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan Tercapai



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras

6. Urusan Sosial

Urusan sosial yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan memiliki tujuan meningkatkan kualitas penanganan PMKS, dengan sasaran berkurangnya masyarakat yang termasuk dalam kategori PMKS. Indikator sasaran dari urusan sosial adalah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan urusan sosial memiliki 7 program utama yakni program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah sosial (PMKS) lainnya; Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; Program pelayanan dna rehabilitasi kesejahteraan sosial; program pembinaan para penyandang cacat dan trauma; program pembinaan panti asuhan/ panti jompo;

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Program pembinaan eks-penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya); Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial; dan program pembinaan anak terlantar. Dari 7 program tersebut kemudian dijabarkan menjadi 11 indikator pendukung program.

Dilihat dari capaian tahun 2020 terdapat 8 indikator yang tidak mampu mencapai target tahun 2020, dan 3 indikator telah mencapai target tahun 2020. Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 2 indikator yang berstatus telah mencapai target akhir; 6 indikator berstatus akan mencapai target akhir dan 3 indikator perlu upaya keras dalam mencapai target akhir. Indikator yang perlu upaya keras dalam mencapai target akhir tersebut adalah Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial; Persentase Eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%); dan Persentase anak terlantar yang dibina. Secara lebih rinci perkembangan dan persentase capaian indikator program urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Sosial

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Sosial											
Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya											
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	58,45	70,71	74,64	78,57	57,69	60	80,40	↓	76,37	▶
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	%	23,48	40,9	55	72,22	30	55	100	■	76,16	▶

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	23,33	70,58	76,47	87,5	70	76,47	100		87,39	
Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial											
Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tangkal darurat	%	66	80	85	93	50	80	94,1		86,02	
Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	0	70	75	85	50	70	93,3		82,35	
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma											
Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	2,76	5,6	6,53	7,46	19,88	1,05	16,07		14,08	
Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo											
Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	78,12	87,5	92,8	93,75	71	90	96,98		109,09	
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Lembaga	29	32	32	32	32	23	23		65,71	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Program pembinaan Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya)											
Persentase Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)	%	18,42	28,19	32,89	37,59	28	11,61	35,3		56,63	
Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial											
Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	100	100	100	100	100	100	100		200,00	
Program Pembinaan Anak Terlantar											
Persentase anak terlantar yang dibina	%	5	10,02	12	14,8	8,016	-	-			

Keterangan:



Target 2020 Terpenuhi



Target 2020 Tidak Terpenuhi



Target Akhir RPJMD
Telah Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Akan
Terpenuhi



Target Akhir RPJMD
Perlu Upaya Keras

7. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan terdiri dari 3 program dan 14 indikator. Dibandingkan dengan 5 indikator masih belum di ketahui realisasi capaiannya pada tahun 2020 sehingga belum bisa di lihat persentase capaian akhir nya. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 4 indikator yang telah mencapai target akhir RPJM, 4 indikator yang berstatus akan tercapai, 1 indikator berstatus perlu upaya keras dan 4 indikator masih belum di ketahui persentase capaian hingga akhir RPJMD karena masih belum ada realisasi capaian tahun 2020.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Secara lebih rinci capaian kinerja program pada urusan ketenagakerjaan bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Ketenagakerjaan

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Tenaga Kerja											
Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja											
Pencari kerja yang ditempatkan	%	69,48	74,6	75,14	75,38	67,03	21,02	27,97		27,89	
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	44,44	48	50	52	44,72	40,02	80,04		76,96	
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	63	71	73	75	71	73	100,00		97,33	
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	6,67	8	8,5	9	8	8,5	100,00		94,44	
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,22	4,21	4,2	4,19	3,59	4,5	107,14		107,40	
Program peningkatan Kesempatan Kerja											
Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	96,72	96,75	96,76	96,77	69,1	68,6	70,90		70,89	
Rasio penduduk yang bekerja	%	72,29	82	85	87	74,44					
Angka sengketa pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100,00		100,00	
Tingkat pengangguran terbuka	%	4,25	4,21	4,2	4,19	3,59	4,5	107,14		107,40	
Program Perlindungan Dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan											
Keselamatan dan	%	90	100	100	100	95					

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
perlindungan											
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	67					
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	50,5	60	65	66	96	88,28	135,82		126,11	
Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	66,17	60	60	60						
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	49,72									

Keterangan:



Target 2020 Terpenuhi



Target 2020 Tidak Terpenuhi



Target Akhir RPJMD
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan
Tercapai



Target Akhir
RPJMD Perlu
Upaya Keras

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri dari 4 program dan 18 indikator. Dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 5 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 yaitu persentase capaian hingga tahun 2020 telah mencapai 100% atau lebih dan 13 indikator mencapai tidak mencapai target hingga tahun 2020 yaitu persentase capaiannya kurang dari 100%.

Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 5 indikator telah mencapai target akhir RPJMD; 3 indikator berstatus akan mencapai target akhir RPJMD dan 10 indikator memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD meliputi Cakupan ketersediaan lembaga pelayanan kekerasan berbasis gender; Kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif; Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian; Jumlah pernikahan usia anak; Angka Perceraian; Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS;

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Jumlah layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu; Jumlah penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Jumlah layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan Jumlah layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan

.Secara lebih rinci capaian kinerja program pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
Program peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak											
Presentase kelembagaan PUG yang aktif	%	50	70	80	85	60	75	93,75	↓	88,24	▶
Cakupan ketersediaan lembaga pelayanan kekerasan berbasis gender	lembaga	123	177	193	200	2	-	-	↓	-	▼
Kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	kasus	25	32	35	42	6	0	0	↓	-	▼
Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan											
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	46,7	46,79	47,82	47,85	42,3	40,44	84,57	↓	84,51	▶

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	Rupiah	6879150	7710087	7.987.066	8264045	0	-	-	↓	-	▼
Jumlah pernikahan usia anak	Jumlah	3170	2500	2400	2300	57	233	9,7	↓	10,13	▼
Angka Perceraian	Kasus	3225	6670	3650	3635	0		-	↓	-	▼
Lembaga aktif dalam peningkatan kualitas keluarga	lembag a	-	3	3	3	3	3	100	■	100,	●
Persentase forum anak aktif	%	0,42	0,63	0,8	0,7	0,54	1	125	■	142,86	●
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak											
Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	110	135	125	98	42	90	72	↓	91,84	▶
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.	Jumlah	55	55	60	65	28	0	0	↓	-	▼
Jumlah layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Jumlah	22	42	47	52	30	0	0	↓	-	▼
Jumlah penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Jumlah	5	12	14	16	12	0	0	↓	-	▼

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	Jumlah	11	14	14	14	20	38	271,42		271,43	
Jumlah layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah	1	4	4	4	1	0	0		-	
Jumlah layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah	1	6	7	10	6	0	0		-	
Jumlah layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Jumlah	6	12	16	20	42	90	562,5		450,	
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan											
Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	Jumlah	1	2	2	2	1	4	200		200,	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan Tercapai



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras

9. Urusan Pangan

Urusan pangan memiliki satu program utama yakni program peningkatan ketahanan pangan pertanian dan 8 indikator program. Dari kedelapan indikator tersebut jika dibandingkan dengan target tahun 2020 semuanya telah memenuhi target yakni persentase capaian hingga tahun 2020 telah mencapai 100% atau lebih.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD semua indikator berstatus telah mencapai target akhir RPJMD yakni persentase capaian target akhir

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



RPJMD telah mencapai 100% atau lebih. Secara rinci capaian kinerja program urusan ketahanan pangan bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Ketahanan Pangan

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Pangan											
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian											
Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kapita/hari	143	170	175	175	171	176	100,57	<div></div>	100,57	<div></div>
Ketersediaan protein perkapita	gram/kapita/hari	105	110	115	115	108	117	101,74	<div></div>	101,74	<div></div>
Penguatan cadangan pangan	%	85,63	125	130	130	142	146	112,31	<div></div>	112,31	<div></div>
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,	<div></div>	100,	<div></div>
Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	100	100	100	100	100	100	100,	<div></div>	100,00	<div></div>
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	85	87	90	90	86	90,5	100,56	<div></div>	100,56	<div></div>
Pengawasan dan pembinaan kemandirian pangan	%	100	100	100	100	100	100	100,	<div></div>	100,	<div></div>
Penanganan daerah rawan pangan	%	100	100	100	100	100	100	100,	<div></div>	100,	<div></div>

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan Tercapai



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



10. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan hidup memiliki 7 program dan 21 indikator. Dilihat dari perbandingan antara realisasi tahun 2019 dan target tahun 2020 secara keseluruhan indikator memiliki persentase capaian dengan status telah memenuhi target tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 9 indikator yang berstatus telah mencapai target akhir RPJMD yaitu persentase capaian hingga tahun 2020 telah mencapai 100% atau lebih.

Sedangkan jika di bandingkan dengan capain target akhir RPJMD, 10 indikator yang berstatus telah mencapai target, dan 11 indikator beratus akan mencapai target akhir RPJMD. Secara lebih rinci capaian kinerja program RPJMD urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Lingkungan Hidup

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Lingkungan Hidup											
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
Prosentase jumlah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah standart 3 R	%	20	76	90	100	76	90	100	<div></div>	90,00	<div></div>
Persentase pengurangan sampah diperkotaan	%	4,75	20	25	30	20	25	100	<div></div>	83,33	<div></div>
Persentase Pengangkutan sampah	%	30	40	42	44	40	42	100	<div></div>	95,45	<div></div>
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup											
Presentase Pemantauan status mutu air	%	44	77	88	100	77	88	100	<div></div>	88,00	<div></div>
Rasio cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	%	20	50	60	60	50	60	100	<div></div>	100,00	<div></div>
Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	<div></div>	100,00	<div></div>
Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati teknis pencegahan pencemaran air	%	80	90	93	95	90	93	100	<div></div>	97,89	<div></div>

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100		100,00	
kegiatan penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100		100,00	
Pencapaian predikat kota bersih / penghargaan Adipura	%	-	100	100	100	100	100	100		100,00	
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam											
Rasio cakupan penghijauan wilayah Konservasi dan rawa abrasi	%	100	100	100	100	100	100	100		100,00	
Rasio tutupan vegetasi terhadap seluruh wilayah	%	37,93	40,53	41,18	42	40,53	41,18	100		98,05	
Pengurangan Emisi GRK	%	54	34	29	24	34	29	100		120,83	
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup											
Persentase ketersediaan dokumen SLHD	%	100	100	100	100	100	100	100		100,00	
Program Peningkatan Pengendalian Polusi											
Jumlah usaha dan / kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi pencegahan pencemaran udara	%	100	100	100	100	100	100	100		100,00	
Jumlah usaha dan / kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan teknis pencegahan pencemaran udara	%	30	70	80	90	70	80	100		88,89	
Pemenuhan Sarana Monitoring Polusi	%	40	85	100	100	85	100	100		100,00	
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau											

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	14		19	20	16	19	100		95,00	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
Persentase pengurangan sampah diperkotaan	%	4,75	20	25	30	20	25	100		83,33	
Persentase Pengangkutan sampah	%	30	70	75	80	70	75	100		93,75	
Persentase pengoperasian TPA	%	50	70	75	80	70	75	100		93,75	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan Tercapai



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras

11. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan memiliki 1 program yakni program penataan administrasi kependudukan dengan 6 indikator program pendukungnya. Dari keenam indikator tersebut jika dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 1 indikator telah mencapai target tahun 2020 dan masih ada 5 indikator yang tidak mencapai target tahun 2020 yakni Rasio Penduduk ber KTP; Rasio bayi (0 -1 th) ber akta kelahiran; Kepemilikan akta kelahiran; Ketersediaan data base kependudukan; dan Kepemilikan KK.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 1 indikator yang memerlukan upaya keras, 4 indikator yang berstatus akan akan mencapai target akhir dan 1 indikator berstatus telah mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir yakni indikator kepemilikan akta kelahiran. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16

**Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Administrasi Kependudukan											
Program penataan Administrasi Administrasi Kependudukan											
Rasio Penduduk ber ktp	%	87,99	99	100	100	99,54	98,24	98,24		98,24	
Rasio bayi (0 -1 th) ber akta kelahiran	%	82	100	100	100	98,68	98,44	98,44		98,44	
Kepemilikan akta kelahiran	%	47,09	100	100	100	38,72	40,46	40,46		40,46	
Ketersediaan data base kependudukan	%	19	20	20	20	20	19,53	97,65		97,65	
Kepemilikan KK	%	98,76	100	100	100	99,4	99,48	99,48		99,48	
Kepemilikan akta kematian	jiwa	6.837	1769	1769	10.614	33.252	12.815	724,421		120,74	

Keterangan:



Target 2018 Tercapai



Target 2018 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan
Tercapai



Target Akhir
RPJMD Perlu
Upaya Keras

12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Urusan pemberdayaan masyarakat memiliki 7 program utama dan 12 indikator. Dari 12 indikator tersebut dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 8 indikator telah mencapai target tahun 2020 dan masih terdapat 4 indikator yang tidak mencapai target tahun 2020 yakni Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK; LPM Berprestasi; Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat; dan Pemugaran Perumahan Penduduk Miskin.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 7 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD; 3 indikator berstatus akan mencapai target RPJMD dan 2 indikator berstatus memerlukan upaya keras. Indikator yang masih berstatus perlu upaya keras yaitu LPM Berprestasi dan Pemugaran Perumahan Penduduk Miskin. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Tabel 2.17
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Pemberdayaan Masyarakat											
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan											
PKK aktif	%	100	100		100	100	100	100		100	
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	13,57	54,28		81,42	64,2	57,78	85,16		70,97	
Posyandu aktif	%	95	100		100	100	100	100		100	
LPM Berprestasi	%	0,44	0,44		2,64	0,4	0,4	83,25		13,88	
Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD)	%	13,57	54,28		81,42	54,9	67,77	100		83,23	
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan											
Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif (BUMDesa)	%	5,4	750		100	97,8	100	100		100	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa											
Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	14,5	16,5		17,5	7,9	18,42	108		105	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	5	5		5	4,145	4,12	82,40		82,40	
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan											
Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	%	80	95		95	100	100	105		105	
Program Pengembangan Desa											
Desa yang berprofil	%	87,14	100		100	100	100	100		100	
Program Pengentasan Kemiskinan											
Pemugaran Perumahan Penduduk Miskin	%	0,14	2,53		4,75	0,7	1,09	33,22		22,87	
Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa											
RPJMDes	%	98,53	100		100	100	100	100		100	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan Tercapai



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras

13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana memiliki 6 program dan 19 indikator. Dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 9 indikator yang belum mencapai target tahun 2020 dan 10 indikator telah mencapai target.

Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 8 indikator yang telah berhasil mencapai target akhir RPJMD; 8 indikator yang berstatus akan mencapai target akhir RPJMD; dan 3 indikator memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang memerlukan upaya keras dalam

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



mencapai target akhir RPJMD meliputi Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun; Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat; dan Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)

Secara lebih rinci capaian indikator program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18
Capaian Indikator Program Daerah Kabupaten Grobogan
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
Program Keluarga Berencana											
Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	2,39	2,33	2,31	2,29	2,23	2,31	100		100,87	
Rasio akseptor KB baru	%	108	98	99	100	64,87	98,64	99,64		98,64	
Cakupan peserta KB aktif	%	74,54	76,72	76,84	77,2	77,77	76,96	100,16		99,69	
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun	%	1,93	1,87	1,85	1,83	8,2	8,1	437,838		442,62	
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	11,8	10,2	10	9,2	10,96	10,54	105,4		114,57	
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	1000 perempuan usia 15-19 tahun	18 /1000	17,72/10	17,68/1000	17,64/1000	-	-	-		-	
Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	71,54	71,72	71,84	72,2	77,77	76,96	107,127		106,59	
Cakupan KB Pria	%	1,34	1,47	1,58	1,66	1,8	1,14	72,1519		68,67	
Program pelayanan kontrasepsi											

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	0	3	4	5	5	0	0		-	
Program pembinaanPera n Serta Masyarakat DalamPelayana n KB/KR Yang Mandiri											
Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	%	27,5	41,43	46,07	100	4,75	5,45	11,829 8		5,45	
Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	%	1,06	1,07	1,07	1,07	1,13	1,1	102,80 4		102,8 0	
Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) aktif	%	1	1	1	100	1,13	100	100		100,	
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	84	86	86	87	87,45	85	98,84		97,70	
Program Pengembangan Pusat pelayanan Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa											
Persentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	%	92,11	97,37	100	100	184	100	100		100,	
Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga											
Persentase desa/ kelurahan yang memiliki kelompok tribina aktif	Aktif	BKB 563,	BKB 567,	BKB 572,	BKB 576,	BKB 570,	556	97,2		96,53	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
		BKR 259,	BKR 269,	BKR 274,	BKR 279,	BKR 252,	257	93,79	↓	92,11	▶
		BKL 304	BKL 316	BKL 320	BKL 324	BKL 296	300	93,75	↓	92,59	▶
Program pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU											
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	87,55	87,59	87,61	88	87,25	86	98,1623	↓	97,73	▶
Rasio BKB holistik	%	5	30	80	100	90	100	125	■	100,	●

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan
Tercapai



Target Akhir
RPJMD Perlu
Upaya Keras

14. Urusan Perhubungan

Urusan perhubungan memiliki 5 program utama dan 9 indikator program. Dari ke-9 indikator tersebut jika dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 5 indikator yang telah mencapai target yaitu persentase capaian hingga tahun 2002 telah mencapai 100% atau lebih dan masih ada 4 indikator yang tidak memenuhi target tahun 2020. Empat indikator yang belum memenuhi target yakni Jumlah Terminal yang beroperasi; Rasio ijin trayek; Presentase tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum; dan Presentase kendaraan umum yang memenuhi persyaratan laik jalan.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD hanya terdapat 3 indikator yang telah berhasil mencapai target akhir yakni Presentase ketersediaan terminal angkutan penumpang; Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota; dan Presentase ketersediaan alat pengujian kendaraan bermotor yang laik operasi. Selanjutnya terdapat 4 indikator yang memiliki status akan mencapai target akhir. Dan ada 2 indikator yang masih memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang masih mempunyai status perlu upaya keras yaitu Rasio

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



ijin trayek; dan Presentase tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum. Secara lebih rinci capaian indicator program urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Perhubungan

Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2015	Target RPJMD			Realisasi		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020	Target Akhir RPJMD	2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Perhubungan											
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan											
Jumlah Terminal yang beroperasi	terminal	6	6	6	6	5	5	83	↓	83	▶
Presentase ketersediaan terminal angkutan penumpang	%	100	100	100	100	100	100	100	■	100	●
Rasio ijin trayek	Ratio	0,019	0,0220	0,0220	0,0230	0,0169	0,0000	0	↓	0	▼
Presentase tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum	%	50	75	75	75	0	0	0	↓	0	▼
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ											
Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	78	86	88	90	85	88	100	■	98	▶
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan											
Presentase kendaraan umum yang memenuhi persyaratan laik jalan	%	85	97	99	99	90	98	99	↓	99	▶

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2015	Target RPJMD			Realisasi		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020	Target Akhir RPJMD	2019	2020	%	Status	%	Status
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	92	92	92	92	92	92	100		100	
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas											
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan	%	55	75	80	85	77	80	100		94	
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor											
Presentase ketersediaan alat pengujian kendaraan bermotor yang laik operasi	%	70	85	85	90	81	100	118		111	

Keterangan:



Target 2020 Terpenuhi



Target 2020 Tidak Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Telah Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Akan Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras

15. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika memiliki 3 program utama dan 13 indikator dalam RPJMD. Dari ke-13 indikator tersebut terdapat 8 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 yaitu persentase capaian hingga tahun 2020 telah mencapai 100% atau lebih dan 5 indikator yang tidak mencapai target tahun 2020 yaitu Jumlah penyiaran radio/TV Radio : kali; Jumlah penyiaran radio/TV Televisi : kali; Media massa seperti majalah, radio, dan televisi Majalah : kali / tahun; Media massa seperti majalah, radio, dan televisi Dialog radio : kali / tahun; dan Media massa seperti majalah, radio, dan televisi Siaran TV : kali / tahun.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 8 indikator yang telah mencapai target, 2 indikator akan mencapai target akhir RPJMD dan 3 indikator yang memerlukan upaya keras dalam memenuhi target akhir RPJMD. Indikator yang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



masih berstatus perlu upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD meliputi Jumlah penyiaran radio/TV Televisi : kali; Media massa seperti majalah, radio, dan televisi Majalah : kali / tahun, dan Media massa seperti majalah, radio, dan televisi Siaran TV : kali / tahun. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan komunikasi dan informatika bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Informasi dan Komunikasi											
Program pengembangan komunikasi, Informasi Dan Media Massa											
Jumlah Jaringan komunikasi	SKPD	56	225	56	329	225	56	100,00		100,00	
Jumlah penyiaran radio/TV	Radio : kali	19	19	43	19	19	33	76,74		73,33	
	Televisi : kali	17	17	8	17	17	1	12,50		10,00	
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi											
Prosentase SKPD yg punya Website	%	25	79	100,00	100	100	100,00	100,00		100,00	
Program Kerjasama Informasi dan media masa											
Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui :											
- Media massa seperti majalah, radio, dan televisi	Majalah : kali / tahun	4	10	10	12	6	1	10,00		8,33	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
	Dialog radio : kali / tahun	31	43	43	45	21	33	76,74		73,33	
	Siaran TV : kali / tahun	4	6	8	10	5	1	12,50		10,00	
- Media baru seperti website (media online)	setiap hari	3 kali Minggu	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	100,00		100,00	
- Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	kali / tahun	1	3	0	3	2	0	100,00		100,00	
- Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	kali / tahun / Kecamatan	1	1 kali/	1	1	2	1	100,00		100,00	
		2	12 Kec.	4	19	2	4	100,00		100,00	
- Media luar ruang seperti media bulletin, brosur, spanduk, baliho dll	kali / tahun	0	3	2	3	2	2	100,00		100,00	
Pameran / Exspo	kali / tahun	0	2	0	3	1	0	100,00		100,00	

Keterangan:



Target 2020 Terpenuhi



Target 2020 Tidak Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Telah Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Akan Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras

16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan kinerja program koperasi, usaha kecil dan menengah terdiri dari 4 program dan 10 indikator. Dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 8 indikator yang telah mencapai target tahun 2002, yaitu persentase capaian target hingga tahun 2020 mencapai 100% atau lebih dan 2 indikator yang tidak memenuhi target tahun 2020. Indikator yang tidak memenuhi target tahun 2020 yaitu meliputi Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Aktif.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 5 indikator yang telah mencapai target; 3 indikator berstatus akan mencapai target dan 2 indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang memerlukan upaya keras

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



dalam mencapai target akhir RPJMD meliputi persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk dan Jumlah Koperasi.

Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2018		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Koperasi dan UMKM											
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif											
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	73,71	93,7	92	90,5	96,3	96,6	105,		106,74	
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah											
Jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM)	Unit	26.094	29000	29500	30.000	33.363	34.183	115,87		113,94	
persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0,2	0,16	0,08	0,3	0,16	0,08	100,		26,67	
persentase UKM/Koperasi yang mengakses pembiayaan bank/keuangan			92	93	94	95,35	93,03	100,03		98,97	
% UKM yang mengakses permodalan	%	90	0,86	1,07	1,28	0,92	1,1	102,80		85,94	
% Koperasi yang mengakses permodalan	%	0									
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			645	663	684	513	527	79,49		77,05	
Jumlah Koperasi	Unit	481	91,2	92,2	93,22	47,15	44,97	48,78		48,24	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2018		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Persentase Koperasi Aktif	%	88	52	52,23	55	59,5	59	112,96		107,27	
Persentase KSP/USP Sehat	%										
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			15	16	18	16	16	100,		88,89	
Jumlah produk unggulan, andalan dan potensial daerah	Produk	11	93,7	92	90,5	96,3	96,6	105,		106,74	

Keterangan:



Target 2020 Terpenuhi



Target 2020 Tidak Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan Tercapai



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras

17. Urusan Penanaman Modal

Urusan penanaman modal dan perizinan terpadu memiliki 3 program dengan 13 indikator pendukung. Dari ke-13 indikator tersebut terdapat 4 indikator yang telah tercapai dan 9 indikator yang tidak mencapai target yaitu persentase capaian target kurang dari 100%.

Jika dilihat dari capaian target akhir RPJMD, terdapat 10 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD, 1 indikator akan tercapai dan 2 indikator perlu upaya keras. Indikator yang memerlukan upaya keras dalam pemenuhan capaian RPJMD yakni Penerapan Sistem Manajemen Mutu 9001 : 2008 dan Implementasi sistem mutu ISO 9001 : 2008; dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Secara lebih rinci capaian indikator kinerja program dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.22
Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Penanaman Modal											

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Program peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi											
Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Jenis	0	1	1	1	1	1	100,		100,	
Jumlah fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	kali	1	1	1	1	1	0	-		100,	
Jumlah promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	kali	3	3	3	3	3	1	33,33		100,	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi											
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)											
· PMA	Perusahaan	2	1	1	6	1	0	-		116,67	
· PMDN	Perusahaan	38	5	5	44	133	340	6.800,00		2.115,91	
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)											
· PMA	ribu Us \$	2.500	1250	1.250	71430	47.468	0	-		205,38	
· PMDN	Juta Rp	2.960.092	389486	389.486	5884964	903.892	1.134.358	291,24		122,81	
Jumlah perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal yang dikeluarkan BPPT	Jumlah	3605	3850	3900	3950	1530	2246	57,59		377,70	
Jumlah jenis perijinan dan non perijinan investasi yang dilayani BPPT	Jenis	50	52	52	52	72	75	144,23		138,46	
Persentase waktu pelayanan PTSP ditetapkan maksimal 7 hari kerja	%	90	100	100	100	100	90	90,00		90,00	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Penerapan Sistem Manajemen Mutu 9001 : 2008 dan Implementasi sistem mutu ISO 9001 : 2008	paket	1	1	1	1	0	0	-		-	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	X Rp1000	10.515	40.000	40.000	40000	0		-		-	
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Investasi Daerah											
Peta potensi investasi kabupaten Grobogan	buah	0	1	1	1	1	0	-		100,00	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan Tercapai



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras

18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga berada di bawah koordinasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata. Urusan kepemudaan dan olahraga memiliki 3 program dan 4 indikator. Dari ke 4 indikator tersebut terdapat 1 indikator yang telah tercapai dan 3 indikator yang tidak tercapai hingga tahun 2020. Indikator yang tidak tercapai pada tahun 2020 yaitu Jumlah kegiatan kepemudaan; Persentase Prestasi Pemuda dari delegasi yang diberangkatkan; dan Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 1 indikator yang telah mencapai target RPJMD, 2 indikator yang akan mencapai target RPJMD hingga tahun 2020 dan 1 indikator yang masih perlu upaya keras. Indikator yang berstatus masih perlu upaya keras yaitu indikator Persentase Prestasi Pemuda dari delegasi yang diberangkatkan, hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 pandemi covid-19 sehingga Tidak ada delegasi yang diberangkatkan. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan kepemudaan dan olahraga bisa dilihat pada table sebagai berikut ini.

Tabel 2.23

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Pemuda dan Olahraga											
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda											
Jumlah kegiatan kepemudaan	buah	14	16	16	16	16	11	68,75	↓	68,75	▶
Persentase Prestasi Pemuda dari delegasi yang diberangkatkan	%	20	30	30	30	37,5	0	-	↓	-	▼
Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan											
Jumlah organisasi pemuda	buah	22	25	25	25	25	25	100,00	■	100,00	●
Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda											
Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	orang	883	950	975	1000	1000	950	97,44	↓	95,00	▶

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan Tercapai



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras

19. Urusan Statistik





Urusan statistika berada dibawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyelenggaraan urusan statistika bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran Meningkatkan kualitas e- government, pengelolaan data/informasi dan arsip daerah, serta pengamanan informasi sandi. Indikator sasaran urusan statistik yakni persentase PD yang memiliki buku profil buku data statistik.



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator program urusan statistik terdiri dari 1 program yakni pengembangan data statistik. Pada program tersebut terdapat 2 indikator pendukung yang jika dibandingkan dengan target tahun 2020 maupun di bandingkan dengan target akhir RPJMD statusnya sudah mampu tercapai. secara rinci sebagai berikut ini.

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Statistik

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Statistik											
Program Pengembangan Data Statistik											
Buku "kabupaten dalam angka"	%	100	100	100	100	100	100	100		100	
Buku "PDRB kabupaten"	%	100	100	100	100	100	100	100		100	

Keterangan:  Target 2020 Tercapai  Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan
Tercapai



Target Akhir
RPJMD Perlu
Upaya Keras

20. Urusan Persandian

Urusan persandian berada dibawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyelenggaraan urusan persandian memiliki tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran Meningkatnya kualitas e- government, pengelolaan data/informasi dan arsip daerah, serta pengamanan informasi sandi. Urusan persandian memiliki 1 program yakni program pengelolaan persandian dengan indikator persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan pada pihak terkait.



Pada tahun 2020 realisasi capaiannya jika dibandingkan dengan target tahun 2020 persentase capaiannya sebesar 100% dan artinya telah mencapai target. Sedangkan, jika dibandingkan target akhir RPJMD status capaiannya berstatus telah mencapai target akhir RPJMD dengan persentase capaiannya 100%. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan persandian bisa di lihat sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.25

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Persandian

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Persandian											
Program Pengelolaan Persandian											
Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan pada pihak terkait	%	89	99	100	100	99	100	100		100	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan Tercapai



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras

21. Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan yang ditargetkan dalam RPJMD memiliki 3 program yang dijabarkan dalam 6 indikator. Dibandingkan dengan target tahun 2020, terdapat 2 indikator yang telah mencapai target hingga tahun 2020, 3 indikator tidak mencapai target tahun 2020 dan 1 indikator tidak tercapai karena event ditiadakan pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 yaitu Jumlah event budaya di tingkat regional dan nasional yang diikuti.











Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD diketahui 2 indikator telah tercapai, 3 indikator masih berstatus perlu upaya keras dalam mencapai target RPJMD dan 1 indikator tidak dilaksanakan event pada tahun 2020 karena pandemi covid-19. Indikator yang memerlukan upaya keras yaitu Jumlah upacara adat tradisional yang dilestarikan baru mencapai 13,33% hingga tahun 2020; Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya baru mencapai 28,57%; dan Jumlah Misi Kesenian tidak terlaksana pada tahun 2020.

Secara rinci capaian kinerja program urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Kebudayaan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Kebudayaan											
Program pengembangan Nilai Budaya											
Jumlah upacara adat tradisional yang dilestarikan	jenis	0	3	3	15	60	2	66,67		13,33	
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya											
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100,		100,	
Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	2	6	6	7	5	2	33,33		28,57	
Jumlah Misi Kesenian	kali	2	3	3	3	3	0	-			
Jumlah grup kesenian	kelompok	1.323	1400	1420	1435	1445	1867	131,48		130,10	
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya											
Jumlah event budaya di tingkat regional dan nasional yang diikuti	event	3	3	3	18	3	0	-			

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan Tercapai



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras

22. Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan memiliki dua program dan 4 indikator di dalam RPJMD. Dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 1 indikator yang telah mencapai target dan 3 indikator yang tidak mencapai target hingga tahun 2020. Indikator yang tidak mencapai target hingga tahun 2020 yaitu Jumlah pengunjung perpustakaan daerah dalam satu tahun; Jumlah Buku Koleksi perpustakaan Daerah; dan Jumlah Karya Rekam dan Karya Cetak yang dilestarikan.

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 1 indikator yang telah tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator yang memerlukan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD yaitu Jumlah pengunjung perpustakaan daerah dalam satu tahun; dan Jumlah Karya Rekam dan Karya Cetak yang dilestarikan. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Perpustakaan

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Perpustakaan											
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan											
Jumlah perpustakaan yang dibina	Unit	156	158	158	790	790	790	500		100	
Jumlah pengunjung perpustakaan daerah dalam satu tahun	Orang	20.250	25000	26.000	146000	44.807	11.077	43		8	
Jumlah Buku Koleksi perpustakaan Daerah	Judul	24.053	27453	28.303	29253	50.158	27.184	96		93	
Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Bahan Pustaka											
Jumlah Karya Rekam dan Karya Cetak yang dilestarikan	Eks	200	200	200	200	21	21	11		11	

Keterangan:



Target 2020 Terpenuhi



Target 2020 Tidak Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Telah Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Akan Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras

23. Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan yang ditargetkan dalam RPJMD terdiri dari 3 program yang dijabarkan dalam 3 indikator yaitu Persentase arsip yang terduplikasi; Jumlah SKPD







Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku; dan Persentase sarpras kearsipan yang terpelihara.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2020, semua indikator yang ditargetkan pada tahun 2020 semuanya telah tercapai yaitu persentase capaian hingga tahun 2020 telah mencapai 100% atau lebih. Dan jika dibandingkan dengan target RPJMD ketiga indikator urusan kearsipan semuanya telah mencapai target. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Kearsipan

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2018	2019	%	Status	%	Status
Urusan Kearsipan											
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah											
Persentase arsip yang terduplikasi	%	-	20	20	100	100	100	500		100	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan											
Jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	10	10	10	50	100	100	1.000		200	
Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan											
Persentase sarpras kearsipan yang terpelihara	%	-	10	10	50	50	50	500		100	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan
Tercapai



Target Akhir
RPJMD Perlu
Upaya Keras

24. Urusan Kelautan dan Perikanan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Kinerja daerah urusan kelautan dan perikanan dilihat dari 3 program dan 9 indikator yang menjadi tolok ukurnya. Pada tahun 2020 terdapat 8 indikator yang telah tercapai dan masih ada 1 indikator yang tidak tercapai. Indikator yang tidak mencapai target hingga tahun 2020 yaitu indikator Cakupan bina kelompok nelayan, hingga tahun 2020 baru terealisasi sebesar 16 kelompok dengan target tahun 2020 sebesar 40 kelompok.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2021 terdapat 5 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD, 3 indikator yang akan mencapai target akhir RPJMD dan 1 indikator yang berstatus masih perlu upaya keras. 1 indikator yang masih perlu upaya keras yaitu indikator Tingkat cakupan bina kelompok ikan. Pada 2020 realisasi capainnya sebesar 16,8% dengan target akhir RPJMD sebesar 90%, sehingga persentase capaian akhir nya baru mencapai sebesar 18,67%. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Kelautan dan Perikanan

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Kelautan dan perikanan											
Program pengembangan Perikanan Tangkap											
Produksi perikanan Tangkap	kg	934500	1.094.072	1.144.399	1201619	1.136.235	1.168.120	102,07		97,21	
Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	30	40	40	18	18	16	40,00		88,89	
Tingkat cakupan bina kelompok ikan	%	27	20	20,00	20	25	22,5	112,50		112,50	
Program pengembangan Perikanan Budidaya											
Produksi perikanan budidaya	kg	1890990	2.325.993	2.452.760	2587662	2.587.670	2.584.385	105,37		99,87	
Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	kelompok	20	35	40	45	37	50	125,00		111,11	
Tingkat cakupan bina kelompok ikan	%	75	15	15,00	90	25	16,8	112,00		18,67	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi perikanan											
Tingkat konsumsi makan ikan	kg/kap / th	14,43	17,27	17,98	15,38	17,22	17,98	100,00	<div></div>	116,91	<div></div>
Jumlah produksi hasil olahan ikan	kg	284375	292990	295900	298880	293.000	298.950	101,03	<div></div>	100,02	<div></div>
Jumlah usaha pengolahan ikan	Unit	80	86	88	88	88	88	100,00	<div></div>	100,00	<div></div>

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan Tercapai



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras

25. Urusan Pariwisata

Urusan pariwisata terdiri dari 3 program yang dijabarkan dalam 9 indikator. Dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 5 indikator yang telah tercapai, 2 indikator yang tidak mencapai sampai dengan target tahun 2020 dan 2 indikator tidak tersedia data hingga tahun 2020 sehingga tidak bisa menghitung persentase capaiannya.















Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 3 indikator yang telah mencapai target akhir akhir RPJMD; 4 indikator yang berstatus akan mencapai target akhir RPJMD; dan 2 indikator masih belum diketahui realisasi data capaian hingga tahun 2020. Indikator yang belum diketahui data capaiannya hingga tahun 2020 yaitu Jumlah kajian pengembangan wisatan dan Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Pariwisata

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
<u>Urusan Pariwisata</u>	-	-			-	-	-				

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata											
Kunjungan wisata	orang	206.896	300000	325.000	375.000	626.873	330.180,	110,06		88,05	
Jumlah kajian pengembangan wisata	dokumen	0	3	3	3	3					
Jumlah regulasi bidang kepariwisataan (Perda dan Perbup)	Perda/Perbup	1	3	3	3	2	2	66,67		66,67	
Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,76	0,87	0,9	0,93	0,31	belum tersedia data PAD Grobogan sebagai perhitungan				
Program pengembangan Destinasi Pariwisata											
Jumlah destinasi wisata unggulan	unit	2	7	8	9	12	22	314,29		244,44	
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata											
Jumlah restoran dan rumah makan	unit	32	40	45	50	38	40	100,		80,00	
Jumlah penginapan/hotel	unit	10	19	21	23	15	15	78,95		65,22	
Jumlah desa wisata	desa	6	19	21	23	12	26	136,84		113,04	
Jumlah Pokdarwis	kelompok	6	19	21	23	12	26	136,84		113,04	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan
Tercapai



Target Akhir
RPJMD Perlu
Upaya Keras

26. Urusan Pertanian

Urusan pertanian diampu oleh Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Pada urusan pertanian memiliki 3 bidang yakni pertanian, kehutanan dan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



peternakan yang terdiri dari 9 program dan dijabarkan dalam 39 indikator. Sampai dengan tahun 2020, terdapat 19 indikator yang telah tercapai dan 24 indikator yang tidak mencapai target hingga tahun 2020.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, terdapat RPJMD, 11 indikator yang aka mencapai target dan 14 indikator yang masih memerlukan upaya keras. Indikator yang masih memerlukan upaya keras yaitu Populasi komoditas peternakan utama (Kerbau), Angka kesakitan / morbiditas ternak (Kambing); Pengobatan ternak besar (sapi); Jumlah promosi produk peternakan; Pengembangan Biogas; Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Pertanian yang berbadan hukum; Produksi tanaman pangan (Kedelai); Jumlah promosi komoditi pertanian dan hortikultura; Peningkatan kualitas pasca panen komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura; Jumlah kelompok tani yang mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; Jumlah aplikasi dan adopsi teknologi baru; Produksi tebu rakyat (ton tebu giling); dan kelompok petani tebu yang dibina (kelompok petani tebu).

Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Pertanian

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Pertanian											
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan											
Populasi komoditas peternakan utama											
- Sapi potong	ekor	178.555	193.274	197.139	201.082	193.292	198.158	100,52		98,55	
- Kerbau	ekor	2.457	2.660	2.713	2.767	1.696	1.780	65,61		64,33	
- Kambing	ekor	117.756	127.463	130.012	132.612	142.005	147.147	113,18		110,96	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
- Domba	ekor	18.257	19.762	20.157	20.560	30.865	32.396	160,72		157,57	
- Unggas (Ayam)	ekor	1.294.904	203.573	2.286.126	2.571.891	2.125.747	2.384.522	104,30		92,71	
Meningkatnya produksi daging (kg)											
- Sapi potong	kg	1.641.121	177.640	1.811.930	1.848.169	1.779.595	1.677.859	92,60		90,78	
- Kerbau	kg	113.120	122.445	124.894	127.391	76.640	44.480	35,61		34,92	
- Kambing	kg	737.300	798.077	814.039	830.320	1.071.900	1.072.993	131,81		129,23	
- Domba	kg	105.902	114.632	116.924	119.263	30.344	102.953	88,05		86,32	
- Unggas (Ayam)	kg	1.872.516	202.687	2.067.409	2.108.757	1.513.364	1.408.225	68,12		66,78	
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak											
Angka kesakitan / morbiditas ternak											
§ Sapi	ekor	1.174	900	850	800	916	587	69,06		73,38	
§ Kambing	ekor	670	550	500	450	247	162	32,40		36,00	
§ Unggas	ekor	2.860	2.000	1.900	1.800	6.800	1.500	78,95		83,33	
Angka Pengobatan ternak											
§ Vaksin AI (Ayam)	dosis	33.000	70.000	75.000	80.000	170.000	100.000	133,33		125,00	
§ Desinfektan	liter	300	275	300	325	930	885	295,00		272,31	
§ Pengobatan ternak besar (sapi)	ekor	17.500	21.500	22.500	23.500	22.000	10.000	44,44		42,55	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Program peningkatan pemasaran hasil produksi Peternakan											
Jumlah promosi produk peternakan	kali	21	22	22	22	15	7		↓	31,82	▼
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan											
Capaian Inseminasi Buatan Sapi Potong	Dosis	80.996	82.000	82.500	83.000	130.753	118.789	143,99	■	143,12	●
Capaian Kelahiran hasil IB	ekor	45.000	49.500	50.000	50.500	55.486	43.629	87,26	↓	86,39	▶
Pengembangan Biogas	unit	9	10	12	12	10	0	-	↓	-	▼
Urusan Pertanian											
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani											
Cakupan bina kelompok petani	Kelompok Tani	1600	1600	1.600,0	1600	1606	1606	100,38	■	100,38	●
Jumlah kelompok tani Utama	Kelompok Tani	124	170	180,0	190	200	184	102,22	■	96,84	▶
Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Pertanian yang berbadan hukum	LKM	0	90	100,0	110	6	6,0	6,00	↓	5,45	▼
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)											
Produksi tanaman pangan											
- Padi	Ton	764.148	780034	784.479,0	788.924	799.726	808.910	103,11	■	102,53	●
- Jagung	Ton	656.027	684991	690.738,0	695.584	771.837	771.957	111,76	■	110,98	●

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
- Kedelai	Ton	43.760	47304	48.040,0	50.108	13.429	10.709	22,29		21,14	
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan											
Jumlah promosi komoditi pertanian dan hortikultura	Kali	3	15	18,0	21	15	4,0	22,22		19,05	
Peningkatan kualitas pasca panen komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	%	5	10	12,0	15	5	6,0	50,00		40,00	
Jumlah kelompok tani yang mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	Kelompok Tani	1	10	15,0	20	7	8,0	53,33		40,00	
Jumlah kemitraan yang terjalin	Kelompok tani	10	14	15,0	16	19	21,0	140,00		131,25	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan											
Jumlah aplikasi dan adopsi teknologi baru	Unit	0	4	5,0	6	1	1,0	20,00		16,67	
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan											
Produksi komoditas hortikultura											
- Bawang Merah	Kw	53.296	57.293	57.560,0	57.666	126.275	203.641	353,79		382,09	
- Cabe Besar	Kw	10.672	11.259	11.419,0	11.526	44.845	52.873	463,03		495,44	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
- Cabe Rawit	Kw	27.143	28.446	29.043,0	29.070	67.225	57.199	196,95		210,73	
- Melon	Kw	112.738	135.029	135.705,0	118.919	78.832	92.026	67,81		81,63	
- Semangka	Kw	126.066	13.083	13.476,0	137.469	207.518	249.101	1.848,48		197,60	
- Pisang	Kw	217.768	7.023	7.234,0	250.340	326.523	517.180	7.149,29		237,49	
- Jambu Air	Kw	11.913	399.787	411.780,0	14.149	12.077	52.953	12,86		444,50	
- Belimbing	Kw	6.370	117.924	118.375,0	7.596	15.868	22.689	19,17		356,19	
Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan											
Produksi tebu rakyat (ton tebu giling)	ton tebu giling	121.237,1	133.385,4	136.422,5	118.706,0	73.325,0	74.399	54,54		62,68	
Produksi tembakau (ton rajangan kering)	ton rajangan kering	2.578,9	2.769,1	2.832,5	1.197,8	4.198,0	4.565	161,17		381,13	
populasi tanaman kelapa (batang)	batang				234.264,0	133.320,0	131.750	84,42		83,88	
kelompok petani tebu yang dibina (kelompok petani tebu)	kelompok petani tebu	19,0	25,0	27,0	46,0		19,00	70,37		41,30	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan Tercapai



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras

27. Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan terdiri dari 5 program yang dijabarkan dalam 9 indikator. Dibandingkan dengan target tahun 2020, 8 indikator telah tercapai dan 1 indikator yang tidak memenuhi target tahun 2020. Indikator yang tidak memenuhi target tahun 2020 yaitu indikator Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB. Pada tahun 2020 realisasi capainnya sebesar 20,09% dengan persentase capaian hingga tahun 2020 sebesar 86,89%.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021









Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 6 indikator yang telah mencapai target akhir, dan 2 indikator yang akan mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang masih berstatus akan tercapai yaitu Persentase Pasar yang diawasi dan Tingkat Pengaduan yang ditangani. Secara lebih rinci capaian indikator program urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.32
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Perdagangan

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Perdagangan											
Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan											
Persentase Pasar yang diawasi	%	15,17	15,8	16,00	16,5	15,8	16,00	100,00		96,97	
Tingkat Pengaduan yang ditangani	%	75	87	90,00	95	125	90,00	100,00		94,74	
Program peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional											
Produk yang bisa diterima pasar internasional	Produk	3	4	4	4	5	5	125,00		125,00	
Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor											
Perkembangan nilai ekspor	Rp. (000)	142.032.319	144.173.470	144.894.341	145.618.813	52.529.470.096	1.226.969.568.429	846.802,96		842.590,01	
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	20,56	22,55	23,12	23,65	21	20,09	86,89		84,95	
Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri											
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	12,5	24	28	30	85	90	321,43		300,00	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Program pembinaan Perdagangan Kaki Lima Dan Asongan											
Persentase lokasi PKL yang tertata	%	10,34	30	45,00	50	75	75,00	166,67		150,00	
Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	43,75	56,25	62,50	68	70	75,00	120,00		110,29	
Jumlah pasar daerah	%	16	16	16	16	17	18	112,50		112,50	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan
Tercapai



Target Akhir
RPJMD Perlu
Upaya Keras

28. Urusan Perindustrian

Urusan perindustrian terdiri dari 5 program yang dijabarkan dalam 8 indikator. Dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 4 indikator program yang telah mencapai target tahun 2020 dan 4 indikator program tidak mencapai target tahun 2020.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 3 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD, 3 indikator akan mampu mencapai target di akhir periode, dan 2 indikator masih memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target RPJMD meliputi Pertumbuhan Industri, dan Persentase sentra industri yang berkembang. Secara lebih rinci capaian indikator program urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Perindustrian

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja	% Capaian Tahun 2020	% Capaian Target Akhir RPJMD
-----------	--------	---------------------	----------------	---------------------	-------------------	----------------------	------------------------------

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Perindustrian											
Program peningkatan Kapasitas Dan penggunaan Iptek Dalam Sistem Produksi											
Cakupan pembinaan unit Usaha IKM	%	1,2	1,9	2	2,1	25	2,22	111,00		105,71	
Program pembinaan dan pengembangan industri Kecil Dan menengah											
Pertumbuhan Industri	%	1,27	1,32	1,33	1,35	1,27	0,78	58,65		57,78	
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	2,7	3,35	3,40	3,46	16,5	13,31	391,47		384,68	
Persentase industri kecil dan menengah	%	99,96	99,96	99,97	99,97	38,4	99,93	99,96		99,96	
Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0,02	0,19	0,19	0,21	75	0,59	310,53		280,95	
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku dan Kemampuan Teknologi Industri											
Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	73,5	88,23	94,12	94,12	47	62,5	66,40		66,40	
Program Penataan Struktur Industri											
Persentase sentra industri yang berkembang	%	83,58	87,59	88,69	89,42	40	49,12	55,38		54,93	
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial											
Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM	%	15,09	16,56	16,59	16,75	20	16,7	100,66		99,70	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan
Tercapai



Target Akhir
RPJMD Perlu
Upaya Keras



29. Urusan Transmigrasi

Urusan transmigrasi terdiri dari 2 program yang dijabarkan dalam 3 indikator, yaitu Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK); Jumlah perjanjian kerjasama (MoU) antar daerah kerjasama transmigrasi; dan Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU). Namun sampai dengan tahun 2002 masih belum di ketahui realisasi capainnya sehingga masih belum di hitung persentase capaian akhir tahun 2020 maupun akhir RPJMD. Secara lebih rinci capaian indikator program urusan transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Transmigrasi

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Urusan Transmigrasi											
Program pengembangan wilayah transmigrasi											
Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)	KK	14	25	30	30	25					
Jumlah perjanjian kerjasama (MoU) antar daerah kerjasama transmigrasi	MoU	3	4	5	5	2					
Program transmigrasi lokal											
Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)	Orang	14	25	30	30	30					

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Keterangan:

Target 2020 Tercapai	Target 2020 Tidak Tercapai
Target Akhir RPJMD Telah Tercapai	Target Akhir RPJMD Akan Tercapai
	Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras

30. Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan Perencanaan pembangunan terdiri dari 6 program dan 10 indikator. Program Pengembangan Data/Informasi terdiri dari indikator Persentase ketersediaan data perencanaan. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri dari indikator Jumlah hasil penelitian yang menjadi input kebijakan dan perencanaan pembangunan; indikator Penataan Kelembagaan SIDA; dan indikator Penataan Jaringan SIDA. Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari indikator Tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA-PPAS, KUAP-PPASP, dan TapKin); indikator Tingkat Kelengkapan Dokumen Utama Pengendalian dan Evaluasi; dan indikator Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi terdiri dari indikator persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah. Program perencanaan Sosial Budaya terdiri dari ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah. Program perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam terdiri dari indikator ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah.

Dilihat persentase capaian realisasi hingga tahun 2020 maupun target akhir RPJMD, terdapat 9 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dan 1 indikator yang tidak mencapai target hingga tahun 2020. Indikator yang tidak mencapai target hingga tahun 2020 yaitu indikator Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya. Secara lebih rinci capaian indikator program urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.35
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Perencanaan Pembangunan

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Perencanaan Pembanguna											









Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
n											
Program Pengembangan Data/Informasi											
Persentase ketersediaan data perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100		100	
Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
Jumlah hasil penelitian yang menjadi input kebijakan dan perencanaan pembangunan	dok	4	4	4	4	4	4	100		100	
Penataan Kelembagaan SIDA	unit	10	10	10	10	10	10	100		100	
Penataan Jaringan SIDA	Kecamatan	19	19	19	19	19	19	100		100	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah											
Tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA-PPAS, KUAP-PPASP, dan TapKin)	%	100	100	100	100	100	100	100		100	
Tingkat Kelengkapan Dokumen Utama	%	100	100	100	100	100	100	100		100	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Pengendalian dan Evaluasi											
Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPd tiap tahunnya	%	65	100	100	100	90	90	90		90	
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi											
% ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100		100	
Program perencanaan Sosial Budaya											
% ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100		100	
Program perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam											
% ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100		100	

Keterangan:



Target 2020 Terpenuhi



Target 2020 Tidak Terpenuhi



Target Akhir RPJMD
Telah Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Akan
Terpenuhi



Target Akhir
RPJMD Perlu
Upaya Keras

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



31. Urusan Keuangan Daerah

Urusan Keuangan Daerah terdiri dari 4 program yang dijabarkan dalam 10 indikator pendukung. Dibandingkan dengan target tahun 2020, terdapat 4 indikator yang telah tercapai dan 6 indikator yang tidak mampu mencapai target. Indikator yang tidak tercapai yaitu Belanja Langsung terhadap total APBD; Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja; Rasio SILPA thdp total belanja tahun sebelumnya; Rasio SILPA thdp Jumlah Pendapatan; Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi); dan Peningkatan PAD.

Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021, terdapat 5 indikator yang telah tercapai, 2 indikator yang on the track akan tercapai dan 3 indikator yang berstatus memerlukan upaya keras untuk mencapainya. Indikator yang masih berstatus perlu upaya keras yaitu Belanja Langsung terhadap total APBD; Rasio SILPA thdp Jumlah Pendapatan; dan Peningkatan PAD. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Keuangan Daerah

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Keuangan											
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah											
Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,		100,00	
Belanja Publik terhadap DAU	%	76,94	85,62	88,10	91,84	222,	234,03	265,65		254,82	
Belanja Langsung terhadap total APBD	%	39,22	39,53	39,81	40,13	21,4685	17,6335	44,30		43,94	
Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	%	89,03	94	95	95	88,69	78,49	82,62		82,62	
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota											

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Rasio SILPA thdp total belanja tahun sebelumnya	%	12,74	7	6	5	7,00	5,28	88,04		105,64	
Rasio SILPA thdp Jumlah Pendapatan	%	12,76	10	11	12	6,36	5,44	49,42		45,30	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan daerah											
Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	%	13,52	13,91	15,01	16,2	13,35	14,15	94,24		87,35	
Program Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah											
Rasio pajak terhadap PAD	%	19,22	17,46	16,83	16,22	27,78	27,41	162,83		168,97	
Peningkatan PAD	%	15,9	24,34	24,51	24,67	9,13	1,80	7,34		7,29	
Tingkat Pengelolaan asset daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,00		100,00	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan Tercapai



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras

32. Urusan Kepegawaian

Urusan kepegawaian terdiri dari 3 program dengan 12 indikator. Dari ke-12 indikator tersebut jika dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 5 indikator yang telah mencapai target tahun 2020 dan 4 indikator yang tidak mencapai target dan 3 indikator yang tidak dilaksanakan karena pandemi Covid-19, sehingga capaian targetnya tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai yaitu Jumlah aparatur yang melanjutkan pendidikan formal; Persentase pejabat yang telah mengikuti diklatpim (II, III dan IV); Persentase CPNS yang mengikuti diklat pra jabatan sesuai dengan waktu yang ditentukan; Jumlah ASN yang mengikuti diklat Teknis fungsional; Persentase PNS berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya; Jumlah ASN yang mengikuti seleksi pimpinan tinggi; dan Jumlah ASN berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 5 indikator yang telah mencapai target akhir RPJM; 3 indikator yang masih on the track akan tercapai, dan 4 indikator yang perlu upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target RPJMD yaitu Jumlah aparatur yang melanjutkan pendidikan formal; Persentase CPNS yang mengikuti diklat pra jabatan sesuai dengan waktu yang ditentukan; Persentase PNS berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya; dan Jumlah ASN berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya.

Secara rinci capaian kinerja program urusan kepegawaian bisa dilihat pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Kepegawaian

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Kepegawaian											
Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	%	54	75	75	75	100,00	100	133,33		133,33	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
Jumlah aparatur yang melanjutkan pendidikan formal	ASN	15	27	29	30	14,00	10	34,48		33,33	
Persentase pejabat yang telah mengikuti diklatpim (II, III dan IV)	%	79	80	80	80	75,05	62,68	78,35		78,35	
Persentase CPNS yang mengikuti diklat pra jabatan sesuai dengan waktu yang ditentukan	%	100	100	100	100	100,00	0	-		-	
Jumlah ASN yang mengikuti diklat Teknis fungsional	ASN	188	300	300	300	80,00	203	67,67		67,67	
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur											
Persentase PNS yang menerima SK kenaikan pangkat tepat waktu	%	100	100	100	100	100,00	100	100		100	
Persentase PNS yang menerima SK pindah (mutasi) sesuai	%	100	100	100	100	100,00	100	100		100	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
kebutuhan organisasi											
Persentase penerbitan SK pensiun tepat waktu	%	100	100	100	100	100,00	100	100,		100,	
Persentase PNS berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya	%	100	100	100	100	100,00	0	-		-	
Jumlah data pegawai yang di update	ASN	10577	2500	2500	2500	2.500,00	7964	318,56		318,56	
Jumlah ASN yang mengikuti seleksi pimpinan tinggi	ASN	0	50	50	50	20,00	41	82,00		82,00	
Jumlah ASN berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya	ASN	150	150	200	200	150,00	0	-		-	

Keterangan:



Target 2020 Terpenuhi



Target 2020 Tidak Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Telah Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Akan Terpenuhi



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras

33. Urusan Sekretariat Daerah

Urusan sekretariat daerah terdiri dari 6 program yang dijabarkan dalam 11 indikator, yaitu Persentase luas lahan bersertifikat; Penyelesaian izin lokasi; Penyelesaian kasus tanah Negara; Persentase penyelesaian penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan oleh Pemda; Frekuensi peningkatan kapasitas aparatur, pendampingan aparatur dan penilaian kecamatan sebagai penyelenggara paten; Jumlah perangkat kecamatan yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan; Prosentase MoU kerjasama Daerah antar pemerintah daerah, provinsi dan pusat serta dengan pihak ketiga yang difasilitasi oleh TKSD; Persentase desa / kelurahan yang dilakukan pembakuan rupa bumi; Persentase desa yang telah dilakukan pemeliharaan patok batas wilayahnya; Jumlah Rapat Koordinasi bagi pejabat pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan yang terselenggara selama 1 tahun; dan Jumlah SKPD yang mengikuti rakor pejabat Pemda.

Jika di bandingkan dengan target tahun 2020, ada 5 indikator yang belum di ketahui realisasi capainnya yaitu Persentase luas lahan bersertifikat, Penyelesaian

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



izin lokasi, Penyelesaian kasus tanah Negara, Persentase penyelesaian penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan oleh Pemda dan Jumlah perangkat kecamatan yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga persentase capaian tahun 2020 maupun target akhir RPJMD masih belum diketahui status capainya. Dan untuk indikator lainnya persentase capaian tahun 2020 maupun persentase capaian target akhir RPJM sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci capaian kinerja Program urusan sekretariat daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Sekretariat Daerah

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah											
Persentase luas lahan bersertifikat	%	57,83	61,5	62,5	63,5	63,5					
Program Penyelesaian Konflik- konflik Pertanahan											
Penyelesaian izin lokasi	%	7	5	5	18	18					
Penyelesaian kasus tanah Negara	%	0	0	0	0	100					
Persentase penyelesaian penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan oleh Pemda	%	100	100	100	100	100					
Sekretariat Daerah											
Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH											
Frekuensi peningkatan kapasitas aparatur, pendampingan aparatur dan penilaian kecamatan sebagai penyelenggara paten	bulan	12	12	12	12	12	12	100		100,	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Jumlah perangkat kecamatan yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	orang	38	38	38	38	38	0				
Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah											
Prosentase MoU kerjasama Daerah antar pemerintah daerah, provinsi dan pusat serta dengan pihak ketiga yang difasilitasi oleh TKSD	%	100	100	100	100	100	100	100		100,	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru											
Persentase desa / kelurahan yang dilakukan pembakuan rupa bumi	%	50	90	100	100	100	100	100		100,	
Persentase desa yang telah dilakukan pemeliharaan patok batas wilayahnya	%	0	62	81	81	81	81	100		100,	
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah											
Jumlah Rapat Koordinasi bagi pejabat pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan yang terselenggara selama 1 tahun	Keg	12	12	12	12	12	12	100		100,	
Jumlah SKPD yang mengikuti rakor pejabat Pemda	PD	32	32	32	32	32	32	100		100,	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan Tercapai



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras

34. Urusan Sekretariat Dewan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Urusan sekretariat DPRD lebih fokus kepada legislasi daerah dengan program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. Program tersebut memiliki 3 indikator utama yaitu indikator PERDA yang ditetapkan; indikator RAPERDA yang disetujui DPRD dan indikator Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti.

Dibandingkan dengan target tahun 2019 maupun target akhir RPJMD, terdapat 1 indikator yang telah tercapai dan 2 indikator yang tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai yaitu PERDA yang ditetapkan; dan indikator RAPERDA yang disetujui DPRD. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Sekretariat Dewan

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Legislasi Daerah											
Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah											
PERDA yang ditetapkan	Dok	10	15	15	15	8 dok	11 dok	73,33		73,33	
RAPERDA yang disetujui DPRD	Dok	16	75	75	75	44%	50%	66,67		66,67	
Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Dok	45	100	100	100	100%	100%	100		100	

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan
Tercapai



Target Akhir
RPJMD Perlu
Upaya Keras

35. Urusan Pengawasan

Urusan pengawasan terdiri dari 2 program dan 6 indikator. Dibandingkan dengan target tahun 2020 semua indikator berstatus belum mencapai target, yaitu realisasi hingga tahun 2002 belum mencapai 100%.

Jika di bandingkan dengan target RPJMD, masih ada 5 indikator yang berstatus akan tercapai yaitu realisasi capaian hingga tahun 2020 belum mencapai 100% dan 1 indikator telah tercapai yaitu realisasi capaian hingga tahun 2020 telah

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021



mencapai 100%. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Pengawasan

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja		% Capaian Tahun 2020		% Capaian Target Akhir RPJMD	
			2019	2020		2019	2020	%	Status	%	Status
Pengawasan											
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH											
Persentase obyek pemeriksaan yang diperiksa	%	30	80	90	100	58,76	86,36	95,96%	↓	86,36%	▶
Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan aparat pengawas eksternal											
§ APIP	%	80	95	95	95	71,05	82,72	87,07%	↓	87,07%	▶
§ BPK	%	80	95	95	95	84,26	85,57	90,07%	↓	90,07%	▶
Persentase penurunan aduan masyarakat	%	60	40	35	30	22,12	31,4	89,71%	↓	104,67%	●
Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan											
Tingkat maturitas SPIP	Level	Level 1	Level 3	Level 4	Level 4	masih proses penilaian BPKP	Level 3	75%	↓	75%	▶
Tingkat kapabilitas APIP	Level	Level 1	Level 3	Level 4	Level 4	masih proses penilaian BPKP	Level 3	75%	↓	75%	▶

Keterangan:



Target 2020 Tercapai



Target 2020 Tidak Tercapai



Target Akhir RPJMD
Telah Tercapai



Target Akhir RPJMD Akan
Tercapai



Target Akhir
RPJMD Perlu
Upaya Keras



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Perubahan Kondisi dan Asumsi Perekonomian

3.1.1 Perekonomian Nasional

Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi, Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70 persen. Sementara, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71 persen.

Pertumbuhan ekonomi triwulan tahun 2020 terkontraksi sebesar 2,19 persen, mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Faktor yang menjadi pendorong perbaikan adalah relaksasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah. Sebagian aktivitas masyarakat, seperti aktivitas perkantoran, produksi, dan pariwisata dapat mulai berjalan kembali, meski masih di bawah kondisi sebelum pandemi. Kembali terkontraksinya pertumbuhan ekonomi memastikan Indonesia mengalami resesi.

Hampir semua provinsi mengalami kontraksi pada tahun 2020, kecuali Provinsi Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah. Pertumbuhan Ekonomi 2020 didorong oleh Kawasan Timur Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Wilayah Sulawesi didorong oleh pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah seiring dengan meningkatnya produksi baja dan besi. Pertumbuhan di Maluku dan Papua didorong oleh pertumbuhan positif di Maluku Utara (seiring dengan beroperasinya smelter pirometalurgi) dan Papua (seiring dengan peningkatan produksi tembaga). Kontraksi di Wilayah Jawa disebabkan oleh kontraksi pada sektor transportasi & pergudangan serta akomodasi mamin akibat adanya kebijakan pembatasan mobilitas penduduk akibat pandemi. Kontraksi pertumbuhan di pulau Bali – Nusra disebabkan oleh kontraksi yang dalam di Provinsi Bali (-9,3 persen, yoy) seiring dengan tekanan yang besar di sektor pariwisata sebagai dampak pembatasan mobilitas akibat pandemi. Kontraksi pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sumatera disebabkan oleh dalamnya kontraksi di provinsi Kepulauan Riau (-3,8%, yoy) seiring dengan turunnya kinerja sektor transportasi & pergudangan. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Wilayah Kalimantan disebabkan oleh penurunan kinerja industri di seluruh provinsi Kalimantan. Kontraksi di Wilayah Jawa disebabkan



oleh kontraksi pada sektor transportasi & pergudangan serta akomodasi mamin akibat adanya kebijakan pembatasan mobilitas penduduk akibat pandemi.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2021 diproyeksikan sebesar 5,0%. Dilihat dari Konsumsi rumah tangga, meningkatnya pengangguran dan turunnya pendapatan pekerja akan berdampak pada lambatnya pemulihan konsumsi rumah tangga, meski alokasi bansos yang masih besar akan membantu. Dari sisi investasi/PMTB. Pada tahun 2021, investasi masih lemah disebabkan oleh: tingginya ketidakpastian karena COVID-19 masih tinggi akan menahan investasi, kapasitas produksi yang saat ini masih pada kisaran 70%, neraca perusahaan, baik domestik maupun global, yang masih mengalami tekanan, dan potensi realokasi belanja modal lebih besar, untuk pemenuhan kebutuhan vaksin. Konsumsi pemerintah pada tahun 2021 diperkirakan masih akan tinggi seiring dengan program vaksinasi dan stimulus PEN yang direncanakan masih besar. Ekspor diperkirakan akan mengalami akselerasi pada tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi global yang didorong oleh China dan negara maju yang telah memulai program vaksinasinya. Kinerja impor diperkirakan masih lemah seiring dengan proses pemulihan ekonomi yang masih berjalan.

Perubahan asumsi dasar ekonomi makro nasional tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2021

No	Pertumbuhan YoY (Persen)	Proyeksi Tahun 2021
1	PDB	5,0
2	Konsumsi Rumah Tangga	4,7
3	Konsumsi LNPRT	
4	Konsumsi Pemerintah	6,2
5	Pembentukan Modal Tetap bruto	6,4
6	Ekspor Barang dan Jasa	4,5
7	Impor Barang dan Jasa	5,9

Sumber: RKP Tahun 2022

3.1.2 Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2021 diperkirakan akan lebih baik dibanding 2020. Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 didorong oleh seluruh komponen pengeluaran. Konsumsi rumah tangga meningkat didorong keyakinan konsumen yang membaik disertai masuknya hari besar keagamaan nasional. Sementara, peningkatan investasi sejalan prospek investasi pabrik baru dan akselerasi pembangunan proyek strategis. Sementara pada sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada



lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan berlanjut secara gradual. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya perekonomian global serta akselerasi realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemajuan dalam program restrukturisasi kredit, serta berlanjutnya stimulus moneter Bank Indonesia. Dari sisi mobilitas, perkembangan terakhir menunjukkan mobilitas masyarakat Jawa Tengah mengalami peningkatan saat pelonggaran pembatasan sosial dilakukan.

Dari sisi pengeluaran, perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan terus berlanjut pada tahun 2021. Konsumsi rumah tangga meningkat di tengah bulan puasa dan hari raya Idul Fitri, serta hari besar keagamaan lainnya. Keyakinan konsumen pun membaik didorong agresivitas pemerintah dalam mendistribusikan vaksin. Konsumsi nonpangan bergerak lebih tinggi karena ada dukungan keringanan pajak penjualan kendaraan. Prospek investasi pabrik baru yang mengarah ke kawasan industri, diperkirakan akan mulai dibangun pada tahun 2021. Selain itu, pembangunan proyek strategis nasional akan semakin intens dilakukan, demi mengejar target percepatan pembangunan. Ekspor luar negeri akan semakin meningkat seiring permintaan global yang semakin baik.

Konsumsi diperkirakan meningkat pada 2021 sejalan perbaikan pendapatan dan keyakinan masyarakat. Perkiraan konsumsi rumah tangga yang membaik didukung oleh perbaikan sisi pendapatan yang antara lain bersumber dari keberlanjutan stimulus fiskal dalam bentuk perlindungan sosial pada 2021 yang menopang daya beli masyarakat. Daya beli juga ditopang oleh kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2021 bervariasi mulai 0,75% hingga 3,68%, yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Tengah pada November 2020. Pemulihan konsumsi turut didukung oleh optimisme konsumen yang membaik, terutama optimisme perbaikan pendapatan yang tercermin antara lain dari peningkatan indeks ekspektasi konsumen sebesar 133,4 pada Januari 2021. Selain itu, ekspektasi masyarakat juga membaik seiring optimisme vaksinasi yang meluas di akhir 2021.

Pemulihan investasi Jawa Tengah diperkirakan berlanjut pada 2021. Investasi berpotensi meningkat seiring membaiknya indeks ekspektasi kegiatan usaha di Januari 2021 menjadi 116,3, termasuk pembangunan infrastruktur lainnya. Daya saing investasi Jawa Tengah yang cukup baik bersumber dari tenaga kerja yang kompetitif dan kawasan industri di berbagai daerah. Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) menargetkan pembangunan investasi baru di kawasan industri di Jawa Tengah terjadi di triwulan II 2021. Hal tersebut pada gilirannya akan meningkatkan keyakinan berusaha sehingga mendorong investasi yang juga berperan penting dalam



penyerapan lapangan kerja dan perekonomian Jawa Tengah. Perbaikan kinerja investasi pada 2021 turut ditopang oleh berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur setelah sempat tertunda pada 2020. Pembangunan proyek infrastruktur 2021 akan difokuskan pada infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar seperti pembangunan bendungan, jalan tol, serta pembangkit listrik.

Perbaikan kinerja ekspor turut mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi Jawa Tengah pada 2021. Perbaikan perekonomian global yang diperkirakan berlanjut pada negara tujuan ekspor Jawa Tengah, mendorong perbaikan ekspor. Perkiraan volume perdagangan dunia dan harga komoditas global yang lebih baik, mengindikasikan prospek permintaan global yang meningkat. Optimisme peningkatan ekspor tersebut sejalan dengan karakteristik komoditas ekspor Jawa Tengah yang memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, furnitur, hingga makanan. Seperti ekspor komoditas alas kaki yang sedang dalam tren meningkat didorong aktivitas event olahraga berskala internasional yang berlangsung dalam periode mendatang.

Lapangan usaha utama seperti industri pengolahan; konstruksi; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, akan membaik. Sejalan dengan pemulihan permintaan domestik dan global, produksi industri Jawa Tengah diperkirakan mengalami peningkatan baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Pelaku usaha mencatat peningkatan permintaan yang bersumber dari penundaan order di 2020, semakin tinggi di tahun 2021. Dengan akselerasi produksi industri, sektor perdagangan juga akan meningkat. Tidak hanya bersumber dari perdagangan luar negeri, peningkatan juga didorong peningkatan konsumsi domestik di wilayah Jawa Tengah dan provinsi lain mitra dagang. Aktivitas konstruksi diperkirakan akan meningkat di awal tahun seiring mulai bergeraknya pembangunan infrastruktur.

Lapangan usaha terdampak COVID-19 diperkirakan akan membaik di tahun 2021. Lapangan usaha industri pengolahan menjadi motor utama perbaikan ekonomi. Permintaan global dan domestik yang membaik, membuat produksi industri utama Jawa Tengah meningkat. Sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), furnitur, makanan dan minuman, dan farmasi, akan tumbuh lebih baik. Permintaan domestik dari produk TPT untuk kebutuhan penanganan COVID-19 akan berlanjut, antara lain masker, alat pelindung diri, dan produk pendukung bantuan sosial. Relokasi pabrik ke Jawa Tengah akan semakin menambah peningkatan produksi industri pengolahan Jawa Tengah.

Perbaikan industri dan pergerakan masyarakat, mendorong perbaikan sektor perdagangan. Perdagangan kendaraan bermotor akan kembali menggeliat setelah penurunan yang terjadi pada tahun 2020. Penjualan kebutuhan tersier tersebut didukung kebijakan pemerintah berupa diskon pajak penjualan barang mewah



(PPnBM) pada golongan kendaraan tertentu. Sektor ritel akan membaik tidak hanya dari komoditas makanan dan minuman, tetapi juga komoditas sandang dan peralatan rumah tangga. Perdagangan alat kesehatan disertai obat-obatan, diperkirakan masih akan meningkat di tahun 2021.

Selanjutnya, lapangan usaha konstruksi juga membaik di 2021. Meningkatnya aktivitas konstruksi terutama bersumber dari pembangunan proyek infrastruktur. Pembangunan yang tertunda di tahun 2020 akan dilaksanakan di tahun 2021. Selain dari sektor pemerintah, pihak swasta juga diperkirakan meningkatkan aktivitas investasi bangunan. Pembangunan pabrik baru untuk meningkatkan kapasitas produksi, akan banyak dilakukan pada industri unggulan Jawa Tengah.

Pemulihan ekonomi secara gradual, akan memberikan dampak positif terhadap pariwisata Jawa Tengah. Sektor transportasi akan meningkat di tahun 2021 seiring pulihnya sektor pariwisata, konsumsi domestik, dan perjalanan bisnis. Destinasi wisata diperkirakan akan semakin ramai di tahun 2021 sehingga meningkatkan tingkat hunian hotel dan restoran. Peningkatan kinerja akomodasi tidak hanya bersumber dari wisatawan, tetapi juga dari pebisnis yang meningkatkan aktivitas ekspansi usahanya di 2021 serta kegiatan meeting, incentive, convention and exhibition (MICE) lainnya.

Kehadiran vaksin COVID-19 menjadi penting di tahun 2021 sehingga dapat meminimalkan tingkat kekhawatiran masyarakat dalam beraktivitas. Stimulus yang dilakukan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, diharapkan menjadi faktor pendukung dan berpengaruh positif pada perekonomian 2021.

Namun demikian beberapa risiko yang perlu diwaspadai berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian antara lain: (i) efektifitas vaksin dalam membangun *herd immunity* di bawah perkiraan sehingga berdampak pada mobilitas dan produktivitas rumah tangga; (ii) kebijakan pembatasan sosial di global dan domestik, berlangsung lebih lama dari perkiraan; (iii) terbatasnya konsumsi barang tahan lama dan rekreasi pada masyarakat golongan menengah atas; serta (iv) dampak sosial yang meluas akibat penurunan pendapatan sehingga meningkatkan angka kriminalitas.

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada tahun 2021 diperkirakan mengalami peningkatan. Faktor utama yang diperkirakan mendorong peningkatan laju inflasi berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, Dan Tembakau; Kelompok Transportasi; serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya.

Perubahan asumsi ekonomi Makro Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 tercantum pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Perubahan Asumsi Ekonomi Makro Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021



No	Indikator	RKPD 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,4-5,8
2	PDRB per kapita (Rupiah)	28,5
3	Inflasi (Persen)	3,0+1
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	4,33
5	Kemiskinan (Persen)	9,81
6	Rasio Gini	0,32

Sumber: RKPD Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah

3.1.3 Perekonomian Kabupaten Grobogan

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian daerah nasional dan Provinsi Jawa Tengah, kondisi ekonomi makro Kabupaten Grobogan juga diproyeksikan mengalami perbaikan. Dari sisi lapangan usaha, jenis lapangan usaha yang kinerja diharapkan terus meningkat adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor industri pengolahan; dan sektor pertanian. Berbagai sektor yang terkena dampak akibat Pandemi Covid-19 seperti jasa pendidikan, industri pengolahan, akomodasi dan makan minum diharapkan dapat pulih kembali mulai tahun 2021. Hal ini seiring dengan rencana dibukanya kembali proses pembelajaran tatap muka di sekolah, dan telah dibukanya obyek wisata dan pusat perdagangan.

Konsumsi rumah tangga akan meningkat didorong keyakinan konsumen yang membaik dan agresivitas pemerintah dalam mendistribusikan vaksin. Selain itu pelonggaran pembatasan sosial pada tahun 2021 akan berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi masyarakat yang akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian daerah.

Konsumsi pemerintah pada tahun 2021 diproyeksikan masih terbatas, karena adanya kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka pengadaan vaksin. Investasi swasta diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan keyakinan berusaha. Investasi pemerintah akan kembali meningkat dengan adanya pembangunan infrastruktur pada tahun 2021 yang setelah sempat tertunda pada tahun 2020.

Perkembangan kondisi dan proyeksi ekonomi makro Kabupaten Grobogan tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Perubahan Asumsi Ekonomi Makro Kabupaten Grobogan
Tahun 2021

No	Indikator	Satuan	2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,0+1
2	Inflasi	%	2,71
3	Persentase Penduduk Miskin	%	11,96



No	Indikator	Satuan	2021
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,2
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,91

3.2 Perubahan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

A. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Memperhatikan kondisi perekonomian daerah dan realisasi keuangan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan Juni 2021, maka kebijakan pendapatan dalam Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan bulan juni (Triwulan II) tahun 2021;
 - b. Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan dampak Pandemi COVID-19 terhadap setiap unsur pendapatan asli daerah;
 - c. Penyesuaian berdasarkan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Milik Daerah Tahun 2020;
 - d. Penyesuaian berdasarkan saldo Kas BLUD Tahun Anggaran 2020.
2. Penyesuaian Pendapatan Dana Transfer dari pemerintah Pusat meliputi:
 - a. Penyesuaian terhadap dana transfer dan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya.
 - b. Penyesuaian atas DBHCHT berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.
2. Penyesuaian pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi:
 - a. Penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.

B. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Adapun Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.



Kebijakan masing-masing jenis belanja dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 secara rinci sebagai berikut:

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Pegawai

belanja pegawai pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 dilakukan penyesuaian untuk gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

- 2) Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Perubahan pengalokasian belanja barang dan jasa dalam perubahan APBD tahun anggaran 2021 mengacu pada:

- a) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
- c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya.

- 3) Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga akan menampung kewajiban bunga pinjaman daerah yang pada Tahun 2021 merupakan Tahun terakhir, ditambah bunga rencana pinjaman daerah Tahun 2021.

- 4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi sebagaimana digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik



swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5) Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mulai Tahun Anggaran 2021 pemberian hibah baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada SKPD berkenaan. Belanja hibah pada tahun 2021 terutama diarahkan untuk pemulihan dampak pandemic covid 19.

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mulai Tahun Anggaran 2021 pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada SKPD berkenaan. Belanja bantuan sosial pada tahun 2021 terutama diarahkan untuk pemulihan dampak pandemic covid 19.

b. Belanja Modal



Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pengembangan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Dan Layanan Dasar Permukiman. Perubahan alokasi belanja modal dalam perubahan APBD tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease2019 (Covid-19) Dan Dampaknya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Didalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak / retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak / bukan pajak dari pemerintah pusat.

C. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 diarahkan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dilakukan penyesuaian Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020;

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah.

Secara rinci perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2021 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2021

NO	URAIAN	APBD 2021	RKPD PERUBAHAN	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	2.544.323.903.138	2.565.297.167.501	

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2021**



NO	URAIAN	APBD 2021	RKPD PERUBAHAN	KET
1. 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	323.157.571.138	346.952.241.488	
1. 1. 1	Pendapatan Pajak Daerah	97.075.000.000	96.770.000.000	
1. 1. 2	Hasil Retribusi Daerah	13.871.316.993	11.602.328.020	
1. 1. 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.367.030.536	23.374.807.000	
1. 1. 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	195.844.223.609	215.205.106.468	
1. 2	PENDAPATAN TRANSFER	2.073.636.032.000	2.069.596.566.013	
1. 2. 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.877.763.753.000	1.852.847.032.117	
1. 2. 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	195.872.279.000	216.749.533.896	
1. 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	147.530.300.000	148.748.360.000	
1. 3. 1	Pendapatan Hibah	8.500.000.000	8.500.000.000	
1. 3. 2	Dana Darurat	0	0	
1. 3. 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	139.030.300.000	140.248.360.000	
2	BELANJA DAERAH	2.497.512.969.115	2.595.172.094.501	
2. 1	BELANJA OPERASI	1.738.856.110.417	1.839.239.182.779	
2. 1. 1	Belanja Pegawai	1.008.305.082.456	962.053.499.785	
2. 1. 2	Belanja Barang dan Jasa	619.502.623.959	762.578.146.442	
2. 1. 3	Belanja Bunga	414.165.000	414.165.000	
2. 1. 4	Belanja Subsidi	0	0	
2. 1. 5	Belanja Hibah	92.150.699.502	93.175.580.802	
2. 1. 6	Belanja bantuan Sosial	18.483.539.500	21.017.790.750	
2. 2	BELANJA MODAL	309.472.374.394	309.394.709.005	
2. 2. 1	Belanja Tanah	0	365.940.000	
2. 2. 2	Belanja Peralatan dan Mesin	55.983.811.138	56.980.299.740	
2. 2. 3	Belanja Bangunan dan Gedung	116.393.631.053	114.388.475.826	
2. 2. 4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	136.708.553.203	132.046.628.703	
2. 2. 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	386.379.000	5.613.364.736	
2. 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.811.014.405	24.416.109.815	
2. 3. 1	Belanja Tidak terduga	23.811.014.405	24.416.109.815	
2. 4	BELANJA TRANSFER	425.373.469.899	422.122.092.902	
2. 4. 1	Belanja Bagi Hasil	11.094.631.699	10.837.232.802	
2. 4. 2	Belanja Bantuan Keuangan	414.278.838.200	411.284.860.100	
	Total Surplus/(Defisit)	46.810.934.023	(29.874.927.000)	
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3. 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	26.499.002.977	103.184.864.000	
3. 1. 1	SilPA	26.499.002.977	103.184.864.000	
3. 1. 2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	
3. 1. 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	0	0	
3. 1. 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	
3. 1. 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	
3. 1. 6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	0	0	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2021



NO	URAIAN	APBD 2021	RKPD PERUBAHAN	KET
3. 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	73.309.937.000	73.309.937.000	
3. 2. 1	Penyertaan Modal Daerah	21.249.628.000	21.249.628.000	
3. 2. 2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	52.060.309.000	52.060.309.000	
3. 2. 3	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3. 2. 4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	
3. 2. 5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	0	0	
	PEMBIAYAAN NETTO	(46.810.934.023)	29.874.927.000	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (DEFISIT SETELAH PEMBIAYAAN)	(0)	(0)	



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam perubahan RKPD tahun 2021 tetap diarahkan pada sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2021. Tema Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2021 yaitu: **"Percepatan pemulihan perekonomian didukung penguatan ketahanan pangan berbasis lingkungan hidup menuju masyarakat sejahtera"**.

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Grobogan tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah *"Rakyat Semangat, Ekonomi Kuat"*

Fokus pembangunan:

- a. Perluasan lapangan kerja melalui investasi didukung penyederhanaan proses perizinan, iklim investasi yang kondusif, peningkatan infrastruktur penunjang investasi, dan promosi investasi terarah.
- b. Pengembangan kewirausahaan dan Pemulihan industri mikro dan kecil (pemulihan rantai pasok, peningkatan keterampilan SDM, restrukturisasi permesinan, dan peningkatan standar produk)
- c. Pemulihan industri dan usaha perdagangan dengan memanfaatkan teknologi digital (industri 4.0), melalui peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam pemasaran melalui e-commerce, dan peningkatan diversifikasi produk dan inovasi teknologi produksi.
- d. Pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui peningkatan aksesibilitas wisata, peningkatan pemasaran wisata, peningkatan event, dan percepatan kesiapan destinasi dengan meningkatkan aksesibilitas dan pemenuhan sarana dan prasarana wisata, perbaikan sistem manajemen pengelolaan wisata, peningkatan kompetensi pelaku usaha wisata, dan sinergi kerjasama dengan stakeholder pariwisata, dan penguatan *branding* pariwisata.
- e. Peningkatan produksi perikanan melalui pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya



- f. Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan melalui penyedia sarana dan prasarana produksi serta memberdayakan kelompok tani
- g. Peningkatan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan melalui pengendalian atas ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang BISA (berimbang, beragam, sehat, dan aman).
- h. Peningkatan keberlanjutan kehidupan (*livelihood*) penduduk miskin dengan pengembangan keterampilan kewirausahaan, pemberdayaan usaha ekonomi, fasilitasi akses permodalan usaha, dan peningkatan keterampilan dan fasilitasi penempatan kerja.
- i. Peningkatan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan, dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa.

2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Menuju "Masyarakat Sehat dan Generasi yang Smart"

Fokus pembangunan:

- a. Peningkatan status gizi masyarakat untuk mengurangi balita stunting (pendek dan sangat pendek) dan kurang gizi.
- b. Penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan masyarakat yang berkualitas didukung kompetensi tenaga kesehatan, penciptaan inovasi dan pemanfaatan teknologi, dan pengembangan Puskesmas/Rumah Sakit Ramah Anak dan Lansia.
- c. Penguatan Germas (promotif dan preventif) mencakup penggunaan air bersih, sanitasi, cuci tangan pakai sabun, olahraga, kesehatan lingkungan, kawasan sehat, dan pengelolaan limbah medis dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular, termasuk covid-19.
- d. Penguatan health security: Kemampuan untuk prevent, detect, response: Pospintu masuk (KKP); Sistem peringatan dini (alert system), surveilans penyakit real time, kapasitas dan jejaring laboratorium, kapasitas SDM, protokol dan tata laksana respon cepat, litbang; Perluasan case detection, skrining, karantina kesehatan.
- e. Penguatan sumberdaya: fasilitas, farmasi, alat kesehatan dan SDM kesehatan, melalui pemenuhan fasilitas dan alkes Rumah Sakit dan Puskesmas sesuai kelas dan sistem rujukan; pemenuhan dokter dan 9 jenis nakes di puskesmas; Pemenuhan vaksin dan obat (Pneumonia, TB, HIV/AIDS).
- f. Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui optimalisasi pelaksanaan program Keluarga Berencana, dan penguatan tata kelola administrasi kependudukan
- g. Pemenuhan layanan dasar pendidikan yang berkualitas didukung kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, dan pemenuhan sarana pendidikan sesuai standar, serta pengembangan sistem pembelajaran yang mengarah pada peningkatan kompetensi, *knowledge* dan kephahaman peserta didik terhadap



teknologi sehingga tercipta smart people dalam kerangka pengembangan Smart City.

- h. Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah dengan pendataan tepat, penjangkauan dan pendampingan, dan gerakan kembali bersekolah.
- i. Revitalisasi pendidikan kesetaraan untuk menunjang peningkatan rata-rata lama sekolah.
- j. Peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas masyarakat sejak usia dini.
- k. Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- l. Peningkatan pemenuhan hak anak dan kualitas hidup perempuan
- m. Penguatan kualitas dan karakter pemuda serta peningkatan prestasi dan budaya olahraga dikalangan masyarakat
- n. Peningkatan wawasan kebangsaan, revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila dikalangan pemuda dan tokoh masyarakat
- o. Peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, serta peningkatan kerjasama dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial
- p. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- q. Peningkatan SDM yang mempunyai keahlian dasar dan ahli dalam bidang TIK guna mewujudkan transformasi digital.

3. Penanggulangan Kemiskinan melalui "*Geber Taskin (Gerakan Bersama Berantas Kemiskinan)*"

Fokus pembangunan:

- a. Peningkatan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka pemulihan pasca Pandemi Covid-19 dan kerentanan sosial lainnya, dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
- b. Penyediaan beasiswa pendidikan bagi anak dari keluarga miskin
- c. Peningkatan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin
- d. Pemberdayaan usaha mikro dan kecil bagi keluarga miskin
- e. Peningkatan kompetensi dan penempatan tenaga kerja dari keluarga miskin

4. Pengembangan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana "*Berhias Kotaku, Tangguh Groboganku*"

Fokus pembangunan:

- a. Peningkatan akses sanitasi (air limbah dan sampah) dan air bersih yang layak dan aman.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana umum dan penataan kawasan kumuh, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni penduduk miskin.



- c. Lanjutan penataan wajah kota meliputi pedestrian, sistem drainase dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- d. Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, serta penataan sistem angkutan umum perkotaan (revitalisasi terminal tipe C dan Penataan jaringan trayek angkutan kota) guna mendukung angkutan umum massal Kawasan aglomerasi perkotaan (BST Trans Jateng) Koridor Semarang-Gubug.
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan bangunan penampung air dalam menunjang produktivitas pertanian.
- f. Pengendalian alih fungsi lahan sesuai dengan rencana tata ruang.
- g. Peningkatan kesiapsiagaan di masa pra-bencana dengan memperkuat manajemen bencana berbasis masyarakat; meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana, terutama untuk ancaman bencana kesehatan seperti peningkatan kapasitas APD dan rumah sakit; dan menyusun rencana kontijensi, rencana operasi, dan strategi lainnya.
- h. Penguatan sistem operasi tanggap darurat dengan memperkuat manajemen krisis terpadu dan multisektor; memperkuat sistem data bencana terpadu dan satu referensi, dan memperkuat sistem logistik (terutama pangan) dan jaring pengaman sosial.
- i. Percepatan penanganan pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta pemulihan kehidupan masyarakat.
- j. Peningkatan cakupan layanan dan kualitas pengelolaan dan pengurangan sampah di wilayah perkotaan.
- k. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan untuk menunjang kelancaran distribusi orang, barang dan jasa.
- l. Peningkatan kualitas tata kelola dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup kualitas lingkungan hidup.

5. Penguatan Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien guna mendukung pelayanan publik dan kinerja pembangunan daerah “ASN yang Smart dan Birokrasi yang Melayani”

Fokus pembangunan:

- a. Pengembangan kompetensi menuju Smart ASN, dan pola karir berbasis merit system.
- b. Peningkatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Open Government (pemerintahan yang terbuka) dengan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan sistem manajemen terintegrasi.
- c. Peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR!
- d. Pengembangan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel



- e. Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis data kemiskinan dan kependudukan.
- f. Peningkatan penerapan e-Arsip terintegrasi pada perangkat daerah
- g. Penguatan kapasitas fiskal dan pengelolaan keuangan dan aset sesuai standar
- h. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan sistem pengawasan yang efektif.
- i. Penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif dengan penerapan standar pelayanan publik pada seluruh unit pelayanan publik.

Penjabaran prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan tahun 2021 kedalam program pembangunan disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut.



Tabel 4.1
Penjabaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2021
Kedalam Program Pembangunan

No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2021	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2021
1.	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah " <i>Rakyat Semangat, Ekonomi Kuat</i> "				
	a. Perluasan lapangan kerja melalui investasi didukung penyederhanaan proses perizinan, iklim investasi yang kondusif, peningkatan infrastruktur penunjang investasi, dan promosi investasi terarah.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		
		Program Pelayanan Penanaman Modal	· PMA	Perusahaan	6
			· PMDN	Perusahaan	44
			Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		
			· PMA	ribu Us \$	71.430
			· PMDN	Juta Rp	5.884.964
			Jumlah perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal yang keluarkan BPPT	Jumlah	3950
			Jumlah jenis perijinan dan non perijinan investasi yang dilayani BPPT	Jenis	52
			Persentase waktu pelayanan PTSP ditetapkan maksimal 7 hari kerja	%	100
			Penerapan Sistem Manajemen Mutu 9001 : 2008 dan Implementasi sistem mutu ISO 9001 : 2008	paket	1
			Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp(000)	40.000.000
		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Jenis	1
			Jumlah fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	kali	1
			Jumlah promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	kali	3



No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2021	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2021
	b. Pengembangan kewirausahaan dan Pemulihan industri mikro dan kecil (pemulihan rantai pasok, peningkatan keterampilan SDM, restrukturisasi permesinan, dan peningkatan standar produk)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri	%	1,35
			Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	3,46
			Persentase industri kecil dan menengah	%	99,97
			Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0,21
			Cakupan pembinaan unit Usaha IKM	%	2,1
			Persentase sentra industri yang berkembang	%	89,42
			Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM	%	16,75
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Jumlah Usaha mikro kecil Menengah (UMKM)	Unit	30.000
			Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0
			· % UKM yang mengakses permodalan	%	94
			Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	90,5
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	· % koperasi yang mengakses permodalan	%	1,28
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi	Unit	684
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif	%	93,22
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase KSP/USP sehat	%	
	c. Pemulihan industri dan usaha perdagangan dengan memanfaatkan teknologi digital (industri 4.0), melalui peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam pemasaran melalui e-commerce, dan peningkatan diversifikasi produk dan	Program Pengembangan Ekspor	Perkembangan nilai ekspor	Rp. (000)	145.618.813
			Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	23,65
			Produk yang bisa diterima pasar internasional	Produk	4
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	50,00
			Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	68,00
			Jumlah pasar daerah	%	16



No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2021	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2021
	inovasi teknologi produksi.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pasar yang diawasi	%	16,50
			Tingkat Pengaduan yang ditangani	%	95,00
	d. Pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui peningkatan aksesibilitas wisata, peningkatan pemasaran wisata, peningkatan event, dan percepatan kesiapan destinasi dengan meningkatkan aksesibilitas dan pemenuhan sarana dan prasarana wisata, perbaikan sistem manajemen pengelolaan wisata, peningkatan kompetensi pelaku usaha wisata, dan sinergi kerjasama dengan stakeholder pariwisata, dan penguatan <i>branding</i> pariwisata.	Program Pemasaran Pariwisata.	Kunjungan wisata	orang	375.000
			Jumlah kajian pengembangan wisata	dokumen	3
			Jumlah regulasi bidang kepariwisataan (Perda dan Perbup)	Perda / Perbup	3
			Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,93
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.	Jumlah destinasi wisata unggulan	unit	9
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.	Jumlah restoran dan rumah makan	unit	50
			Jumlah penginapan/hotel	unit	23
			Jumlah desa wisata	desa	23
			Jumlah Pokdarwis	kelompok	23
	e. Peningkatan produksi perikanan melalui pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.	Produksi perikanan Tangkap	kg	1.201.619
			Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	18
			Tingkat cakupan bina kelompok ikan	%	20,00
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.	Produksi perikanan budidaya	kg	2.587.662
			Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	kelompok	45
			Tingkat cakupan bina kelompok ikan	%	90,00
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.	Tingkat konsumsi makan ikan	kg/kap/ th	15,38
			Jumlah produksi hasil olahan ikan	kg	298880



No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2021	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2021
f.	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan melalui penyedia sarana dan prasarana produksi serta memberdayakan kelompok tani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian.	Jumlah usaha pengolahan ikan	Unit	90
			Produktivitas Tanaman perkebunan	%	2,93
			Jumlah Produksi Tebu	Ton	136.422
			Jumlah Produksi Kelapa	Ton	35
			Jumlah Produksi Tembakau	Ton	2.832,45
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkebunan	Unit	140
			Jumlah Kelompok Tani Perkebunan yang Dibina	Klp	27
			Luas lahan kritis	Ha	100
			Produksi tanaman pangan		
			- Padi	Ton	788924
			- Jagung	Ton	695584
			- Kedelai	Ton	50660
			Produksi komoditas hortikultura		
			- Bawang merah	Kw	57666
			- Cabe Besar	Kw	11526
			- Cabe Rawit	Kw	29070
			- Semangka	Kw	137469
			- Jambu air	Kw	14149
			- Belimbing	Kw	7596
			- Pisang	Kw	432369
			- Melon	Kw	118939
			Jumlah aplikasi dan adopsi teknologi baru	Unit	6
			Jumlah promosi komoditi pertanian dan hortikultura	Kali	21
			Peningkatan kualitas pasca panen komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	%	15
			Jumlah kelompok tani yang mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	Kelompok Tani	20
			Jumlah kemitraan yang terjalin	Kelompok	16



No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2021	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2021
				tani	
			Populasi komoditas peternakan utama		
			- Sapi potong	ekor	201.082
			- Kerbau	ekor	2.767
			- Kambing	ekor	132.612
			- Domba	ekor	20.560
			- Unggas (Ayam)	ekor	2.571.891
			Meningkatnya produksi daging (kg)		
			- Sapi potong	kg	1.848.169
			- Kerbau	kg	127.391
			- Kambing	kg	830.320
			- Domba	kg	119.263
			- Unggas (Ayam)	kg	2.108.757
			Jumlah promosi produk peternakan	kali	22
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	Capaian Inseminasi Buatan Sapi Potong	Dosis	83.000
			Capaian Kelahiran hasil IB	ekor	50.500
			Pengembangan Biogas	unit	12
		Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani	Kelompok Tani	1600
			Jumlah kelompok tani Utama	Kelompok Tani	190
			Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Pertanian yang berbadan hokum	LKM	110
	g. Peningkatan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan melalui pengendalian atas ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan.	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/ kapita/ hari	175
			Ketersediaan protein perkapita	gram/ kapita/	115



No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2021	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2021
	BISA (berimbang, beragam, sehat, dan aman).			hari	
			Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	100
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	90
		Program Penanganan Kerawanan Pangan.	Penguatan cadangan pangan	%	130
			Penanganan daerah rawan pangan	%	100
		Program Pengawasan Keamanan Pangan.	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	100
			Pengawasan dan pembinaan kewanamanan pangan	%	100
	h. Peningkatan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan, dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa.	Program Administrasi Pemerintahan Desa.	RPJMDes	%	100
			Desa yang berprofil	%	100
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.	PKK aktif	%	100
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	81,42
			Posyandu aktif	%	100
			LPM Berprestasi	%	2,64
			Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD)	%	81,42
			Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif (BUMDesa)	%	100
			Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	17,50
			Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	5,00
			Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	%	95,0
2.	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia menuju "Masyarakat Sehat dan Generasi Smart"				
	a. Peningkatan status gizi masyarakat untuk	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Prevalensi balita gizi kurang	%	5,1
			Persentase Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100



No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2021	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2021
	<p>mengurangi balita stunting (pendek dan sangat pendek) dan kurang gizi.</p> <p>b. Penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan masyarakat yang berkualitas didukung kompetensi tenaga kesehatan, penciptaan inovasi dan pemanfaatan teknologi, dan pengembangan Puskesmas/Rumah Sakit Ramah Anak dan Lansia.</p>	Upaya Kesehatan Masyarakat.	Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	%	100
			Cakupan pelayanan anak balita	%	95
			Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	78
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100
			Cakupan RT mengkonsumsi garam beryodium	%	90
			Persentase Balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	%	100
			Persentase Ibu hamil mendapat 90 tablet besi	%	100
			Persentase Balita dengan Kekurangan Energi dan Protein (KEP)	%	0,3
			Persentase BBLR	%	< 4
	c. Penguatan Germas (promotif dan preventif) mencakup penggunaan air bersih, sanitasi, cuci tangan pakai sabun, olahraga, kesehatan lingkungan, kawasan sehat, dan pengelolaan limbah medis dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular, termasuk covid-19.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	95
			Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100
			Rasio posyandu per satuan balita	per 100 Balita	4,5
			Persentase Posyandu purnama dan mandiri	%	60
			Cakupan Rumah Sehat	%	90
			Cakupan penggunaan air bersih		80
			Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM	%	100
	d. Penguatan health security: Kemampuan untuk prevent, detect, response: Pospintu masuk (KKP); Sistem peringatan dini (alert system), surveilans penyakit	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.	Persentase anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap	%	100
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	80
			Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (<i>success rate</i>)	%	100
			Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun	%	< 0,5



No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2021	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2021
	real time, kapasitas dan jejaring laboratorium, kapasitas SDM, protokol dan tata laksana respon cepat, litbang; Perluasan case detection, skrining, karantina kesehatan.		Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral	%	95
			Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	100
			Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	%	100
	e. Penguatan sumberdaya: fasilitas, farmasi, alat kesehatan dan SDM kesehatan, melalui pemenuhan fasilitas dan alkes Rumah Sakit dan Puskesmas sesuai kelas dan sistem rujukan; pemenuhan dokter dan 9 jenis nakes di puskesmas; Pemenuhan vaksin dan obat (Pneumonia, TB, HIV/AIDS).	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman.	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	100
	f. Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui optimalisasi pelaksanaan program Keluarga Berencana, dan penguatan tata kelola administrasi kependudukan	Program Pengendalian Penduduk.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	2,29
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb).	Rasio akseptor KB baru	%	100
			Cakupan peserta KB aktif	%	77,2
			Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun	%	1,83
			Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	9,2
			Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	1000 perempuan	17,64/1000

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2021



No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2021	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2021
				usia 15-19 tahun	
			Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	72,2
			Cakupan KB Pria	%	1,66
			Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	5
			Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	%	100
			Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	%	1,07
			Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) aktif	%	100
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	87,00
			Persentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	%	100
			Persentase desa/ kelurahan yang memiliki kelompok tribina aktif	Aktif	BKB 576, BKR 279, BKL 324
			Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	88,00
			Rasio BKB holistik	%	100
		Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber KTP	%	100,00
		Program Pencatatan Sipil	Rasio Bayi (0-1 tahun) Ber akta kelahiran	%	100,00
			Kepemilikan akta kelahiran	%	100,00
			Kepmilikan KK	%	100,00
			Kepemilikan Akte Kematian	Jiwa	10.614
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Ketersediaan database kependudukan	%	20,00
	g. Pemenuhan layanan dasar	Program Pengelolaan	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	61,79



No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2021	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2021	
	pendidikan yang berkualitas didukung kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, dan pemenuhan sarana pendidikan sesuai standar, serta pengembangan sistem pembelajaran yang mengarah pada peningkatan kompetensi, knowledge dan kepahaman peserta didik terhadap teknologi sehingga tercipta smart people dalam kerangka pengembangan Smart City. h. Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah dengan pendataan tepat, penjangkauan dan pendampingan, dan gerakan kembali bersekolah. i. Revitalisasi pendidikan kesetaraan untuk menunjang peningkatan rata-rata lama sekolah.	Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB	%	106,85	
			Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	100,24	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	%	97,83	
			Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	87,23	
			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0	
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0	
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	
			Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI	%	7,23	
			Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMP/MTs	%	6,05	
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	98,01	
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	73,08	
			Ruang kelas SD/MI kondisi baik	%	56,74	
			Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	%	91,57	
			Rasio guru/murid			
			· SD		22,91	
			· SMP		29,89	
			Penduduk usia >15 tahun melek huruf	%	91,99	
			Persentase penduduk tidak sekolah/tidak lulus mengikuti pendidikan Paket A/B/C	%	5,49	
			Prosentase Sekolah melaksanakan MBS dengan baik	%	100	
			Persentase PAUD terakreditasi	%	5,31	
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	94,48
				Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	52,69
				Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	87,72
				Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	93,13
	j. Peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina	Unit	790	
Jumlah pengunjung perpustakaan daerah dalam satu tahun			Orang	146.000		



No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2021	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2021
	masyarakat sejak usia dini.		Jumlah Buku Koleksi perpustakaan Daerah	Judul	29.253
			Jumah Karya Rekam dan Karya Cetak yang dilestarikan	Eks	200
	k. Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	52
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	75
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	9
		Program Penempatan Tenaga Kerja.	Pencari kerja yang ditempatkan	%	75,38
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,13
		Program Hubungan Industrial.	Keselamatan dan perlindungan	%	100
			Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100
			Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	70
			Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	66
			Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	60
	l. Peningkatan pemenuhan hak anak dan kualitas hidup perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.	Presentase kelembagaan PUG yang aktif	%	85
			Cakupan ketersediaan lembaga pelayanan kekerasan berbasis gender	lembaga	200
		Program Perlindungan Perempuan.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	47,85
			Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	Rupiah	8.264.045
			Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	98
			Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.	Jumlah	65
			Jumlah layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Jumlah	52



No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2021	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2021
			Jumlah penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Jumlah	16
			Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	Jumlah	14
			Jumlah layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah	4
			Jumlah layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah	10
			Jumlah layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Jumlah	20
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga.	Angka Perceraian	Kasus	3635
			Lembaga aktif dalam peningkatan kualitas keluarga	lembaga	3
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha).	Persentase forum anak aktif	%	0,70
			Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	Jumlah	2
		Program Perlindungan Khusus Anak.	Kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	kasus	42
			Jumlah pernikahan usia anak	Jumlah	2300
	m. Penguatan kualitas dan karakter pemuda serta peningkatan prestasi dan budaya olahraga dikalangan masyarakat	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.	Jumlah kegiatan kepemudaan	buah	16
			Persentase Prestasi Pemuda dari delegasi yang diberangkatkan	%	30
			Jumlah organisasi pemuda	buah	25
			Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	orang	1000
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah organisasi olahraga	organisasi	3
			Jumlah klub olahraga	klub	650
			Jumlah Cabang Olahraga Prestasi	cabang	30
			Prosentase Medali yang diperoleh pada even olahraga tingkat Provinsi terhadap jumlah kontingen yang diberangkatkan	%	70



No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2021	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2021
			Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	unit	2
			Jumlah gedung olahraga	unit	20
			Jumlah Lapangan olahraga	unit	1000
	n. Peningkatan wawasan kebangsaan, revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila dikalangan pemuda dan tokoh masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.	Jumlah peserta kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai nasionalisme	Orang	240
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.	Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	%	70,00
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM dan OKP	Orang	270
	o. Peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, serta peningkatan kerjasama dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial	Program Keningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	Prosentase antisipasi konflik sosial	%	100
	p. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Program Pengembangan Kebudayaan.	Jumlah upacara adat tradisional yang dilestarikan	jenis	15
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional.	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	7
			Jumlah Misi Kesenian	kali	3
			Jumlah grup kesenian	kelompok	1435
			Jumlah event budaya di tingkat regional dan nasional yang diikuti	event	18
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100



No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2021	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2021
	q. Peningkatan SDM yang mempunyai keahlian dasar dan ahli dalam bidang TIK guna mewujudkan transformasi digital.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik.	Jumlah Jaringan komunikasi	SKPD	329
			Jumlah penyiaran radio/TV	Radio : kali Televisi : kali	Radio : 19 TV = 17
		Program Aplikasi Informatika.	Prosentase SKPD yg punya Website	%	100
3.	Pengembangan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana " <i>Berhias Kotaku, Tangguh Groboganku</i> "				
	a. Peningkatan akses sanitasi (air limbah dan sampah) dan air bersih yang layak dan aman.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	85
	b. Penyediaan sarana dan prasarana umum dan penataan kawasan kumuh, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni penduduk miskin.	Program Pengembangan Perumahan.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum	%	70
		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh.	Persentase Berkurangnya Permukiman Kumuh di Perkotaan	%	0
			Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	70,00
			Cakupan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	%	50,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.	Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman	%	85,17
	c. Lanjutan penataan wajah kota meliputi pedestrian, sistem drainase dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase.	Persentase wilayah bebas banjir	%	80
			Durasi banjir untuk lokasi	hr	7
			Lokasi banjir	Desa/ Kel	7
			Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun.	% penduduk	58
				%	10,1



No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2021	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2021
				genangan	
			Cakupan drainase lingkungan dalam kondisi baik	%	64
			Cakupan pelayanan Sistem Drainase	%	55
			Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong terbangun	KM	17,85
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	20
	d. Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, serta penataan sistem angkutan umum perkotaan (revitalisasi terminal tipe C dan Penataan jaringan trayek angkutan kota) guna mendukung angkutan umum massal Kawasan aglomerasi perkotaan (BST Trans Jateng) Koridor Semarang-Gubug.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).	Jumlah terminal yang beroperasi	terminal	6
			Persentase ketersediaan terminal angkutan penumpang	%	100
			Rasio ijin trayek	Ratio	0,023
			Persentase tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	75
			Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU)	buah	600
			Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	90
			Persentase kendaraan umum yang memenuhi persyaratan laik jalan	%	99
			Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	95
			Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan	%	85
			Persentase ketersediaan alat pengujian kendaraan bermotor yang laik operasi	%	90
	e. Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan bangunan penampung air dalam menunjang produktivitas pertanian.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).	Rasio Jaringan Irigasi	Km/Ha	0,017
			Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	85
			Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	%	81,4
	f. Pengendalian alih fungsi lahan sesuai dengan rencana tata ruang.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	100



No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2021	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2021
	g. Peningkatan kesiapsiagaan di masa pra-bencana dengan memperkuat manajemen bencana berbasis masyarakat; meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana, terutama untuk ancaman bencana kesehatan seperti peningkatan kapasitas APD dan rumah sakit; dan menyusun rencana kontijensi, rencana operasi, dan strategi lainnya. h. Penguatan sistem operasi tanggap darurat dengan memperkuat manajemen krisis terpadu dan multisektor; memperkuat sistem data bencana terpadu dan satu referensi, dan memperkuat sistem logistik (terutama pangan) dan jaring pengaman sosial. i. Percepatan penanganan pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta pemulihan kehidupan masyarakat.	Program Penanggulangan Bencana.	Persentase wilayah rawan bencana yang telah dipetakan tingkat kerawannya	%	100
			Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang kebencanaan	%	0,306
			Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	70,00
		Program Penanggulangan Kebakaran.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dikabupaten/Kota	%	53,79
			Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK	%	75
			Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	100
			Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK	%	52,63



No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2021	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2021
	j. Peningkatan cakupan layanan dan kualitas pengelolaan dan pengurangan sampah di wilayah perkotaan.	Program Pengelolaan Persampahan.	Prosentase jumlah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah standart 3 R	%	100
			Persentase pengurangan sampah diperkotaan	%	30
			Persentase Pengangkutan sampah	%	44
	k. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan untuk menunjang kelancaran distribusi orang, barang dan jasa.	Program Penyelenggaraan Jalan.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	84,51
			Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	%	100
			Tingkat kualitas jalan lingkungan (jalan tanah menjadi perkerasan paving blok)	%	70
			Persentase jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	%	20,15
	l. Peningkatan kualitas tata kelola dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup kualitas lingkungan hidup.	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.	Presentase Pemantauan status mutu air	%	100
			kegiatan penegakan hukum lingkungan	%	100
			Pencapaian predikat kota bersih / penghargaan Adipura	%	100
			Pemenuhan Sarana Monitoring Polusi	%	100
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Pengelolaan Hidup (PPLH).	Rasio cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	%	60
			Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi	%	100
			Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati teknis pencegahan pencemaran air	%	95
			Jumlah usaha dan / kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi pencegahan pencemaran udara	%	100
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100
4.	Penanggulangan Kemiskinan				



No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2021	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2021
	dengan "Geber Taskin (<i>Gerakan Bersama Berantas Kemiskinan</i>)"				
	a. Peningkatan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka pemulihan pasca Pandemi Covid-19 dan kerentanan sosial lainnya, dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.	Program Pemberdayaan Sosial.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	78,57
			Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	87,5
			Persentase Eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)	%	37,59
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.	Persentase anak terlantar yang dibina	%	14,80
		Program Rehabilitasi Sosial.	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	93,75
			Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Lembaga	32
			Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	100
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	%	72,22
		Program Penanganan Bencana.	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	%	93,00
			Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	7,46
			Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	85,00
	b. Penyediaan beasiswa pendidikan bagi anak dari keluarga miskin	Program Pengelolaan Pendidikan.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB	%	106,85



No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2021	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2021
	c. Peningkatan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin yang sakit	%	100
	d. Pemberdayaan usaha mikro dan kecil bagi keluarga miskin	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi.	Jumlah Koperasi	Unit	684
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi.	Persentase koperasi aktif	%	93,22
		Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian.	% koperasi yang mengakses permodalan	%	1,28
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi.	Persentase koperasi sehat	%	90,00
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM).	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	90,5
			Jumlah Usaha mikro kecil Menengah (UMKM)	Unit	30.000
			Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0
		Program Pengembangan Umkm.	% UKM yang mengakses permodalan	%	94
			Jumlah produk unggulan, andalan, dan potensial daerah	Produk	18
	e. Peningkatan kompetensi dan penempatan tenaga kerja dari keluarga misin	Program Penempatan Tenaga Kerja.	Pencari kerja yang ditempatkan	%	75,38
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,13
5.	Penguatan Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien guna mendukung pelayanan publik dan				



No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2021	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2021
	kinerja pembangunan daerah "ASN yang Smart dan Birokrasi yang Melayani"				
a. Pengembangan kompetensi menuju Smart ASN, dan pola karir berbasis merit system.	Program Kepegawaian Daerah		Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	%	75,00
			Persentase PNS yang menerima SK kenaikan pangkat tepat waktu	%	100
			Persentase PNS yang menerima SK pindah (mutasi) sesuai kebutuhan organisasi	%	100
			Persentase penerbitan SK pensiun tepat waktu	%	100
			Persentase PNS berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya	%	100
			Jumlah data pegawai yang di update	ASN	2500
			Jumlah ASN yang mengikuti seleksi pimpinan tinggi	ASN	50
			Jumlah ASN berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya	ASN	200
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah aparatur yang melanjutkan pendidikan formal	ASN	30
			Persentase pejabat yang telah mengikuti diklatpim (II, III dan IV)	%	80
			Persentase CPNS yang mengikuti diklat pra jabatan sesuai dengan waktu yang ditentukan	%	100
			Jumlah ASN yang mengikuti diklat Teknis fungsional	ASN	300
b. Peningkatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Open Government (pemerintahan yang terbuka) dengan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan sistem manajemen terintegrasi.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik.		Jumlah Jaringan komunikasi	SKPD	329
			Jumlah penyiaran radio/TV	Radio : kali	Radio : 19
				Televisi : kali	TV = 17
			Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui :		
			- Media massa seperti majalah, radio, dan televisi	Majalah : kali / tahun	12
				Dialog radio : kali	45



No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2021	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2021
				/ tahun	
				Siaran TV : kali / tahun	10
			- Media baru seperti website (media online)	setiap hari	setiap hari
			- Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	kali / tahun	3
			- Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	kali / tahun / Kecamatan	1 kali/ 19 Kec.
			- Media luar ruang seperti media bulletin, brosur, spanduk, baliho dll	kali / tahun	3
			Pameran / Exspo	kali / tahun	3
	c. Peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR! d. Pengembangan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel e. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan sistem pengawasan yang efektif.	Program Aplikasi Informatika.	Prosentase SKPD yg punya Website	%	100
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase obyek pemeriksaan yang diperiksa	%	100
			Persentase penurunan aduan masyarakat	%	30
			Tingkat maturitas SPIP	Level	Level 4
			Tingkat kapabilitas APIP	Level	Level 4
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan aparat pengawas eksternal		
			§ APIP	%	95
			§ BPK	%	95
	f. Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis data	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data perencanaan	%	100
			Tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA-PPAS, KUAP-PPASP, dan	%	100

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2021



No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2021	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2021
	kemiskinan dan kependudukan.		TapKin)		
			Tingkat Kelengkapan Dokumen Utama Pengendalian dan Evaluasi	%	100
			Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya	%	100
		Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	% ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah	%	100
		Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	% ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	100
		Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan	% ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah	%	100
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Jumlah hasil penelitian yang menjadi input kebijakan dan perencanaan pembangunan	dok	1
			Penataan Kelembagaan SIDA	unit	1
			Penataan Jaringan SIDA	Kecamatan	19
	g. Peningkatan penerapan e-Arsip terintegrasi pada perangkat daerah	Program Pengelolaan Arsip	Jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	50
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang terduplikasi	%	100
			Persentase sarpras kearsipan yang terpelihara	%	50,00
	h. Penguatan kapasitas fiskal dan pengelolaan keuangan dan aset sesuai standar	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Opini	WTP
			Belanja Publik terhadap DAU	%	91,84
			Belanja Langsung terhadap total APBD	%	40,13
			Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	%	95,00
			Rasio SILPA thdp total belanja tahun sebelumnya	%	5,00
			Rasio SILPA thdp Jumlah Pendapatan	%	12,00
			Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	%	16,20
			Rasio pajak terhadap PAD	%	16,22
			Peningkatan PAD	%	24,67



No	Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2021	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2021
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Pengelolaan asset daerah	%	100
	i. Penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif dengan penerapan standar pelayanan publik pada seluruh unit pelayanan publik.	Program Administrasi Umum	Frekuensi peningkatan kapasitas aparatur, pendampingan aparatur dan penilaian kecamatan sebagai penyelenggara paten	bulan	12
			Jumlah perangkat kecamatan yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	orang	228
			Prosentase MoU kerjasama Daerah antar pemerintah daerah, provinsi dan pusat serta dengan pihak ketiga yang difasilitasi oleh TKSD	%	100
			Persentase desa / kelurahan yang dilakukan pembakuan rupa bumi	%	100,00
			Persentase desa yang telah dilakukan pemeliharaan patok batas wilayahnya	%	100,00
			Jumlah Rapat Koordinasi bagi pejabat pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan yang terselenggara selama 1 tahun	Keg	12
			Jumlah SKPD yang mengikuti rakor pejabat Pemda	PD	32



4.2 Arah Kebijakan Pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2021

Prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2021 diarahkan pada:

1. Penambahan kegiatan/anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
2. Pemenuhan belanja Penanganan Pandemi COVID-19 sampai akhir tahun 2021 yang mencakup:
 - a. Dukungan program pemulihan ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah, termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan, perlindungan sosial; dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - b. Dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi COVID-19 dan belanja prioritas lainnya; meliputi: dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19; insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19; dan belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan Prioritas adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimal. Penyusunan program dan kegiatan prioritas dalam perubahan RKPD Kabupaten Grobogan 2021 memperhatikan hasil evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2021, dan beberapa kebijakan terkait dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2021 yang berpengaruh terhadap perubahan APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2021.

Prioritas kegiatan dalam perubahan RKPD secara umum difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan belanja meliputi :

1. Penambahan kegiatan/anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
2. Pemenuhan belanja Penanganan Pandemi COVID-19 sampai akhir tahun 2021 yang mencakup:
 - a. Dukungan program pemulihan ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah, termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan, perlindungan sosial; dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - b. Dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi COVID-19 dan belanja prioritas lainnya; meliputi: dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19; insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19; dan belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perincian perubahan anggaran tercantum pada Lampiran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) yang menjadi satu kesatuan dari dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2021.



BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2021 disusun untuk menyesuaikan RKPD Tahun 2021 karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, dan terdapat beberapa kebijakan dan kebutuhan mendesak yang perlu diakomodir dalam perubahan APBD Tahun 2021. Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2021 disusun guna menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah.

Kaidah pelaksanaan perubahan RKPD tahun 2021 yang harus dipedomani agar dapat berjalan dengan baik sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 dengan berpedoman pada Perubahan RKPD tahun 2021 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2016-2021.
2. Perubahan RKPD tahun 2021 lebih lanjut dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Tahun Anggaran 2021, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Perubahan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021.
3. Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, dan bertindak sebagai pengawas agar program dan kegiatan berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal.

Program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dalam Perubahan RKPD tahun 2021 diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu mengarah pada pencapaian Visi Kabupaten Grobogan yaitu: **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh"**.

BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI

